



**PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP**



RPJPD **2025-2045**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN CILACAP**



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sehingga perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi dan arah Pembangunan.

Pasal 4

RPJPD berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 6

- (1) Sistematika RPJPD sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III permasalahan dan isu strategis;
 - d. bab IV visi dan misi daerah;
 - e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Uraian secara rinci sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

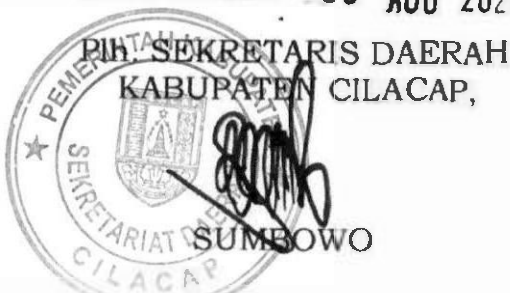
Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 AUG 2024



BUPATI CILACAP,

Mohamad Arief Irwanto
MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 AUG 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-279/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian Upaya Pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian Upaya Pembangunan tersebut memuat kegiatan Pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi secara adil dan merata.

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJPN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu dua puluh tahun.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana Pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana Pembangunan dalam dimensi jangka Panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Cilacap yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana Pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan (e) mengoptimalkan partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 207



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika RPJPD 2025-2045	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Geografi	II-1
2.1.2. Demografi	II-6
2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya	II-9
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-9
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	II-23
2.3 Aspek Daya Saing	II-38
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-38
2.3.2 Daya Saing SDM	II-48
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-51
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-60
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-62
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-66
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ...	II-68
2.6.1 Proyeksi Kependudukan	II-68
2.6.2 Proyeksi Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II-74
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-82
2.7.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	II-82
2.7.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana dalam dokumen RPJPN 2025-2045	II-82
2.7.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-84
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Permasalahan Pembangunan	III-1
3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	III-1
3.1.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya	III-1
3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	III-2
3.1.4 Aspek Pelayanan Umum	III-3
3.2 Isu Strategis	III-6



3.2.1	Isu Strategis Internasional	III-6
3.2.2	Isu Strategis Nasional.....	III-7
3.2.3	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	III-9
3.2.4	Isu Strategis Kabupaten Cilacap	III-10
3.2.5	Keselarasan Isu Strategis RPJPD dengan KLHS RPJPD.....	III-17
BAB IV	VISI MISI	IV-1
4.1	Visi Daerah	IV-1
4.2	Misi Daerah	IV-8
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1	Arah Kebijakan Daerah.....	V-1
5.2	Sasaran Pokok	V-23
5.3	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	V-32
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1.	Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.2.	Pembiayaan Pembangunan	VI-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Neraca Air Kabupaten Cilacap Berbasis Grid.....	II-4
Tabel 2. 2 Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2022, 2030 dan 2045.....	II-5
Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2023.....	II-8
Tabel 2. 4 PDRB Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha ADHB & ADHK Tahun 2014-2023.....	II-39
Tabel 2. 5 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023.....	II-42
Tabel 2. 6 Disparitas Harga di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-43
Tabel 2. 7 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2023	II-45
Tabel 2. 8 Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 (%).....	II-46
Tabel 2. 9 Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 (%)	II-47
Tabel 2. 10 Data Laka Kabupaten Cilacap Tahun 2023	II-55
Tabel 2. 11 Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2023	II-57
Tabel 2. 12 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2022 (GgCOZ).....	II-60
Tabel 2. 13 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2045 .	II-68
Tabel 2. 14 Proyeksi Jumlah, Sex ratio dan Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2045	II-69
Tabel 2. 15 Proyeksi TFR dan IMR Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2045	II-71
Tabel 2. 16 Proyeksi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2045.....	II-72
Tabel 2. 17 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2245....	II-75
Tabel 2. 18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Cilacap Tahun 2025 – 2045	II-76
Tabel 2. 19 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Cilacap Tahun 2025 – 2045	II-77
Tabel 2. 20 Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah di Kabupaten Cilacap Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2023	II-78
Tabel 2. 21 Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 – 2045	II-78
Tabel 2. 22 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045	II-79
Tabel 2. 23 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045.....	II-81



Tabel 3. 1	Isu Strategis Internasional	III-7
Tabel 3. 2	Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional	III-8
Tabel 3. 3	Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Cilacap	III-9
Tabel 3. 4	Keselarasn Isu Strategis RPJPD dengan KLHS RPJPD	III-17
Tabel 4. 1	Visi Kabupaten Cilacap 2025-2045.....	IV-2
Tabel 4. 2	Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Cilacap dengan RPJPN 2045.....	IV-3
Tabel 4. 3	Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Cilacap dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2045	IV-4
Tabel 4. 4	Sasaran Visi Kabupaten Cilacap 2025-2045	IV-7
Tabel 4. 5	Rumusan Misi Kabupaten Cilacap 2025-2045	IV-8
Tabel 4. 6	Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dengan Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045	IV-10
Tabel 5. 1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045	V-16
Tabel 5. 2	Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Cilacap dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-23
Tabel 5. 3	Perumusan Sasaran Pokok.....	V-25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.....	I-4
Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023	II-6
Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2023.....	II-7
Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023.....	II-10
Gambar 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023	II-10
Gambar 2. 5 Indeks Gini Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023	II-11
Gambar 2. 6 Indeks Gini Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023	II-12
Gambar 2. 7 PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah) ..	II-13
Gambar 2. 8 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023	II-14
Gambar 2. 9 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023	II-14
Gambar 2. 10 Perkembangan Angka Pengangguran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023	II-15
Gambar 2. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023	II-16
Gambar 2. 12 TPAK Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023....	II-17
Gambar 2. 13 TPAK Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023	II-17
Gambar 2. 14 TPAK Perempuan kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023	II-18
Gambar 2. 15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.....	II-19
Gambar 2. 16 PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kab. Cilacap Tahun 2014-2023 (%).....	II-20
Gambar 2. 17 Indeks ketahanan Pangan (IKP) Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-21
Gambar 2. 18 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023	II-21
Gambar 2. 19 PoU Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-22
Gambar 2. 20 PoU Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023	II-23
Gambar 2. 21 Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-24



Gambar 2. 22 Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023.....	II-24
Gambar 2. 23 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)	II-25
Gambar 2. 24 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (tahun)	II-26
Gambar 2. 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)	II-26
Gambar 2. 26 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (Tahun)	II-27
Gambar 2. 27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun).....	II-28
Gambar 2. 28 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (Tahun)	II-28
Gambar 2. 29 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2014-2023 (Ribu Rupiah)	II-29
Gambar 2. 30 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (Ribu Rupiah).....	II-30
Gambar 2. 31 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023.....	II-32
Gambar 2. 32 Prevalensi Stunting pada balita Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023	II-33
Gambar 2. 33 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2023.....	II-34
Gambar 2. 34 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2023	II-35
Gambar 2. 35 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023.....	II-36
Gambar 2. 36 Perkembangan IKG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-37
Gambar 2. 37 Perkembangan IKG Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023.....	II-37
Gambar 2. 38 Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-38
Gambar 2. 39 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023	II-40
Gambar 2. 40 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 ..	II-41
Gambar 2. 41 <i>Return On Asset</i> (ROA) BUMD di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023	II-43
Gambar 2. 42 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-44



Gambar 2. 43 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% bawah) di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023.....	II-46
Gambar 2. 44 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 ..	II-48
Gambar 2. 45 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023	II-49
Gambar 2. 46 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023.....	II-50
Gambar 2. 47 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023.....	II-50
Gambar 2. 48 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2023 (%)	II-51
Gambar 2. 49 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2023.....	II-52
Gambar 2. 50 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023	II-53
Gambar 2. 51 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023.....	II-53
Gambar 2. 52 Persentase Jalan Mantap Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2023 (%) ..	II-54
Gambar 2. 53 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 (%).....	II-55
Gambar 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2023... ..	II-56
Gambar 2. 55 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023.....	II-57
Gambar 2. 56 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2023	II-58
Gambar 2. 57 Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023.....	II-59
Gambar 2. 58 Realisasi Investasi Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023	II-61
Gambar 2. 59 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2023..	II-62
Gambar 2. 60 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Internet di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023.....	II-63
Gambar 2. 61 Indeks SPBE Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023	II-64
Gambar 2. 62 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023	II-65
Gambar 2. 63 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023	II-66
Gambar 2. 64 Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 Berdasarkan Proyeksi BPS.....	II-70
Gambar 3. 1 Megatrend Global 2045	III-6



Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045V-2



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD merupakan perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka Panjang. RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 10 menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dan substansi. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif; dan spasial.

Pentahapan penyusunan RPJPD dijelaskan pada Pasal 16 yaitu dimulai dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pasal 38 ayat (2) menjelaskan bahwa Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penetapan RPJPD harus dilengkapi dengan rekomendasi hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Maksud dari amanat Undang-Undang tersebut adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Isu strategis yang menjadi rekomendasi dalam dokumen KLHS menjadi bagian dalam penegasan isu strategis RPJPD. Rekomendasi sasaran strategis dan kebijakan serta target dalam dokumen KLHS juga menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melakukan penyusunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

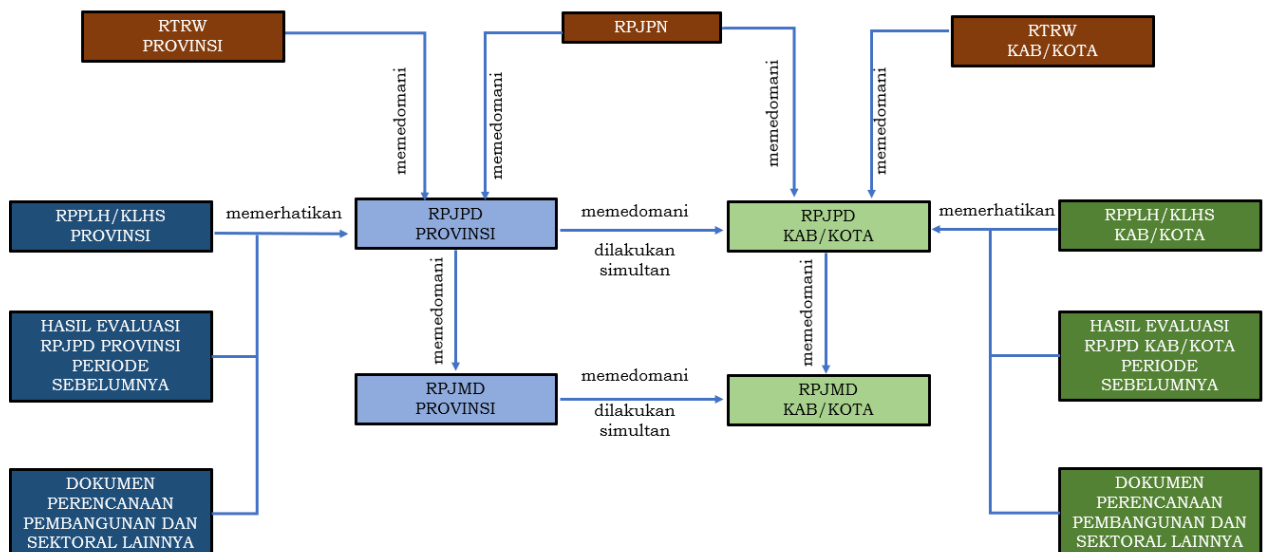


5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Penyusunan RPJPD Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harus memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW, RPJMD, dan KLHS.



Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

1. Hubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Dokumen RPJPD Kabupaten Cilacap disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN. Hal ini dimaksud supaya pembangunan di Kabupaten Cilacap selaras dengan pembangunan secara Nasional. Visi misi jangka Panjang dalam dokumen RPJPD selaras dengan visi misi RPJPN. Arah kebijakan nasional untuk Jawa pada umumnya dan Cilacap pada khususnya yang tertuang dalam dokumen RPJPN menjadi pijakan dalam penyusunan arah kebijakan

Kabupaten Cilacap. Kondisi ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pembangunan dengan Nasional.

2. Hubungan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah

Dokumen RPJPD Kabupaten Cilacap disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksud supaya pembangunan di Kabupaten Cilacap selaras dengan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Visi misi jangka Panjang dalam dokumen RPJPD Cilacap selaras dengan visi misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Arah kebijakan dan target sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah menjadi pijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Cilacap. Kondisi ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pembangunan dengan Provinsi Jawa Tengah.

3. Hubungan dengan Dokumen Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pelaksanaan pembangunan daerah, dengan acuan yang digunakan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus selaras. Dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. RTRW juga berperan memberikan norma, batasan dan arahan terhadap pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di daerah, termasuk pengendaliannya. RTRW juga menjadi acuan/pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-rencana-program pembangunan jangka Panjang daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. RTRW nantinya juga perlu ditindaklanjuti dengan rencana detail sebagai dasar bagi daerah dalam memberikan izin-izin pemanfaatan ruang atau kegiatan pembangunan. Harmonisasi antara RTRW dengan RPJPD akan menjamin terlaksananya pembangunan daerah dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

4. Hubungan dengan Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Penyusunan RPJMD mempedomani RPJPD yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah

dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

5. Hubungan dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen RPJPD dilengkapi dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan dokumen KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dokumen RPJPD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPN dan RTRW Kabupaten Cilacap.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 adalah :

1. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap selama kurun waktu tahun 2025-2045;
2. Menjaga integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD;
4. Pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan akhir pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045.

1.5. Sistematika RPJPD 2025-2045

RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Sistematika RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang memuat: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan permasalahan dan isu strategis daerah. Permasalahan memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Isu strategis memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok serta indikator sasaran pokok beserta target per periode.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang manajemen risiko pembangunan sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Wilayah Administrasi

Kabupaten Cilacap dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara 108° 4' 30" – 109° 30' 30" (Garis Bujur Timur) serta 7° 30' - 7° 45' 20" (Garis Lintang Selatan). Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sebesar 2.249,28 Km² (namun tidak termasuk Pulau Nusakambangan seluas 115,00 Km²) atau sekitar 6,48% dari luas Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan di sebelah Utara, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran di sebelah Barat, Kabupaten Kebumen di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Kabupaten Cilacap secara administratif dibagi menjadi 24 Kecamatan yang terdiri dari 269 Desa, 15 Kelurahan, 2.341 Rukun Warga (RW), dan 10.479 Rukun Tetangga (RT).

Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2023, mengalami curah hujan terbesar di Bulan April yang tercatat 356 mm, sementara hari hujan terbanyak terjadi di Bulan Januari sebanyak 21 hari. Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori menengah. Suhu minimum di kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2023 terjadi pada bulan Agustus (21,1°C) dan suhu maksimum terjadi pada Bulan Desember (33,5°C). Rata-rata suhu udara pada tahun 2023 sekitar 26,47-28,31°C. Kelembaban minimum terjadi di bulan Januari, Februari, dan Mei (55,0%) dan kelembaban maksimum terjadi di bulan Januari dan November (100,0%). Rata-rata kelembaban di Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2023 sekitar 81,9% - 87,0%.

Topografi

Secara topografi, Kabupaten Cilacap berada pada ketinggian 6-198 meter di atas permukaan laut. Pada bagian selatan wilayah Kabupaten Cilacap yang membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia terdapat sebuah pulau Nusakambangan yang memanjang dari arah barat ke timur dengan jarak ± 30 kilometer. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan

Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung laut dengan ketinggian rata-rata 1 meter dari permukaan laut.

Penggunaan Lahan

Total lahan di Kabupaten Cilacap seluas 213.849 Ha, digunakan untuk lahan pertanian sawah seluas 66.527 Ha digunakan untuk sawah irigasi, sawah pasang surut, sawah tadah hujan, sawah rawa lebak. Lahan pertanian bukan sawah seluas 104.136 Ha digunakan untuk tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang rumput, hutan negara, dan lainnya. Sisa luas lahan bukan pertanian seluas 43.186 Ha yang penggunaannya di luar pertanian seperti jalan, perumahan, dan lain-lain.

Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi berbagai dampak negatif perubahan iklim, seperti kenaikan suhu, peningkatan curah hujan ekstrem, kekeringan, dan banjir. Kabupaten Cilacap, seperti banyak daerah di Indonesia, merasakan dampak pemanasan global yang semakin parah. suhu yang naik menyebabkan cuaca yang panas dan ekstrim, yang berkontribusi pada peningkatan kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi udara. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan peningkatan curah hujan, yang berdampak pada banjir dan longsor.

Ancaman bencana di Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat. Hampir semua jenis ancaman bencana terdapat di Kabupaten Cilacap, mulai dari gempa, likuifaksi, tsunami, rob, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang/angin puting beliung, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, dan epidemi.

Wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki potensi ancaman bencana tanah longsor terdapat pada 12 kecamatan, menyebar mulai dari wilayah Kec. Kesugihan, Kec. Jeruklegi, Kec. Kawunganten, Kec. Gandrungmangu, Kec. Sidareja, Kec. Karangpucung, Kec. Cimanggu, Kec. Wanareja, Kec. Dayeuhluhur, Kec. Cipari dan Kec. Bantarsari.

Wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Cilacap berada di 21 kecamatan. Dari 21 kecamatan yang terancam yaitu wilayah Kec. Kedungreja, Kec. Kesugihan, Kec. Adipala, Kec. Nusawungu, Kec. Kroya, Kec. Maos, Kec. Kawunganten, Kec. Gandrungmangu, Kec. Sidareja, Kec. Karangpucung, Kec. Cimanggu, Kec.

Majenang, Kec. Wanareja, Kec. Dayeuhluhur, Kec. Sampang, Kec. Cipari, Kec. Patimuan, Kec. Bantarsari, Kec. Cilacap Selatan, Kec. Cilacap Tengah dan Kec. Kampung Laut.

Potensi ancaman lainnya yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap adalah banjir rob di 5 Kecamatan Cilacap Selatan wilayah pesisir pantai Tegal Kamulyan, Kec. Kawunganten, Kec. Adipala, Kec. Nusawungu dan Kec. Binangun. Bencana angin kencang, di beberapa wilayah yang tercatat dalam inventarisasi wilayah rawan angin kencang/angin topan keseluruhannya berjumlah 17 kecamatan, baik di wilayah kecamatan bagian barat maupun bagian timur. Kejadian angin kencang biasanya pada masa angin barat atau pancaroba dan dipicu akibat adanya badai di atas samudera hindia. Angin topan juga sering terjadi dibarengi dengan hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan badai di daerah pesisir dan gelombang besar yang sangat kuat di laut.

Wilayah rawan bencana gempa bumi terdapat di seluruh Kabupaten Cilacap, mengingat wilayah Cilacap berada diatas pertemuan lempeng indo-australia dan eurasia-pasifik. Kondisi ini menimbulkan kerawanan terjadinya gempa bumi apabila tumbukan kedua lempeng tersebut terjadi. Wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana tsunami berada pada kawasan pesisir pantai Cilacap, terdiri dari wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, Kampung Laut, Adipala, Nusawungu, Kawunganten dan Kecamatan Binangun.

Bencana kekeringan pun setiap tahun terjadi di 19 kecamatan, Kec. Nusawungu, Kec. Kroya, Kec. Adipala, Kec. Kesugihan, Kec. Cilacap Tengah, Kec. Jeruklegi, Kec. Kawunganten, Kec. Kampung Laut, Kec. Bantarsari, Kec. Gandrungmangu, Kec. Sidareja, Kec. Kedungreja, Kec. Cipari, Kec. Patimuan, Kec. Karangpucung, Kec. Cimanggu, Kec. Majenang, Kec. Wanareja, Kec. Dayeuhluhur.

Daya Dukung Daya Tampung Air

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar WHO (1.000 m³/kapita/tahun) maupun Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar 120 l/orang/hari atau 43,8 m³/kapita/tahun. Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian dihitung berdasarkan luasan dan Standar Nasional Indonesia sebesar 10.368 m³/ha/tahun. Kebutuhan air untuk keperluan industri sebesar 23.652 m³/ha/tahun.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya dukung air dari air limpasan hujan memiliki status sedang atau bersyarat dengan nilai 1,26

pada tahun 2022, dan 2,41 pada tahun 2045. Untuk meningkatkan nilai status daya dukung air, maka dapat diperoleh juga dari memanfaatkan seluruh potensi air permukaan yang ada di kabupaten Cilacap. Potensi ketersediaan air permukaan yang didapat dari penjumlahan potensi 20% debit air sungai dan mata air totalnya 2.886.605.712 m³/th. Bila potensi air limpasan dan air permukaan ini digabungkan maka total potensi ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Cilacap menjadi sebesar 5.605.698.539 m³/th dan angka daya dukung air meningkat menjadi 4,97 atau berstatus aman pada tahun 2045. Potensi CAT menjadi cadangan potensi ketersediaan air, untuk memanfaatkan potensi ketersediaan air tersebut diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang memadai.

Perhitungan neraca air berbasis grid dilakukan dengan dasar pembagian grid ukuran 150 m x 150 m didapat luasan dalam 1 grid yaitu 2,25 Ha yang di mana sesuai dengan kedetailan yang diamanatkan dalam pedoman penyusunan D3TLH. Setelah dilakukan distribusi grid ke dalam wilayah kabupaten sehingga didapat 105.724 Grid yang selanjutnya dilakukan analisa lebih lanjut terkait kecenderungan neraca air dapat dilihat dalam bentuk spasial kondisi neraca air tahun 2022 dan akhir perencanaan di Tahun 2045, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Neraca Air Kabupaten Cilacap Berbasis Grid

Kecamatan	Jumlah Grid	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	SA - DA	Status
Dayeuhluhur	8226	207.588.403	120.711.489	86.876.914	Belum Terlampaui
Wanareja	8991	248.901.909	129.665.314	119.236.595	Belum Terlampaui
Majenang	7478	183.265.842	106.780.509	76.485.334	Belum Terlampaui
Cimanggu	6985	178.703.360	103.875.385	74.827.975	Belum Terlampaui
Karangpucung	5734	142.652.036	47.106.253	95.545.783	Belum Terlampaui
Cipari	4787	121.888.884	126.210.331	-4.321.447	Terlampaui
Sidareja	2190	63.629.919	65.194.514	-1.564.595	Terlampaui
Kedungreja	3728	121.775.366	139.086.942	-17.311.576	Terlampaui
Patimuan	3627	115.728.445	131.415.268	-15.686.823	Terlampaui
Gandrungmangu	5334	158.554.868	167.119.089	-8.564.221	Terlampaui
Bantarsari	4611	136.773.217	99.574.283	37.198.933	Belum Terlampaui
Kawunganten	5730	162.074.328	151.785.514	10.288.814	Belum Terlampaui
Kampung Laut	6016	161.513.856	78.580.663	82.933.193	Belum Terlampaui
Jeruklegi	4753	127.412.118	44.354.417	83.057.701	Belum Terlampaui
Kesugihan	3763	92.953.213	103.456.852	-10.503.639	Terlampaui
Adipala	3309	93.493.512	115.375.715	-21.882.203	Terlampaui
Maos	1472	43.654.671	54.939.191	-11.284.520	Terlampaui
Sampang	1352	39.056.590	52.333.794	-13.277.204	Terlampaui
Kroya	2731	75.073.107	100.117.433	-25.044.326	Terlampaui
Binangun	2456	68.960.132	91.857.549	-22.897.417	Terlampaui
Nusawungu	2968	82.587.854	110.383.733	-27.795.879	Terlampaui
Cilacap Selatan	5902	175.078.688	18.420.257	156.658.431	Belum Terlampaui
Cilacap Tengah	2252	54.137.503	36.730.548	17.406.955	Belum Terlampaui
Cilacap Utara	1329	31.147.892	27.876.584	3.271.308	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Cilacap 2025-2045

Terdapat 12 dari 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap yang diproyeksikan terlampaui daya dukung airnya pada tahun 2045. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, Kecamatan Cipari, Gandrungmangu, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Kroya, Kecamatan Maos, Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Sampang dan Kecamatan Sidareja.

Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Perhitungan data dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah produksi padi berdasarkan data BPS Kabupaten Cilacap.

Produksi padi baik yang berasal dari sawah maupun ladang di Kabupaten Cilacap mengalami fluktuatif tahun 2022, dengan luas pertanian sebesar 98,639,34 Ha dan produksi padi 5,7 ton/Ha, maka jumlah produksi mencapai 562.244,24 ton. Setelah mengetahui jumlah produksi padi, maka dapat ditinjau daya dukung pangan di Kabupaten Cilacap. Konsumsi beras mulai tahun 2021 berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 94,01 kg/orang/tahun.

Tabel 2.2.
Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Cilacap
Tahun 2022, 2030 dan 2045

Uraian	2022	2030	2045
Luas Pertanian (Ha)	66.527,00	60.721,00	60.721,00
Jumlah produksi (ton) (5,7 ton/ Ha)	379.203,90	346.109,70	346.109,70
Konversi gabah kering giling ke beras (62,74%)	237.912,53	217.149,23	217.149,23
Jumlah penduduk Cilacap	1.988.622	2.152.101	2.578.020
Angka Konsumsi beras (kg/kap/thn)	94,01	94,01	94,01
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	186.950,35	202.318,99	242.359,64
DDL untuk pangan	1,27	1,07	0,09
Surplus beras (ton)	50.962,17	14.830,24	-25.210,42

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Cilacap 2025-2045

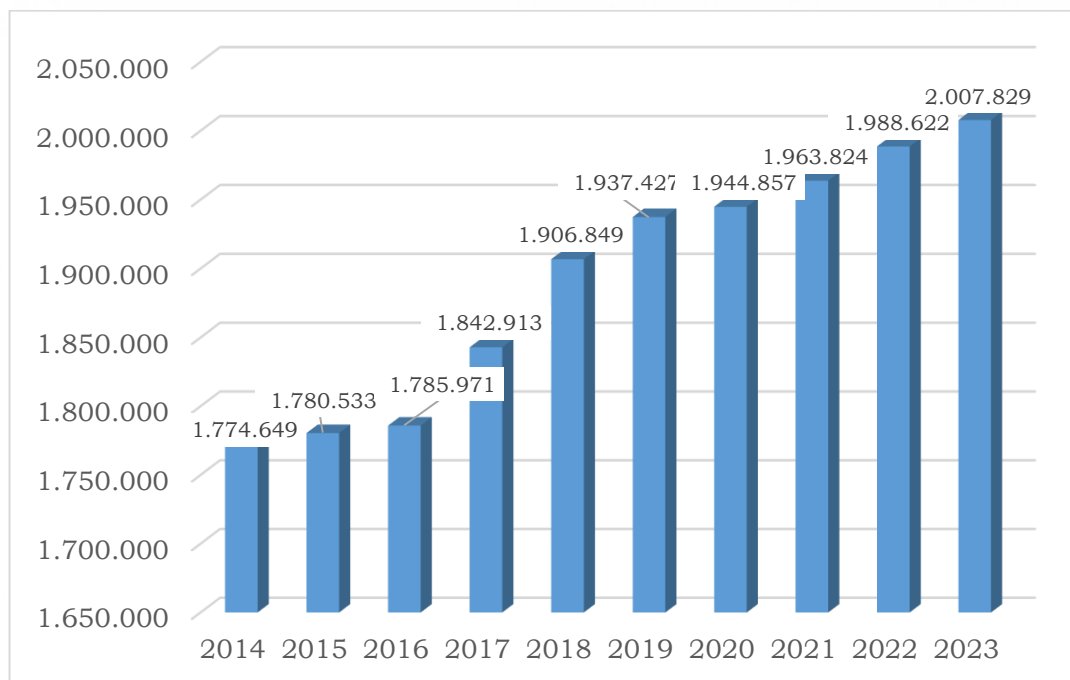
Daya dukung lahan pangan di Kabupaten Cilacap ditinjau dari komoditas beras berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui mengalami surplus atau kelebihan beras pada tahun 2022-2045. Pada tahun 2022, konversi gabah ke beras 237.912,53 ton, dengan kebutuhan konsumsi 186.960,35 ton, sehingga menghasilkan daya dukung lahan pangan sebesar 1,27 dan pada tahun 2022 Kabupaten Cilacap surplus sebanyak 50.962,17 ton.

Pada tahun 2045, jumlah produksi beras di Kabupaten Cilacap sebesar 346.109,7 ton dengan kebutuhan konsumsi 242.359,64 ton, sehingga menghasilkan daya dukung lahan pangan sebesar 0,09 artinya pada tahun 2045 Kabupaten Cilacap defisit beras. Defisit beras tahun 2045 sebanyak 25.210,42 ton. Kondisi yang terus menurun ini, harus diperhatikan, perlu ada upaya peningkatan produktivitas beras di masa yang akan datang. Salah satunya adalah meningkatkan intensifikasi pertanian dan meningkatkan nilai rendemen menjadi 70% agar nilai daya dukung lahan pangan dapat bertahan pada nilai 1,27 dan surplus beras relatif stabil.

2.1.2. Demografi

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2014-2022 cenderung menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 sebanyak 1.774.649 jiwa, kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebanyak 2.007.829 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang sepadan atau penciptaan lapangan kerja baru. Jika lapangan kerja yang tersedia tidak cukup untuk menampung seluruh tenaga kerja yang ada, maka akan semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu pemerintah harus mengantisipasi dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru.



Gambar 2.1.

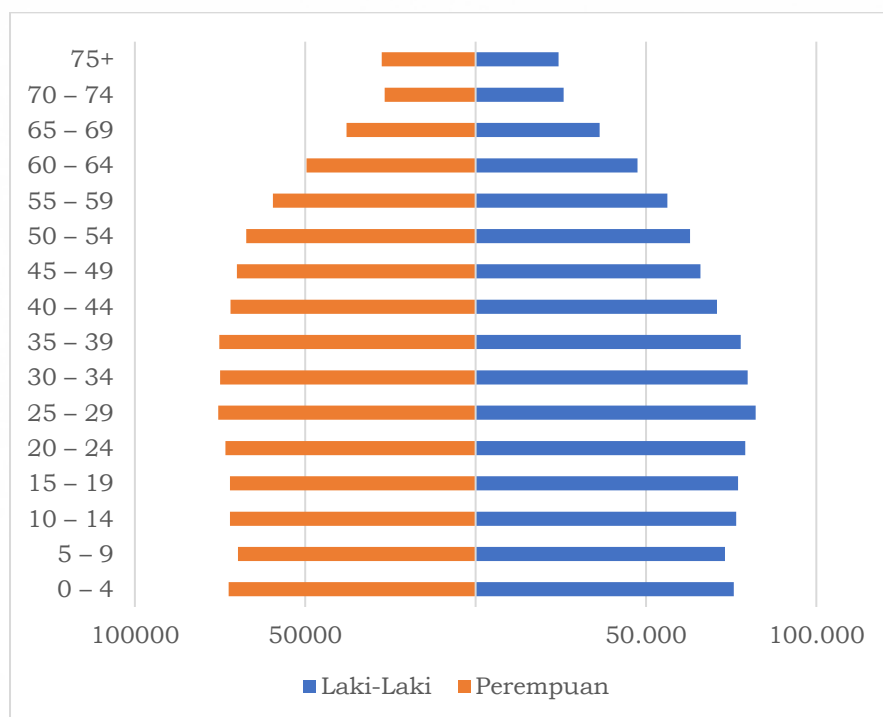
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur digunakan untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan kelompok umur kategori penduduk produktif tahun 2023 (15–64 tahun) sebesar 1.389.409 jiwa atau 69,20 persen, jumlah penduduk tidak produktif (>65 tahun) sebanyak 178.708 jiwa atau 8,90 persen dan jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 439.712 jiwa atau 21,90 persen. Potensi tenaga kerja di Kabupaten Cilacap cukup besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 69,20 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Cilacap dapat dilihat bahwa struktur kependudukan mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar yaitu 69,20 persen. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), dan kualitas Sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Cilacap, namun apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat Cilacap dan peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif, maka yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran.



Gambar 2.2.

Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024, Data Diolah

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap tidak merata. Kecamatan Majenang selama sepuluh tahun terakhir, memiliki penduduk yang paling banyak. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kecamatan Majenang sebanyak 146.630 jiwa (7,21 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar 140.640 jiwa (6,92 persen). Sedangkan Kecamatan yang berpenduduk paling kecil dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir adalah Kecamatan Kampung Laut. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kecamatan Kampung Laut sejumlah 16.255 jiwa atau 0,80 persen dari total penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2023.

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka dikenal suatu ukuran yaitu kepadatan penduduk. Ukuran ini dapat digunakan sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat, yaitu dari 896 jiwa/km² pada tahun 2022 menjadi 904 jiwa/km² pada tahun 2023. Seperti tahun sebelumnya, penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Cilacap Selatan sebanyak 10.557 jiwa/km². Sementara itu Kecamatan Kampunglaut yang luasnya 5,67 persen dari total luas Kabupaten Cilacap hanya dihuni 121 jiwa/km².

Tabel 2.3.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Cilacap Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Dayeuhluhur	191,73	50.486	263
2	Wanareja	195,92	110.063	562
3	Majenang	167,60	146.630	875
4	Cimanggu	163,35	108.418	664
5	Karangpucung	124,74	83.432	669
6	Cipari	107,53	68.932	641
7	Sidareja	49,31	64.823	1.315
8	Kedungreja	82,01	92.606	1.129
9	Patimuan	78,68	51.770	658
10	Gandrungmangu	119,26	115.308	967
11	Bantarsari	99,49	77.896	783
12	Kawunganten	138,09	89.242	646
13	Kampunglaut	134,07	16.255	121
14	Jeruklegi	99,41	80.713	812
15	Kesugihan	89,10	140.640	1.578
16	Adipala	74,65	99.324	1.331
17	Maos	34,30	48.192	1.405
18	Sampang	28,89	44.894	1.554
19	Kroya	61,68	119.953	1.945
20	Binangun	53,73	71.863	1.337



No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
				(Jiwa/km ²)
21	Nusawungu	66,98	90.754	1.355
22	Cilacap Selatan	8,04	84.882	10.557
23	Cilacap Tengah	51,00	90.203	1.769
24	Cilacap Utara	29,72	85.291	2.870
Kabupaten Cilacap		2.249,28*	2.032.570	904

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

* Luas wilayah belum termasuk Pulau Nusakambangan, luas Pulau Nusakambangan 115,00 km². Apabila Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah Kabupaten Cilacap dengan Pulau Nusakambangan adalah sebesar : 860 jiwa/ km².

2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

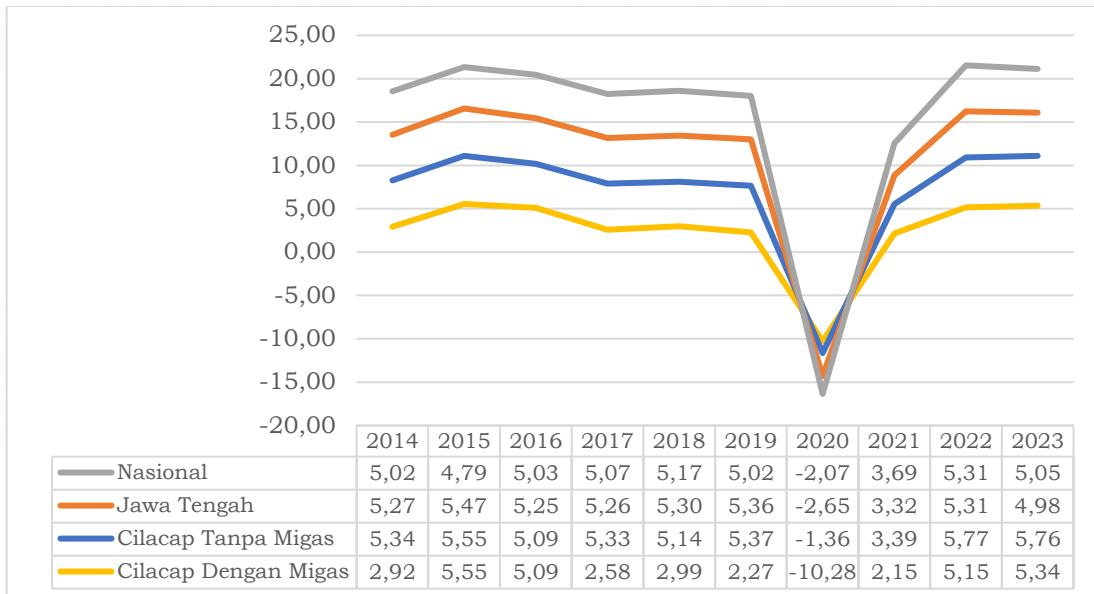
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan dengan migas di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu sepuluh tahun (2014-2023), pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas sebesar 5,34 persen, sementara tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -1,36 persen. Selanjutnya tahun 2023 meningkat kembali menjadi 5,76 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak, dimana kontribusi industri minyak terhadap PDRB secara total mempunyai andil yang cukup besar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -10,28 persen. Sedangkan tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami peningkatan menjadi 5,34 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas (5,76%) jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah (4,98%) dan Nasional (5,05%). Sementara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap dengan migas (5,34%) pada tahun 2023 posisinya masih di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (4,98%) dan Nasional (5,05%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

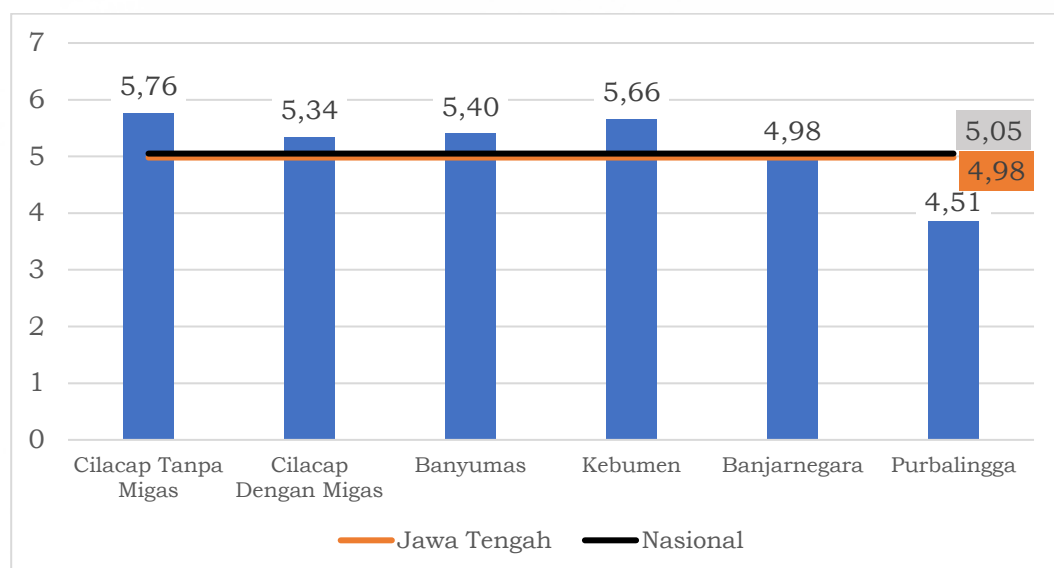


Gambar 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap (tanpa migas) pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga capaian laju pertumbuhan Kabupaten Cilacap berada di atas capaian Kabupaten Banyumas (5,40%), Kabupaten Kebumen (5,66%), Kabupaten Banjarnegara (4,98%), dan Kabupaten Purbalingga (4,51%).

Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten di sekitarnya, berada di atas capaian Kabupaten Banjarnegara (4,98%) dan Kabupaten Purbalingga (4,51%), namun di bawah capaian Kabupaten Banyumas (5,40%) dan Kabupaten Kebumen (5,66%). Selengkapnya terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4.
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

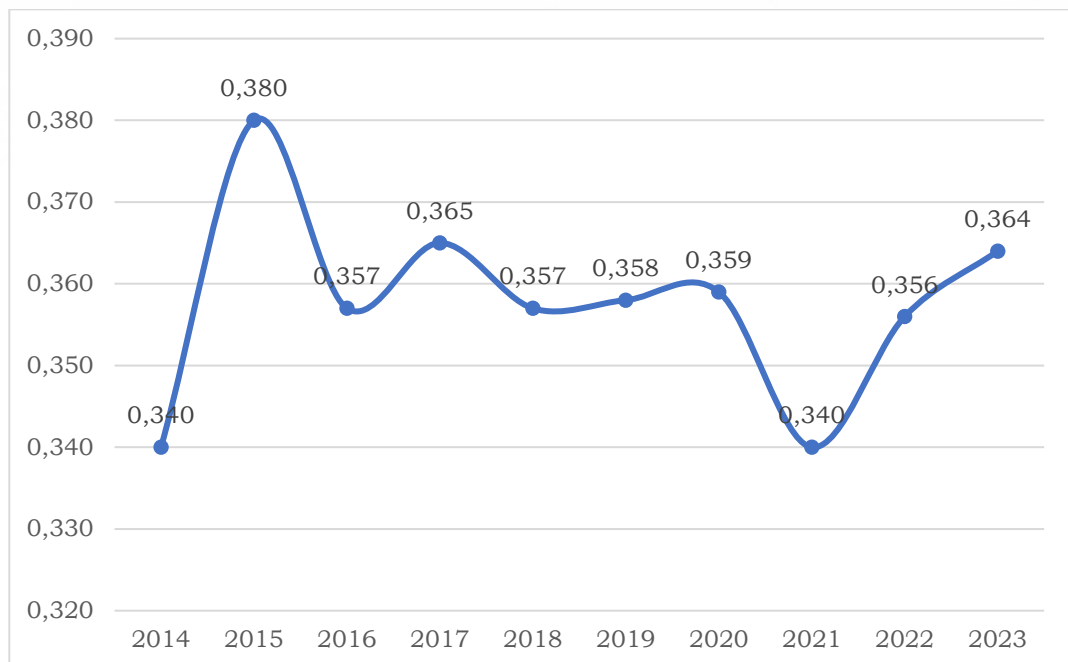
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Indeks Gini

Indeks Gini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini dapat menunjukkan distribusi atau pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi. Koefisiennya berkisar antara angka 0 (pemerataan sempurna) dan angka 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata pembagian pendapatan dalam populasi tersebut.

Perkembangan indeks gini Kabupaten Cilacap pada interval tahun 2014-2023 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2014 indeks gini Kabupaten Cilacap sebesar 0,340 kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,380 di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, BPS Kabupaten Cilacap tidak melakukan perhitungan Indeks Gini lagi. Angka koefisien sebesar 0,36 tersebut menunjukkan bahwa persebaran pendapatan di Kabupaten Cilacap masuk dalam katagori ketimpangan moderat.

Penurunan indeks Gini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di masyarakat Kabupaten Cilacap mengalami penurunan, sejalan dengan tujuan ke-10 SDG's, yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Angka indeks gini tahun 2016 – 2020 menggunakan angka Provinsi Jawa Tengah dikarenakan BPS tidak melakukan perhitungan sampai ke Kabupaten, sedangkan pada tahun 2021-2023 BPS kembali melakukan perhitungan terkait indeks gini.



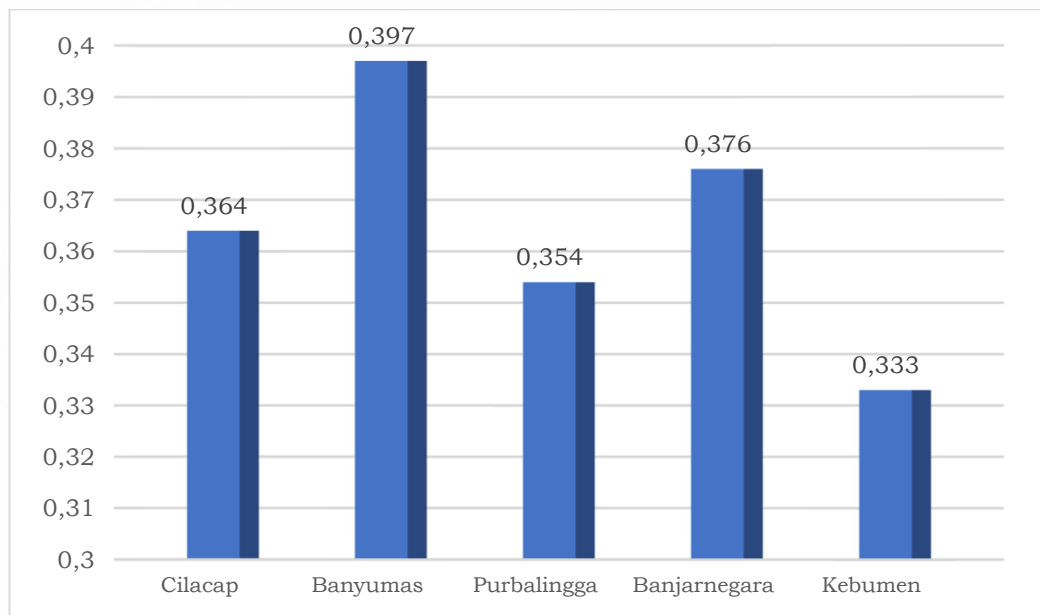
Gambar 2.5.

Indeks Gini Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Indeks Gini Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, capaiannya berada di bawah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen. Namun berada

di atas capaian Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.6.
Indeks Gini Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

PDRB Per Kapita

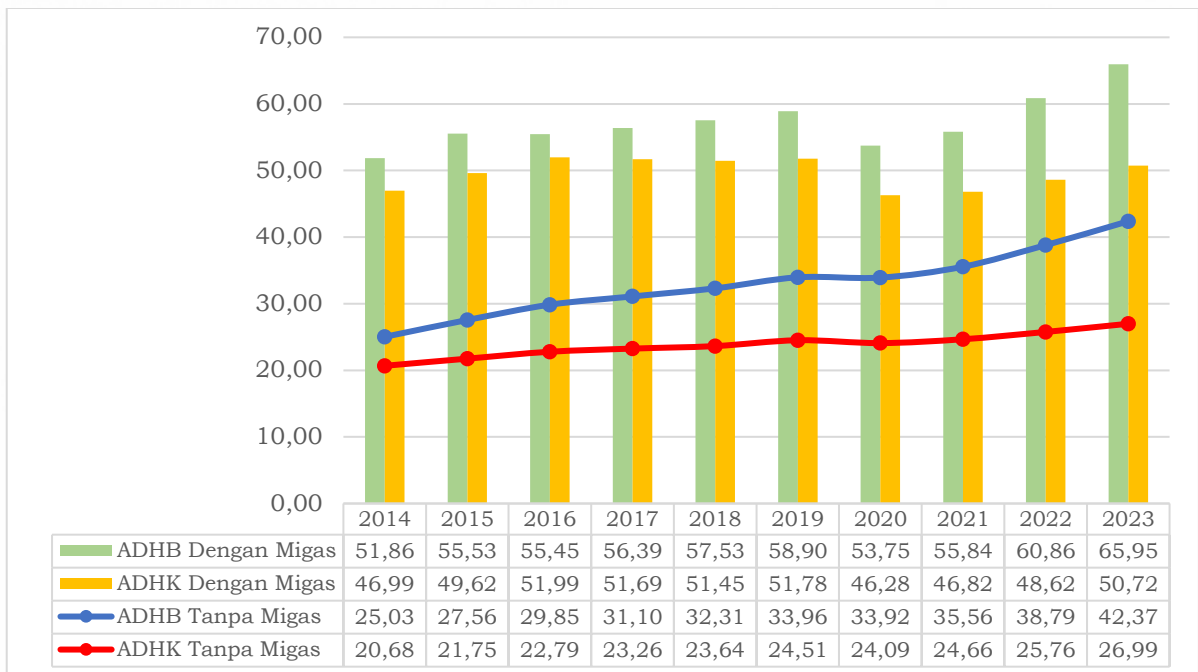
PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. PDRB Perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Kabupaten Cilacap Tanpa Migas pada tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari adanya pandemi Covid-19. Tahun 2014 sebesar Rp 25,03 juta rupiah meningkat menjadi sebesar Rp 33,96 juta rupiah pada tahun 2019, kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi Rp 33,92 juta rupiah. Angka tersebut meningkat kembali menjadi 42,37 juta rupiah di tahun 2023.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Sama halnya dengan PDRB Perkapita ADHB, PDRB Perkapita ADHK Tanpa Migas Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari adanya pandemi Covid-19. Tahun 2014 sebesar Rp 20,68 juta rupiah meningkat menjadi sebesar Rp 24,51 juta

rupiah pada tahun 2019, kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi Rp 24,09 juta rupiah. Angka tersebut meningkat kembali menjadi 26,99 juta rupiah di tahun 2023.

Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut. Selengkapnya terkait PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



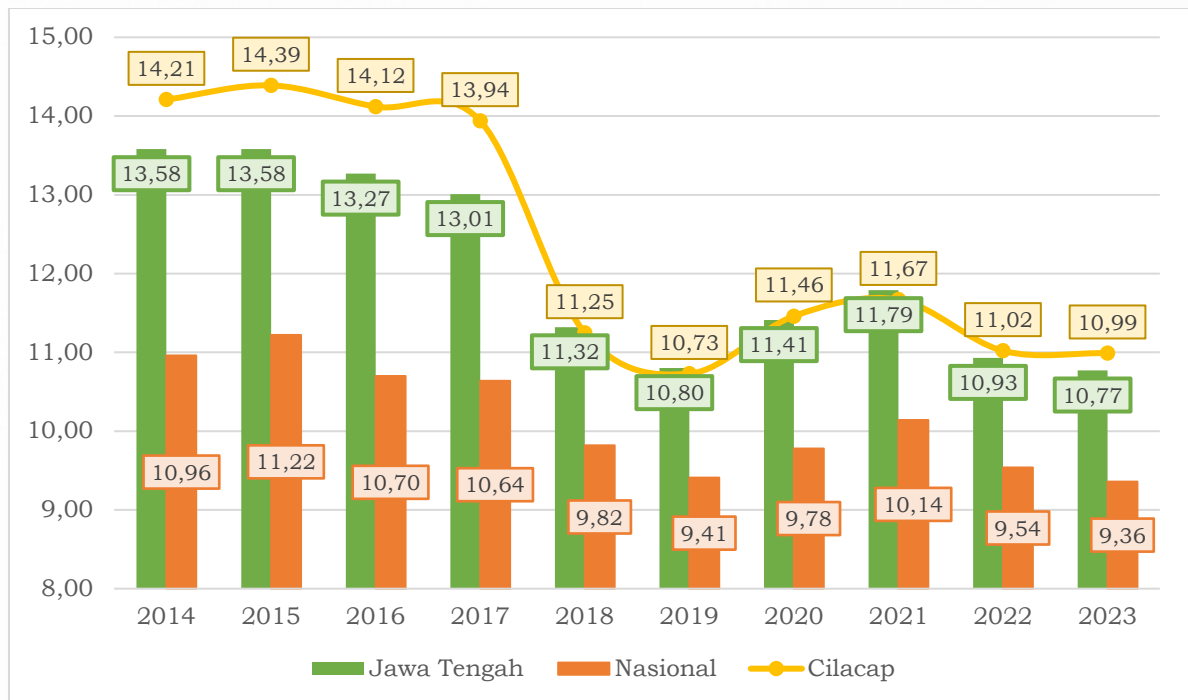
Gambar 2.7.

PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah)

Sumber : BPS kabupaten Cilacap Tahun 2024

Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap selama tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap, tetapi pada tahun 2020 ada peningkatan karena dampak pandemi Covid-19. Besarnya Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 sebesar 14,21% menurun menjadi 11,46% pada tahun 2020, dan pada tahun 2023 turun kembali menjadi 10,99%. Jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa tengah dan Nasional, capaian Kemiskinan Kabupaten Cilacap relatif lebih tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

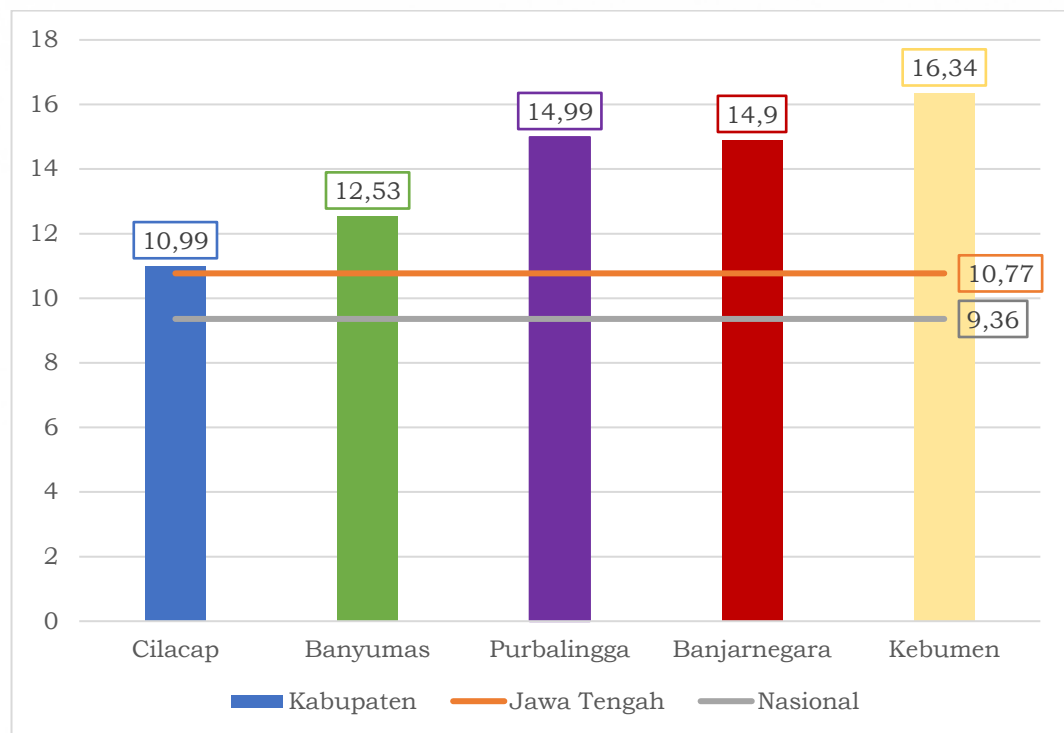


Gambar 2.8.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Kebumen, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



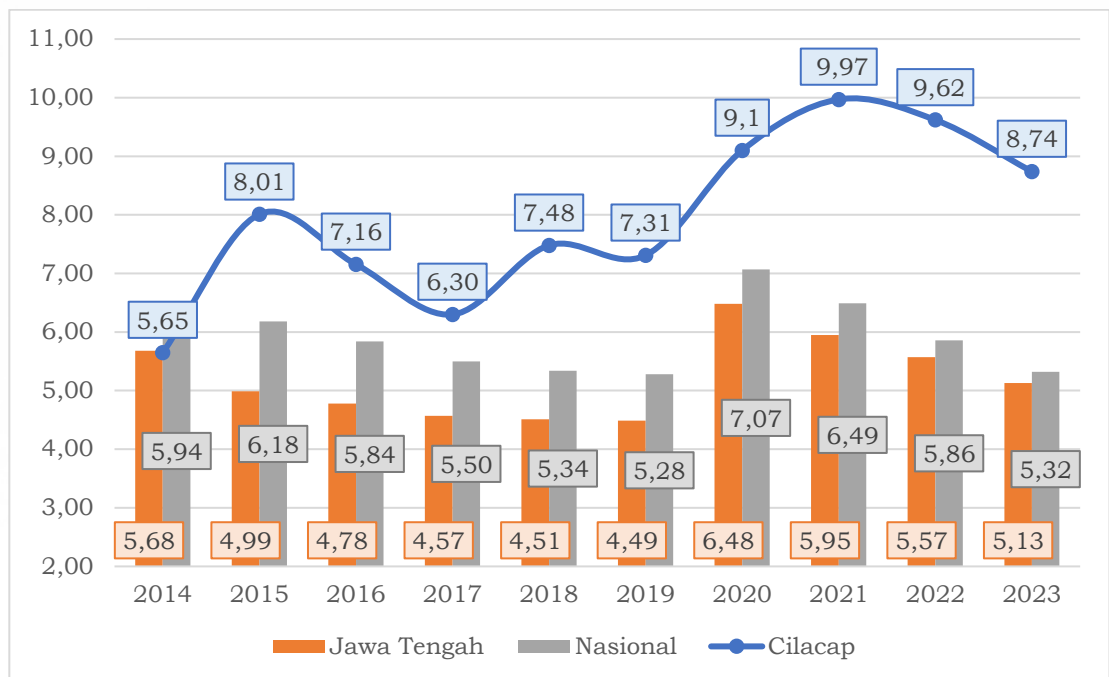
Gambar 2.9.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Gambaran Ketenagakerjaan

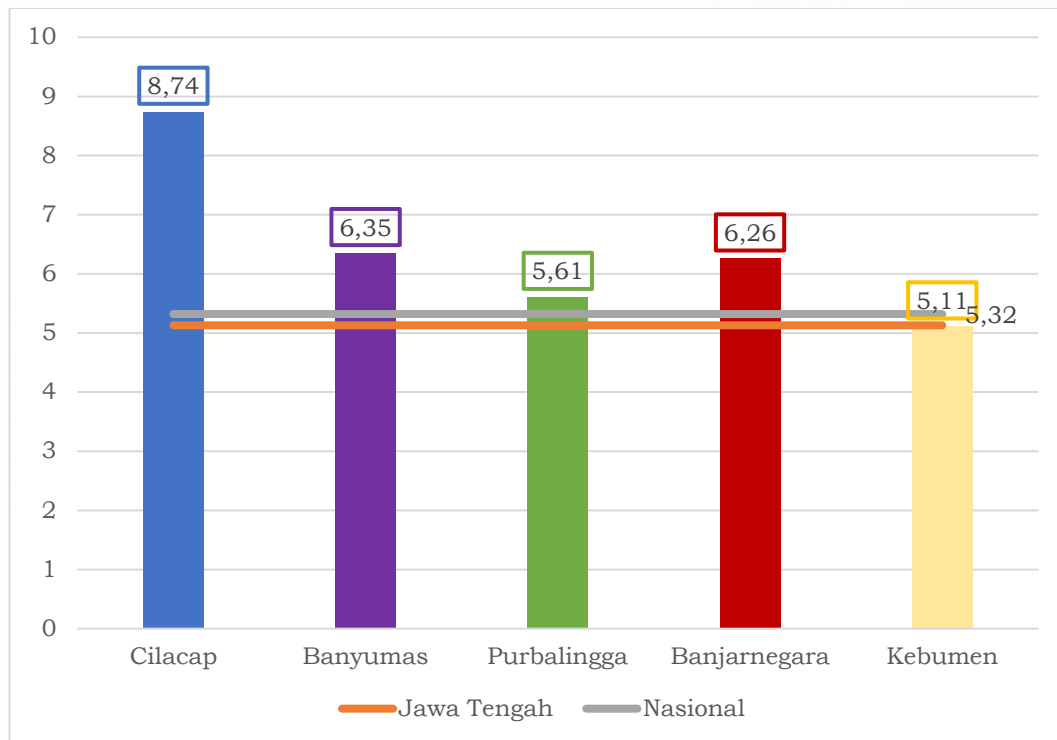
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap. Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode tahun 2014-2023 mengalami fluktuatif dan tren meningkat, pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cilacap sebesar 5,65% terus menurun sampai tahun 2019 sebesar 7,31%. Namun, meningkat menjadi sebesar 9,1% pada tahun 2020 dan 9,97% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak pekerja yang diberhentikan. Selain itu banyaknya usaha (terutama UMKM) yang terdampak bahkan gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 9,62% dan kembali menurun menjadi 8,74% di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa tengah dan Nasional, capaian TPT Kabupaten Cilacap lebih tinggi.



Gambar 2.10.
Perkembangan Angka Pengangguran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

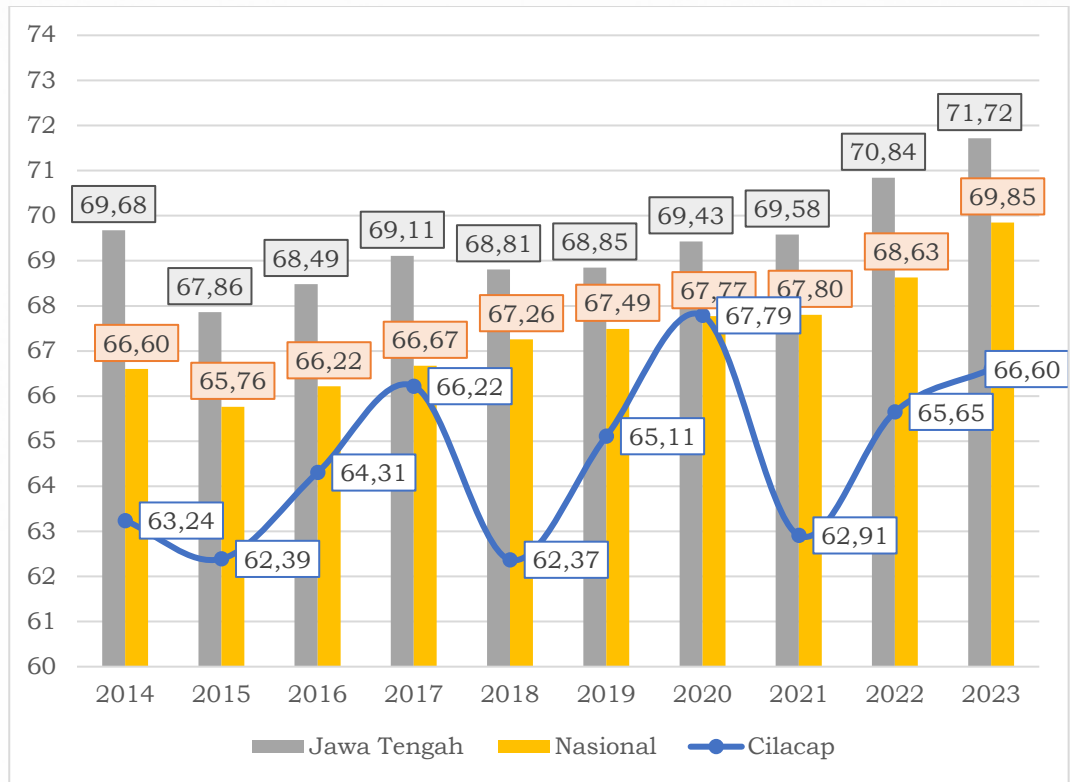
TPT Kabupaten Cilacap pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga berada pada posisi tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Selengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 2.11.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cilacap menunjukkan tren fluktuatif, pada tahun 2014 capaian TPAK Kabupaten Cilacap sebesar 63,24 persen mengalami peningkatan menjadi 66,60 persen pada tahun 2023. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap Tengah tahun 2023 mencapai 1.046.667,00 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia bekerja pada tahun 2023 sebesar 1.571.462,00 orang.

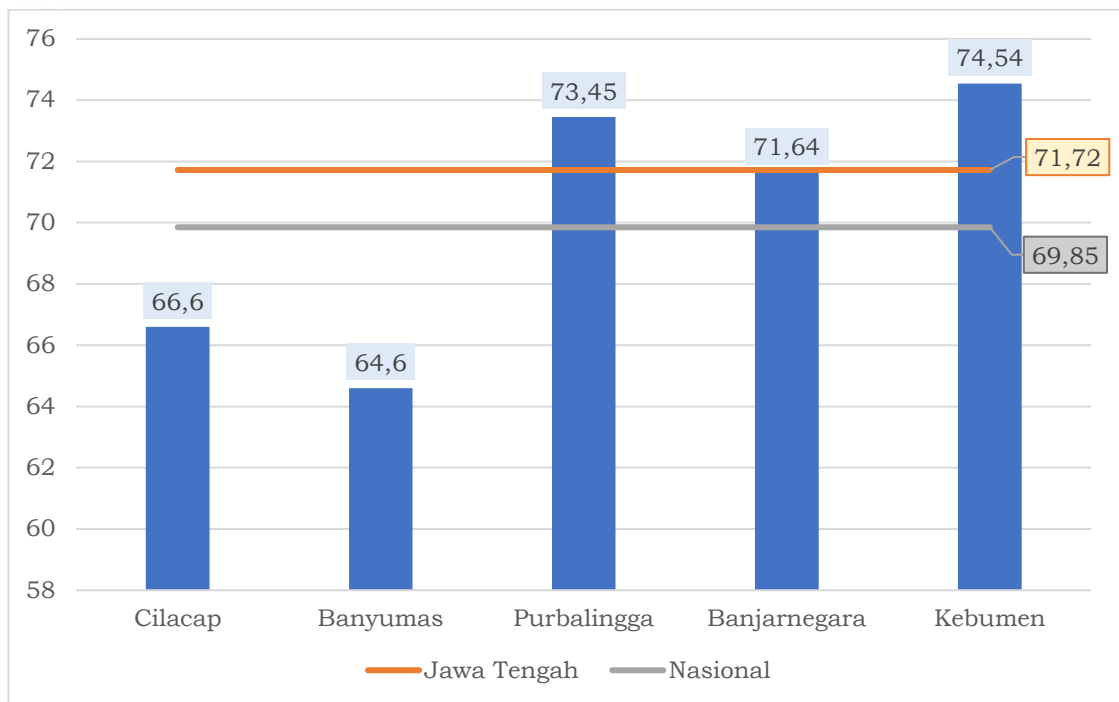
Jika dibandingkan dengan capaian TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, TPAK Kab. Cilacap masih berada di posisi terbawah. Selengkapnya terkait perkembangan TPAK Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.12.
TPAK Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

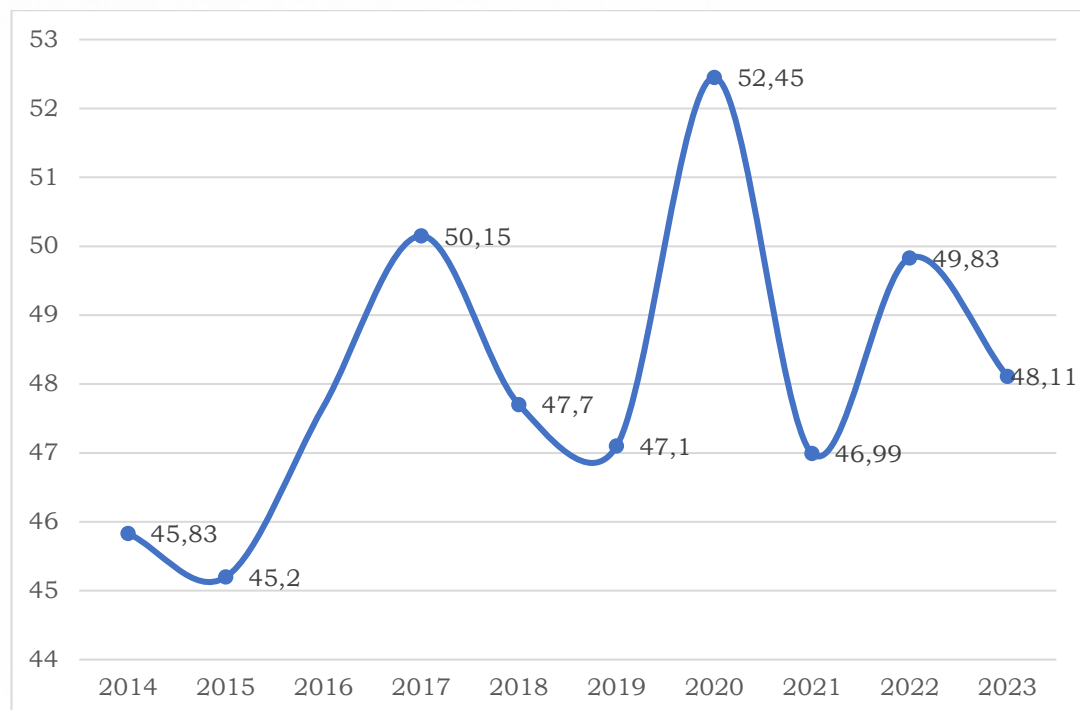
TPAK Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga berada di bawah capaian Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen serta berada di atas capaian Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.13.
TPAK Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. TPAK Perempuan di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 10 tahun menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2014 TPAK perempuan sebesar 45,83%, kemudian di tahun 2023 menjadi 48,11%. TPAK perempuan yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

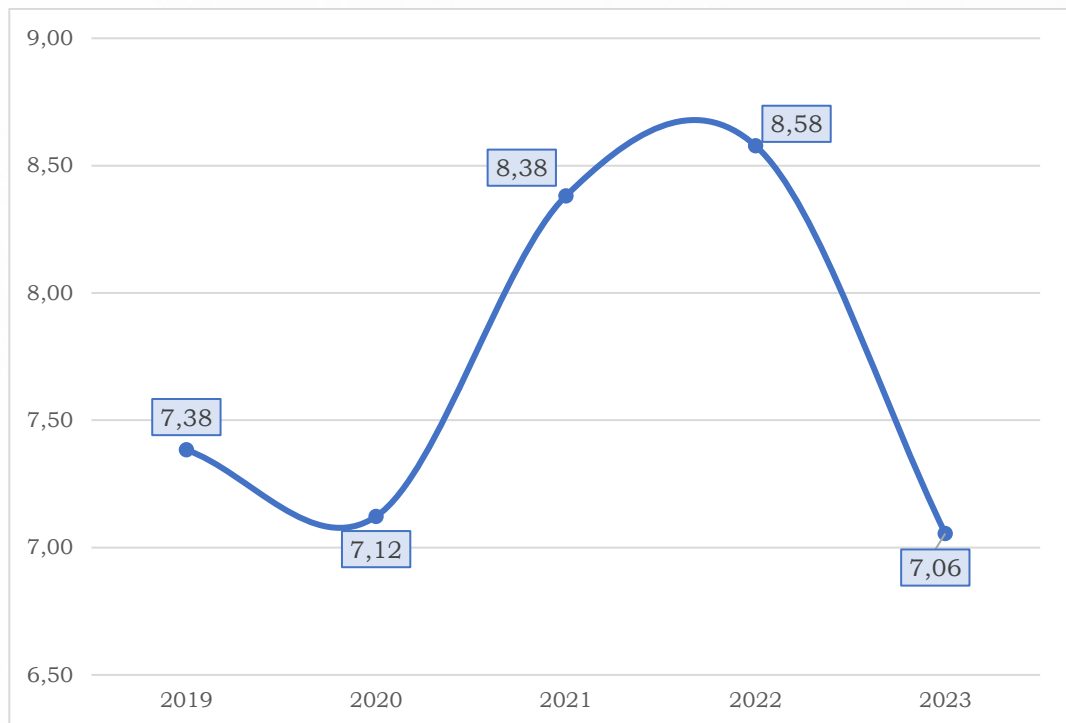


Gambar 2.14.
TPAK Perempuan kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Namun di penurunan terbesar tahun 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya PHK atau pekerja yang dirumahkan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 7,38%, kemudian di tahun 2020 turun menjadi 7,12% dan mampu meningkat kembali menjadi 8,58% di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan menjadi 7,06%. Selengkapnya terkait cakupan kepesertaan

jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



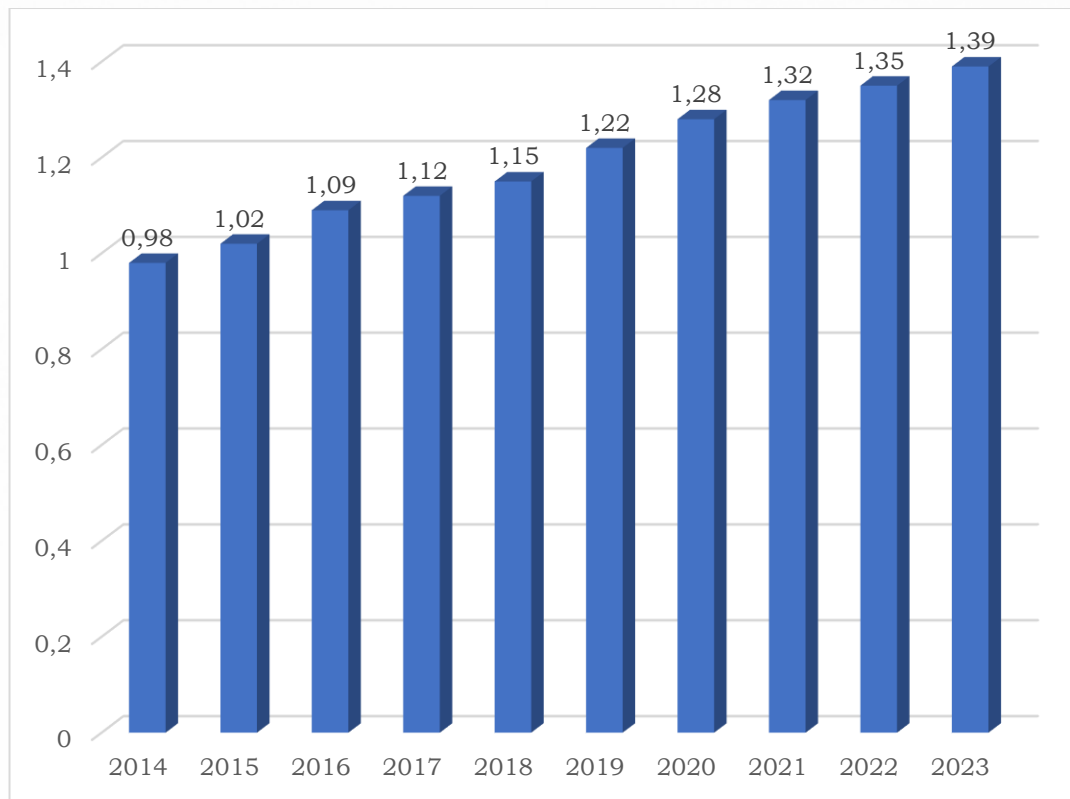
Gambar 2.15.

**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023**

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, Tahun 2024

Gambaran Pariwisata

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi : Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 proporsinya sebesar 0,98%, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 1,39%. Peningkatan Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam sektor pariwisata dan perhotelan. Meningkatnya proporsi PDRB dari sektor ini juga menunjukkan adanya peningkatan investasi dan pengembangan dalam industri akomodasi dan kuliner, seperti pembukaan hotel, restoran, dan kafe baru. Selengkapannya terkait perkembangan rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Cilacap tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.16.
PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kab. Cilacap
Tahun 2014-2023 (%)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

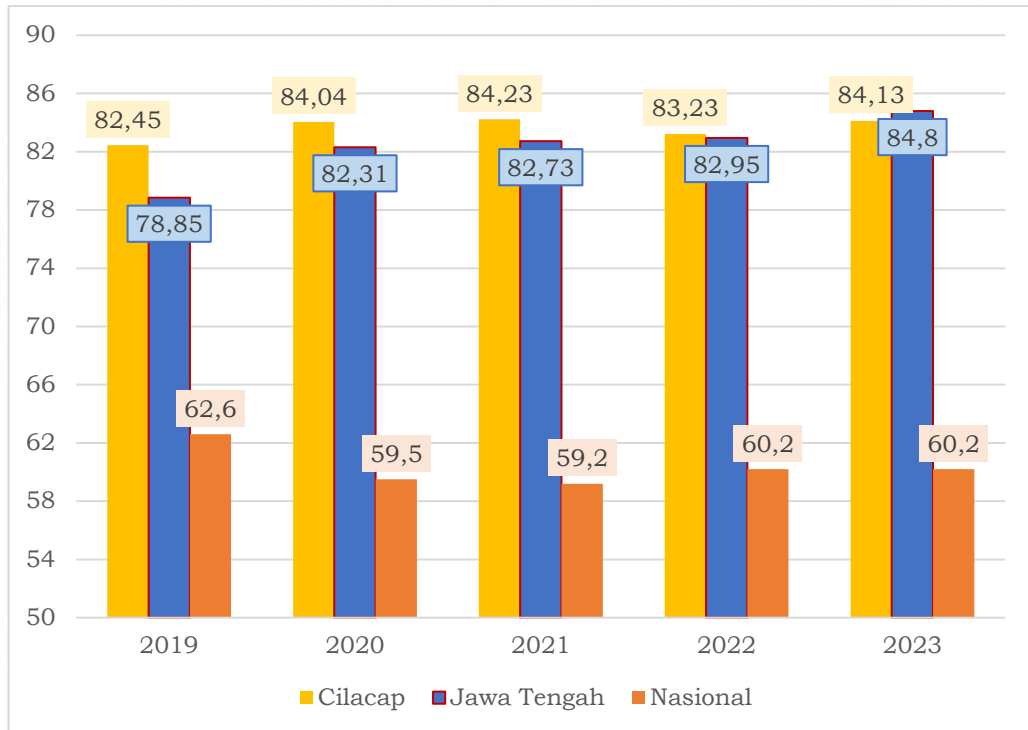
Jumlah tamu wisatawan mancanegara dilihat dari data Jumlah Wisatawan Mancanegara yang menginap di setiap hotel yang berada di Kabupaten Cilacap. Semakin banyak jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel yang berada di Kabupaten Cilacap maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Pada tahun 2023 wisatawan mancanegara di Kabupaten Cilacap sebanyak 322 orang.

Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

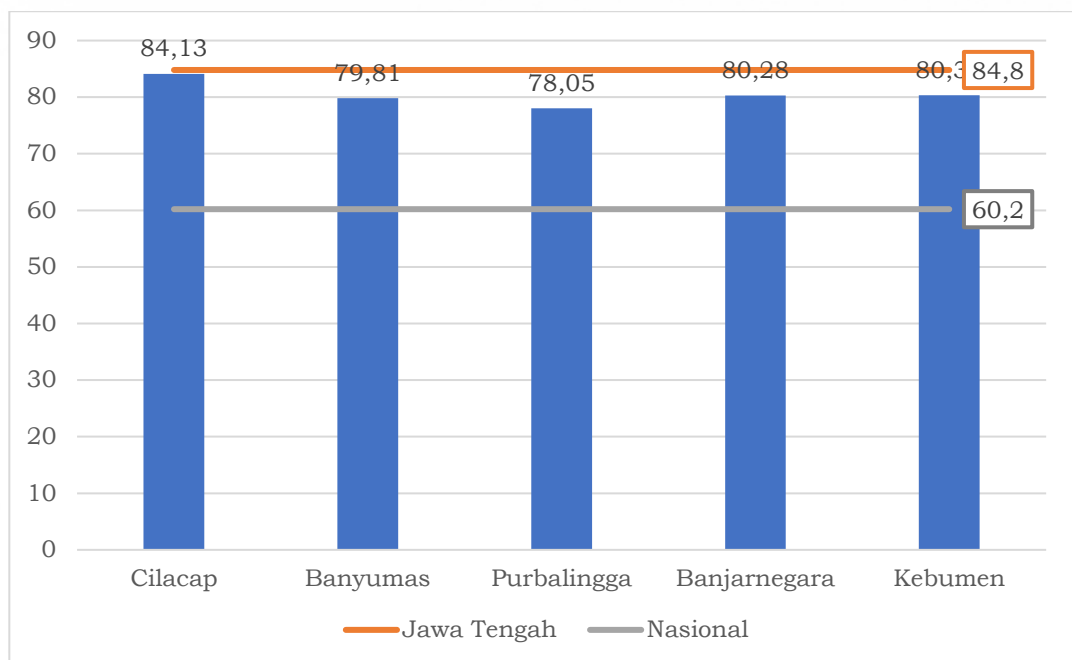
IKP Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung mengalami kenaikan kecuali di tahun 2022. Pada tahun 2019 IKP Kabupaten Cilacap sebesar 82,45 terus meningkat sampai di angka 84,23 di tahun 2021, namun di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 82,23. Penurunan skor di tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan. Skor IKP Kabupaten Cilacap kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 84,13. Jika dibandingkan

dengan capaian Provinsi dan Jawa Tengah, IKP Kabupaten Cilacap masih berada di atas capaian Jawa tengah dan di bawah IKP nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.17.
Indeks ketahanan Pangan (IKP) Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

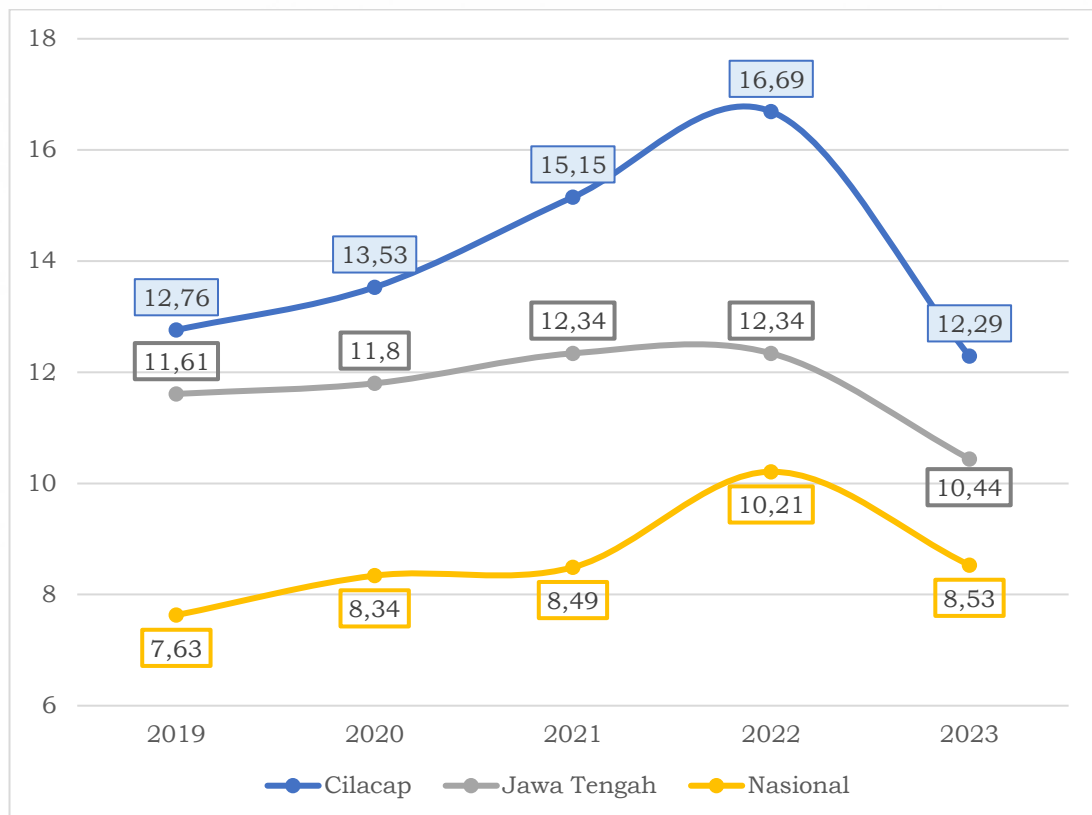
IKP Kabupaten Cilacap tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya masih menempati posisi tertinggi untuk capaian IKP. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.18.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023
Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhannya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data PoU Kabupaten Cilacap mengalami fluktuasi selama tahun 2019-2023. Tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat dari 12,76% menjadi 13,53%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 merupakan awal dimulainya pandemi dan dimulai pembatasan-pembatasan atau PPKM. Pada tahun 2021 angka PoU kembali naik menjadi 15,15% disebabkan pada tahun 2021 merupakan puncak pandemi yang ditandai dengan seluruh kegiatan bekerja dan belajar dilakukan dari rumah (*Pembelajaran Jarak Jauh* dan *Work from Home*). Pada tahun 2023 angka PoU kembali menurun mengikuti trend angka kemiskinannya, menjadi 12,29% dengan penurunan sebesar 4,40%. PoU Kabupaten Cilacap tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan capaian Jawa Tengah dan Nasional.

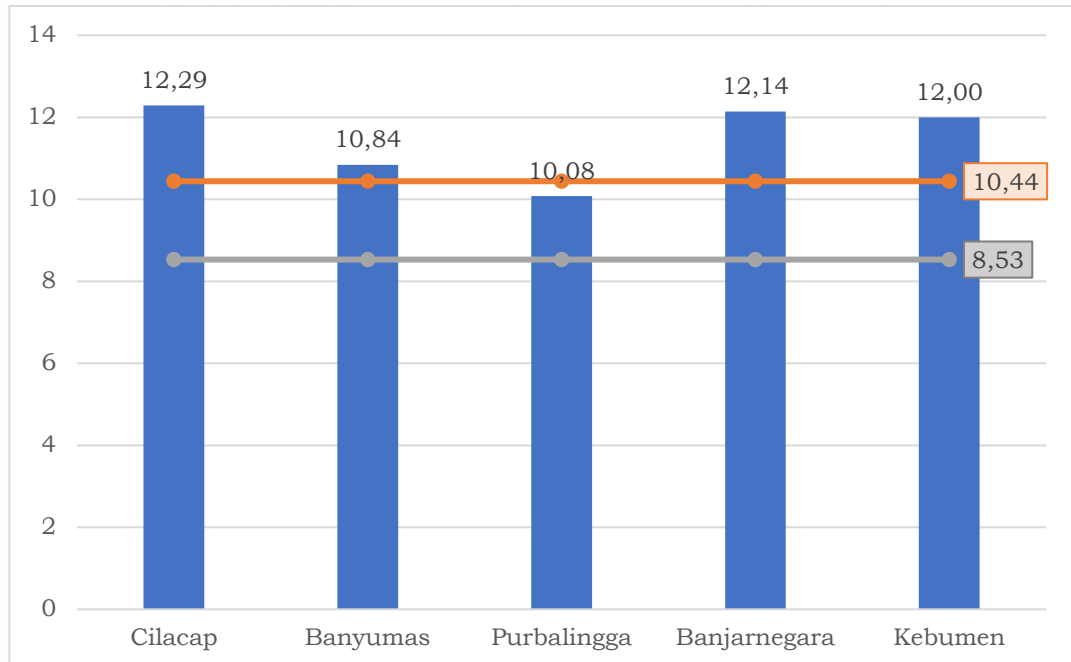


Gambar 2.19.
PoU Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

PoU Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, memiliki PoU paling tinggi

dibandingkan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.20.

PoU Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

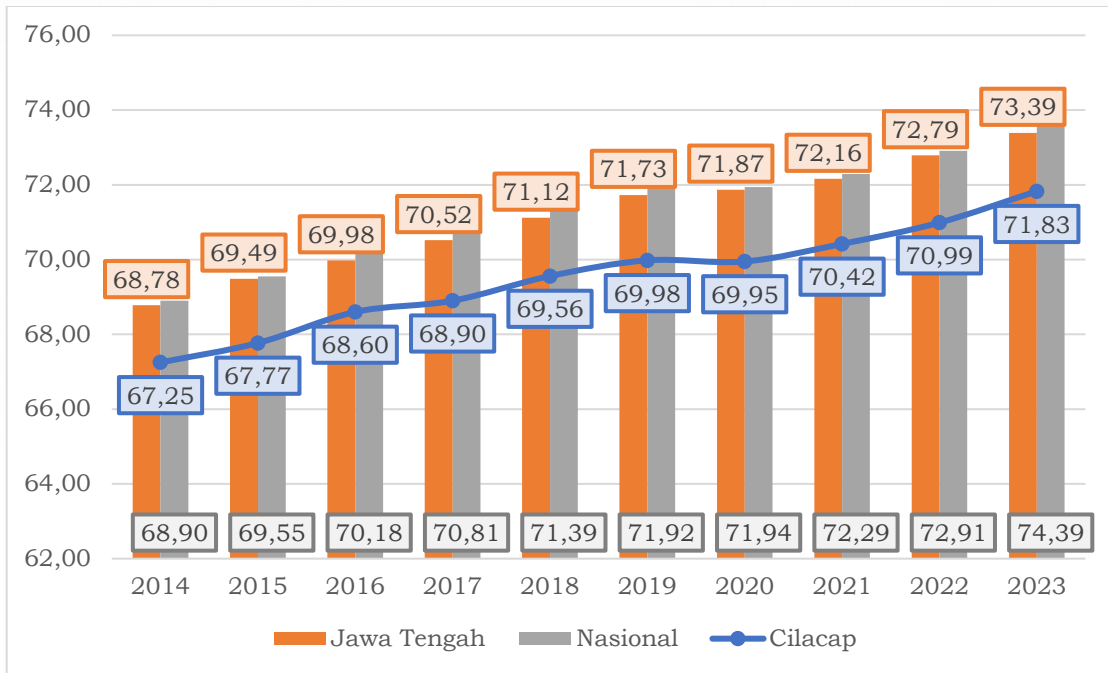
Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), dan Pengeluaran Per Kapita (kesejahteraan/daya beli) untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

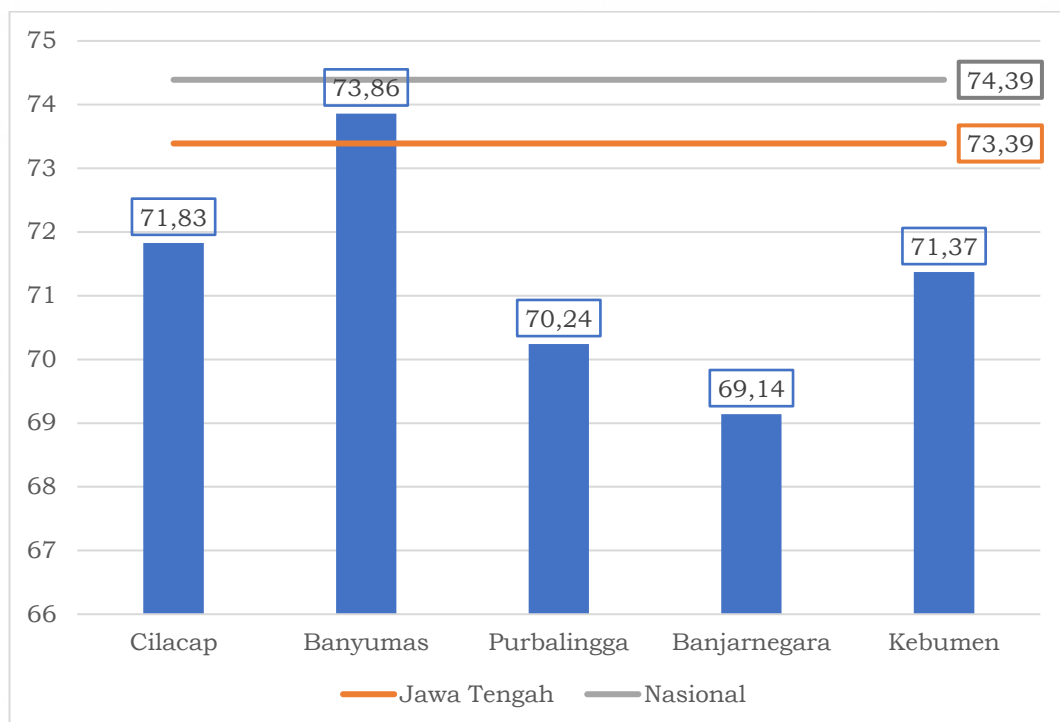
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap tahun 2014-2023 menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun ada penurunan pada tahun 2020. Tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Cilacap sebesar 69,95 meningkat menjadi 70,42 pada tahun 2021 dan terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 72,04. Walaupun capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2014-2023, akan tetapi capaian tersebut masih di bawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2.21.
Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap, Jawa tengah dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, capaiannya masih di bawah Kabupaten Banyumas, namun berada di atas capaian Kabupaten Kebumen dan kabupaten Purbalingga. Selengkapnya terkait perkembangan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga dapat dilihat pada tabel berikut.



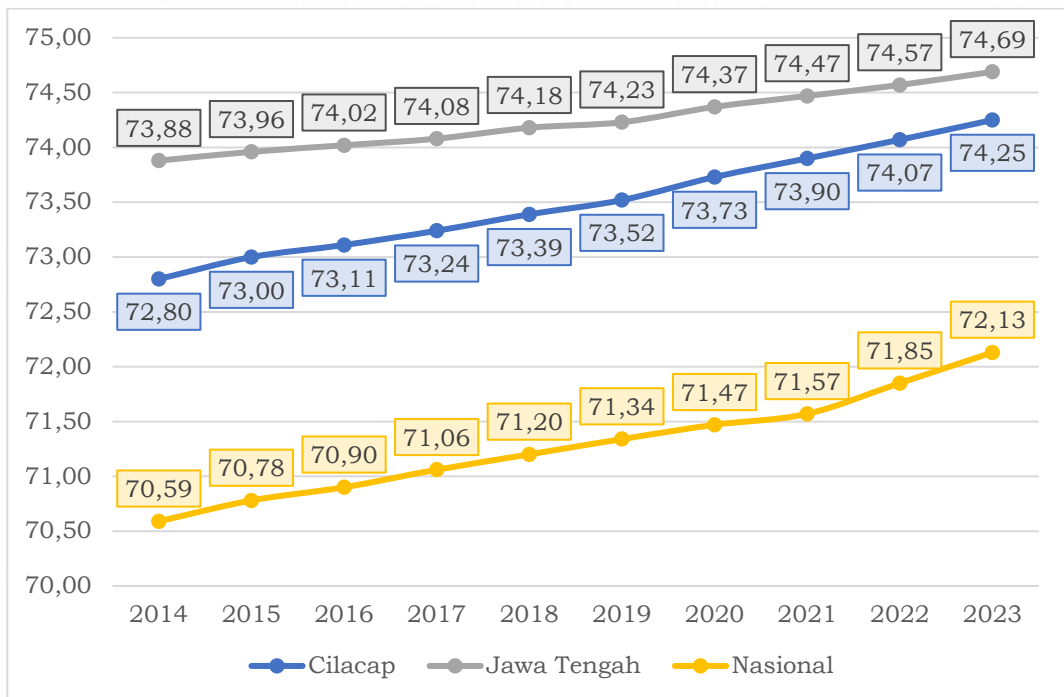
Gambar 2.22.
Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Sementara itu, berdasarkan indeks pembentuk IPM Kabupaten Cilacap meliputi :

Umur Harapan Hidup (UHH)

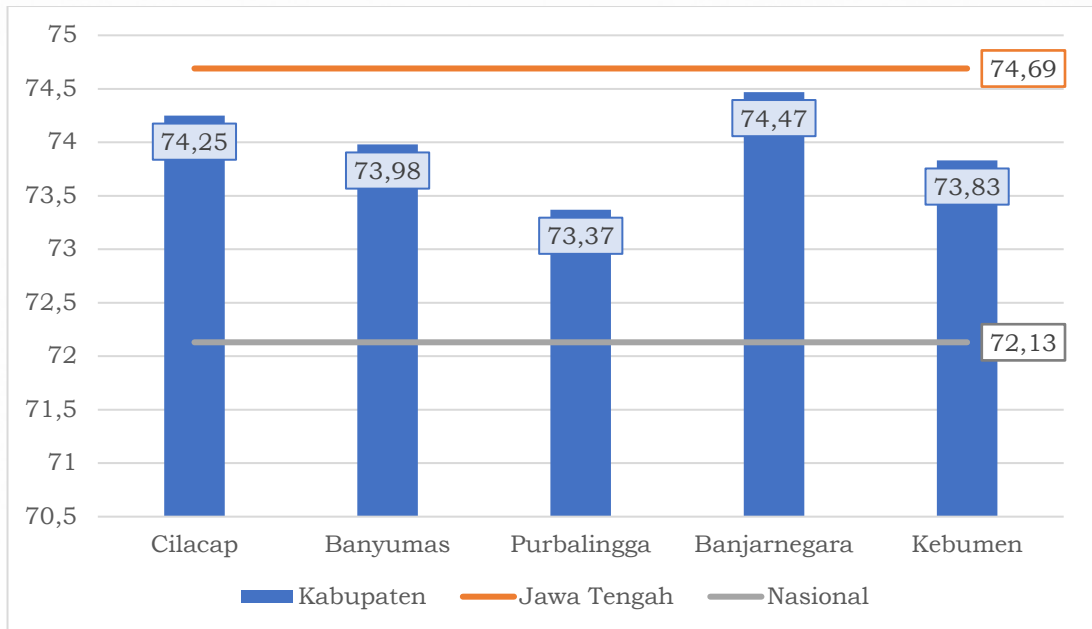
Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Pada tahun 2014 capaian UHH mencapai 72,75 tahun meningkat menjadi 74,73 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode 2014-2023 capaian Kabupaten Cilacap lebih tinggi dibanding capaian Nasional namun masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.23.
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

UHH Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga, capaiannya lebih tinggi di bandingkan Kabupaten Banyumas, Kebumen, dan Purbalingga. Namun, capaian UHH Kabupaten Cilacap tahun 2023 masih berada di bawah Kabupaten Banjarnegara Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

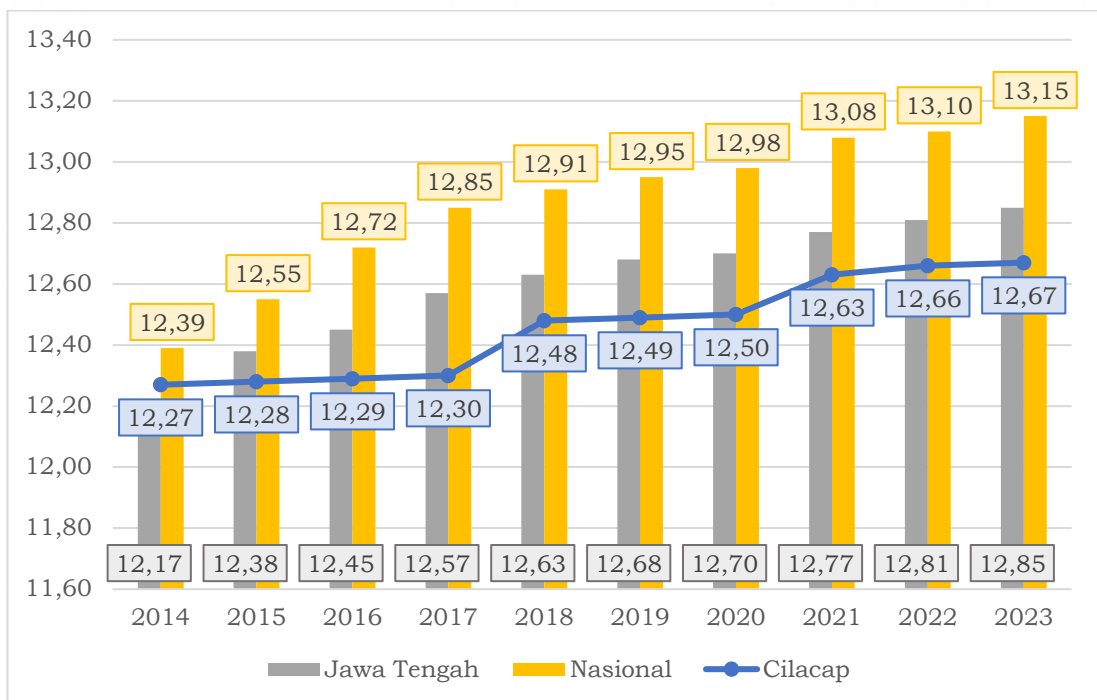


Gambar 2.24.
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS)

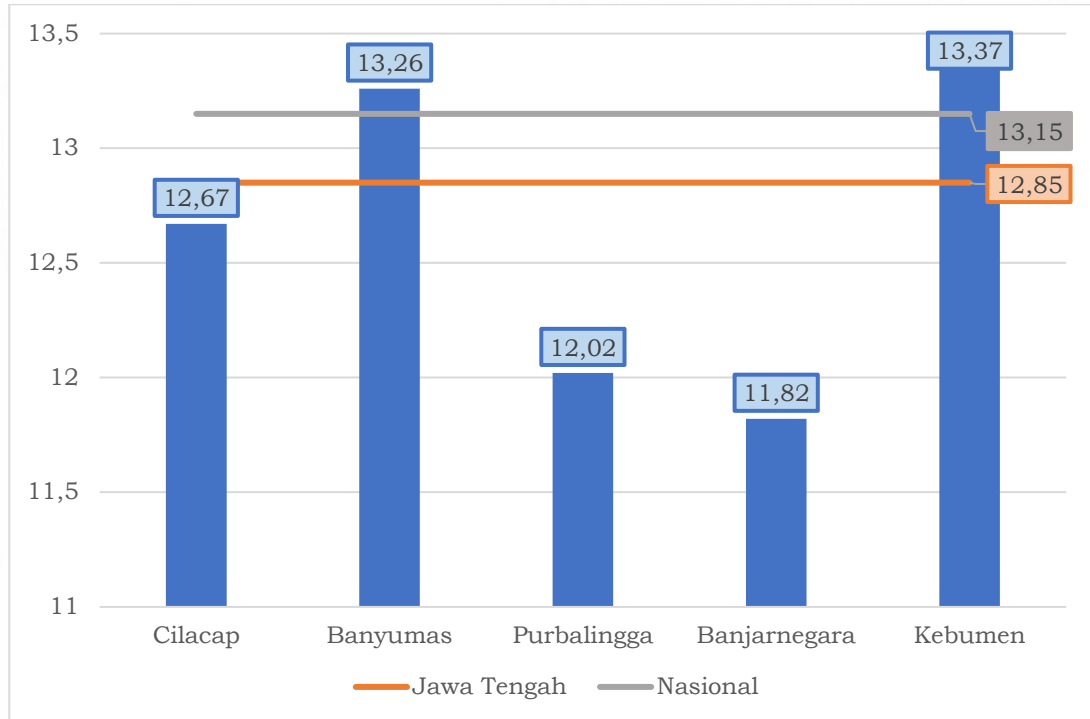
Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2014 harapan lama sekolah mencapai 12,27 tahun meningkat menjadi 12,67 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional capaian harapan lama sekolah Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2.25.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provisi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

HLS Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga berada di bawah capaian Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas serta berada di atas capaian Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



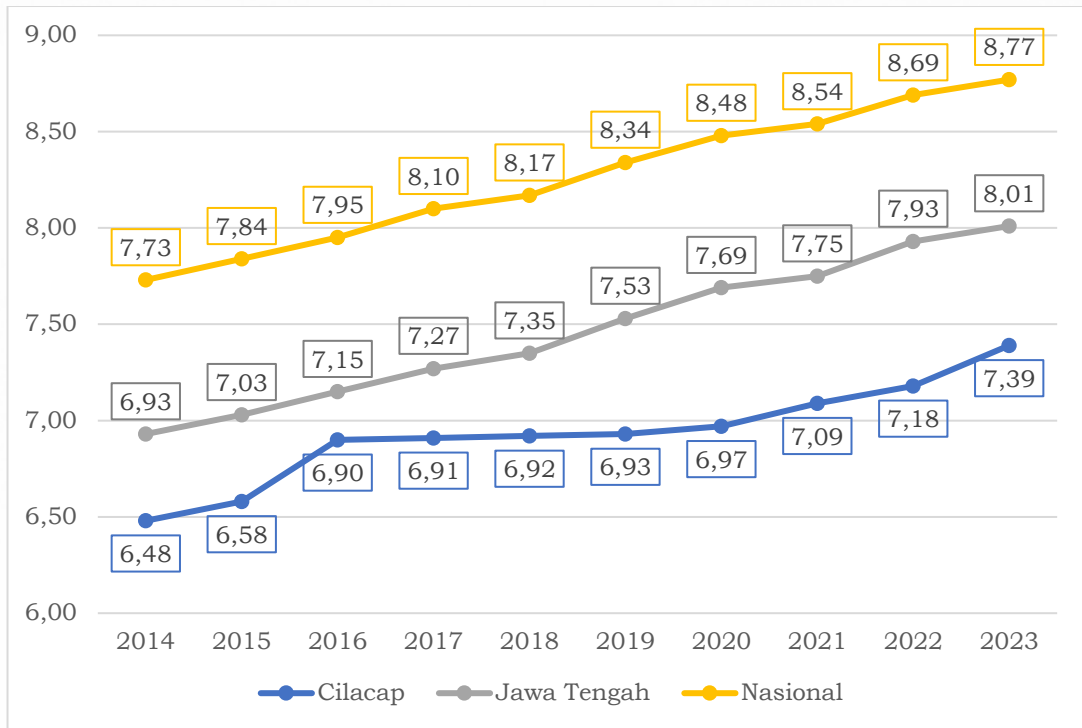
Gambar 2.26.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS Kabupaten Cilacap periode 2014-2023 mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-4 SDG's yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pada tahun 2014 sebesar 6,48 tahun meningkat menjadi 7,39 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian RLS tahun 2014-2023 angka capaian Kabupaten Cilacap masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

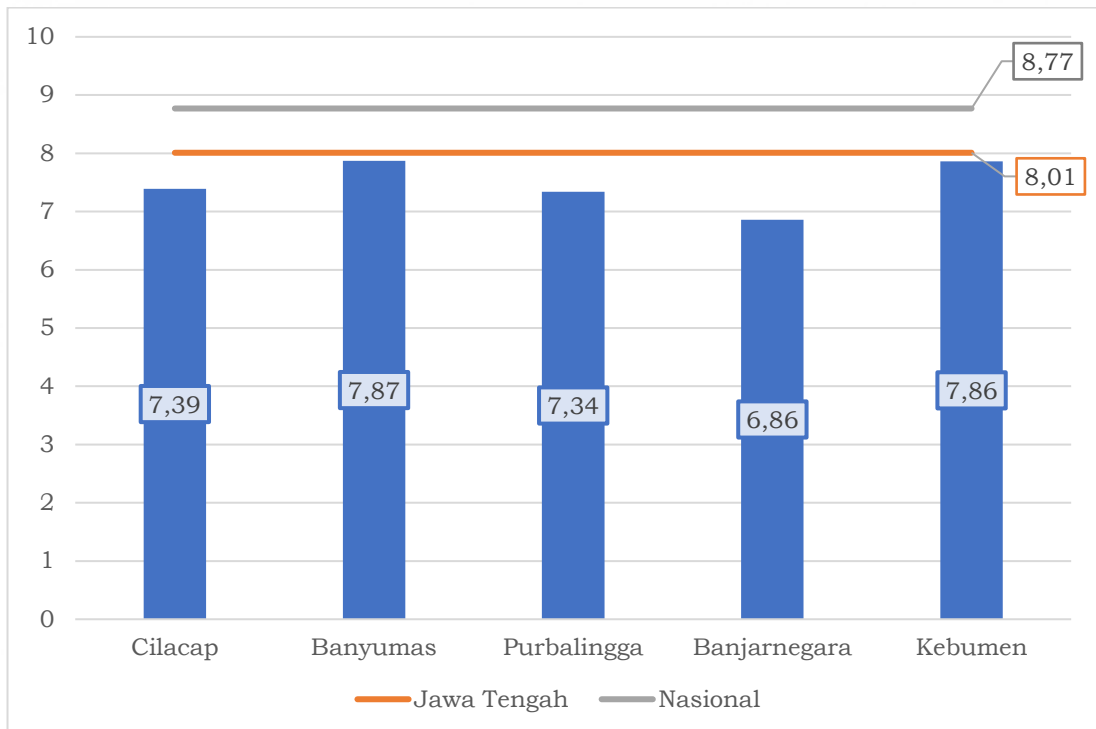


Gambar 2.27.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

RLS Kabupaten Cilacap tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya, masih berada di bawah RLS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen. Selengkapnya RLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten di sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut.



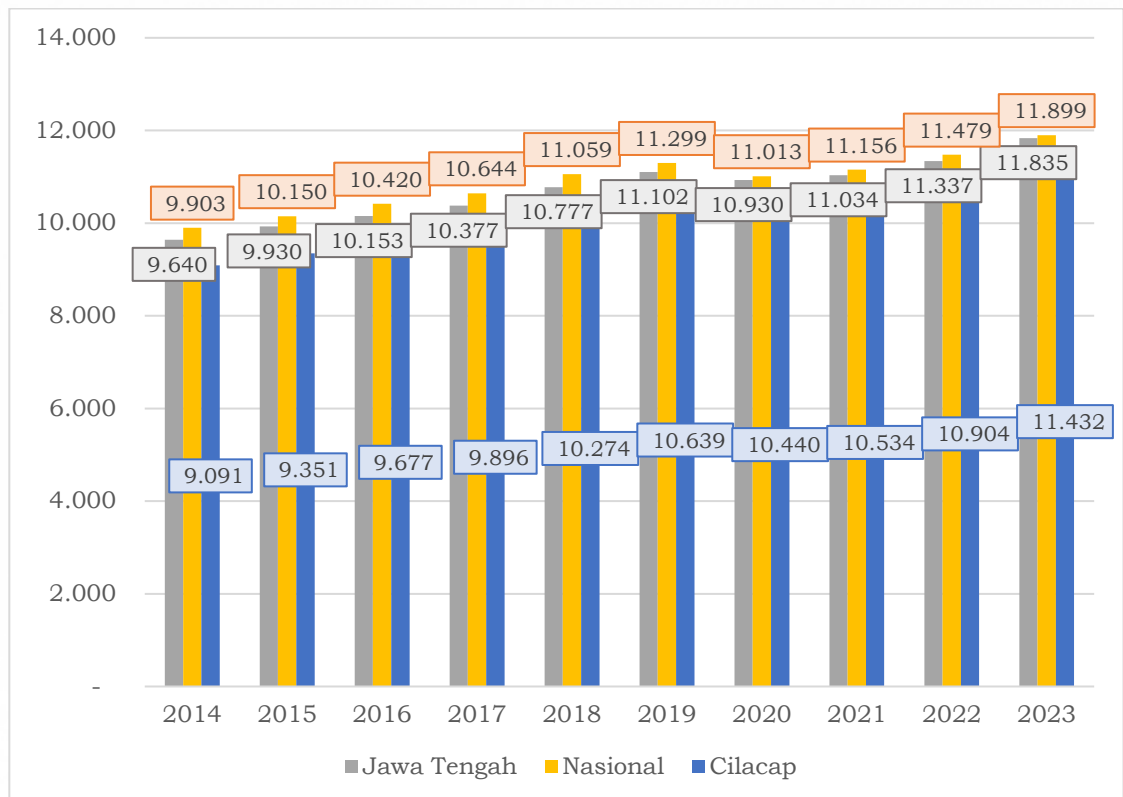
Gambar 2.28.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Pengeluaran Per Kapita

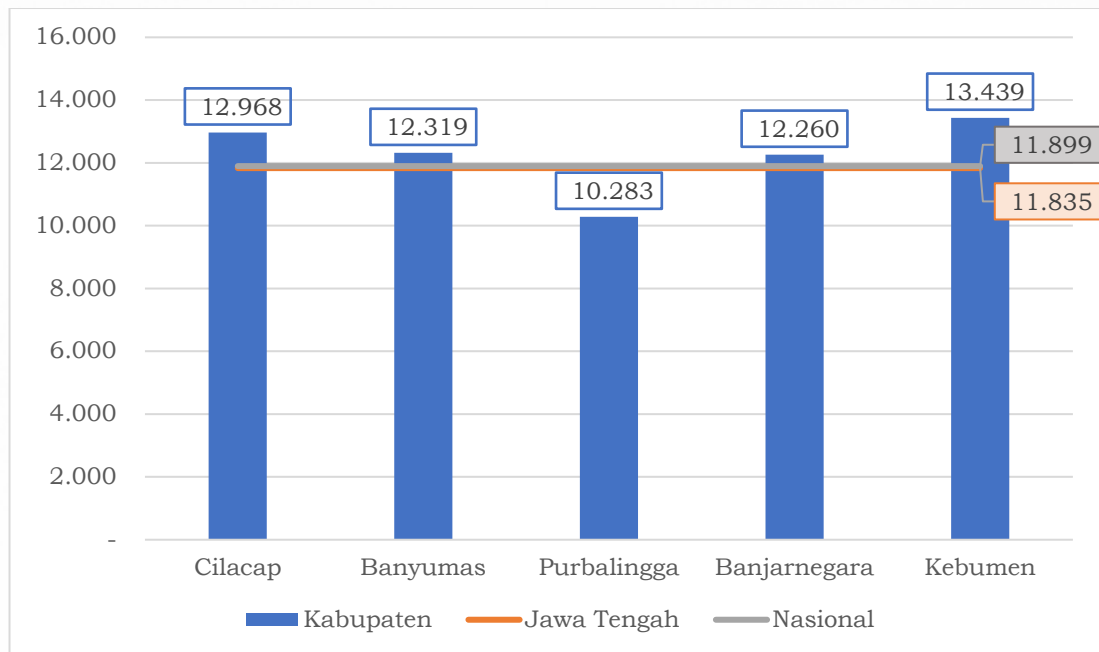
Pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup positif sejak periode 2014-2023, pada tahun 2014 pengeluaran per kapita (per tahun) sebesar Rp 9.091 (ribu) meningkat menjadi Rp 11.432 (ribu) pada tahun 2023 walaupun tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.29.
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2014-2023 (Ribuan Rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga masih berada di bawah capaian Kabupaten Kebumen, dan berada di atas capaian Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.30.
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Pembangunan Kebudayaan

Dalam rangka pemajuan kebudayaan salah satu unsurnya adalah satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian. Indikator ini mencakup satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan/seni budaya di Kabupaten Cilacap tahun 2021 sebesar 96,24%, kemudian meningkat tahun 2022 menjadi 96,58% dan 2023 sebesar 97,09%.

Pemajuan kebudayaan terkait dengan obyek cagar budaya dapat dilihat dari kelestarian cagar budaya. Kondisi ini dilihat dari jumlah bangunan, benda, struktur, situs dan kawasan budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya. Terkait dengan warisan budaya tak benda dapat dilihat dari kelestarian budaya tak benda. Kondisi ini dilihat dari jumlah warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan menjadi budaya daerah. Jumlah kunjungan di tempat/lokasi yang mengandung nilai budaya atau sejarah adalah hal yang penting untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang ingin memahami budaya daerah dan sejarah sebuah wilayah.

Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan, sedangkan definisi/makna dilestarikan mengacu pada UU No. 5 Th. 2017

tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya (CB). Indikator ini menggambarkan sejauhmana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Cilacap beserta nilai pentingnya. Persentase CB dan WBTB di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebesar 26,73%, kemudian meningkat menjadi 27,45% di tahun 2022. Angka tersebut terus meningkat sampai tahun 2023 sebesar 28,85%. Kondisi dapat dilihat bawah cagar budaya dan warisan budaya tak benda masih banyak yang belum dilestarikan.

Jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Cilacap, menggambarkan sejauhmana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Cilacap sebesar 42.449 orang, kemudian meningkat menjadi 46.370 orang di tahun 2023. Jumlah pengunjung ini berdasarkan data dari Musesum Susilo Sudarman dan Benteng Pendem.

Pemajuan kebudayaan terkait dengan obyek cagar budaya dapat dilihat dari persentase kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor. Kelompok kesenian aktif di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebesar 14,76 %, meningkat menjadi 15,10% di tahun 2022 dan 15,63% di tahun 2023.

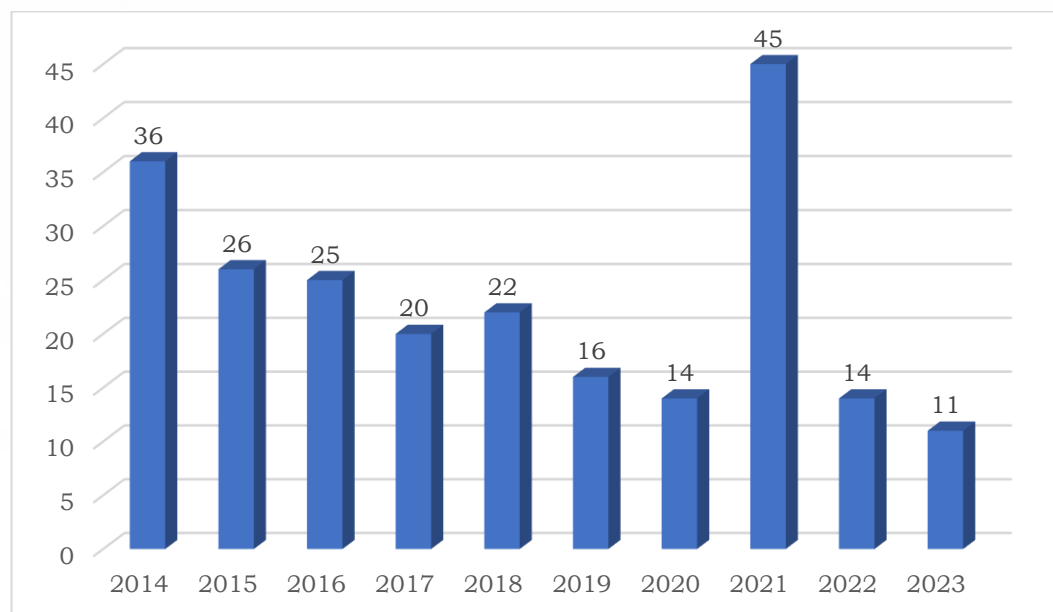
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, kemudian sebagai bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif, sampai kepada usia lanjut. Dengan demikian pembangunan kesehatan juga mempunyai peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Jumlah Kematian Ibu mengukur tentang banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama

kehamilan. Kasus kematian ibu di Kabupaten Cilacap merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan, terutama terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pada tahun 2014 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Cilacap sebanyak 36 kasus kemudian mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir, di mana pada tahun 2023 terdapat 11 kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu tertinggi di tahun 2021 sebanyak 45. Berdasarkan tren data kesehatan, beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian ibu di Cilacap antara lain akses terbatas ke fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, rendahnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan reproduksi, dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Penanganan yang komprehensif dan kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat secara signifikan mengurangi kasus kematian ibu di Kabupaten Cilacap. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Cilacap tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

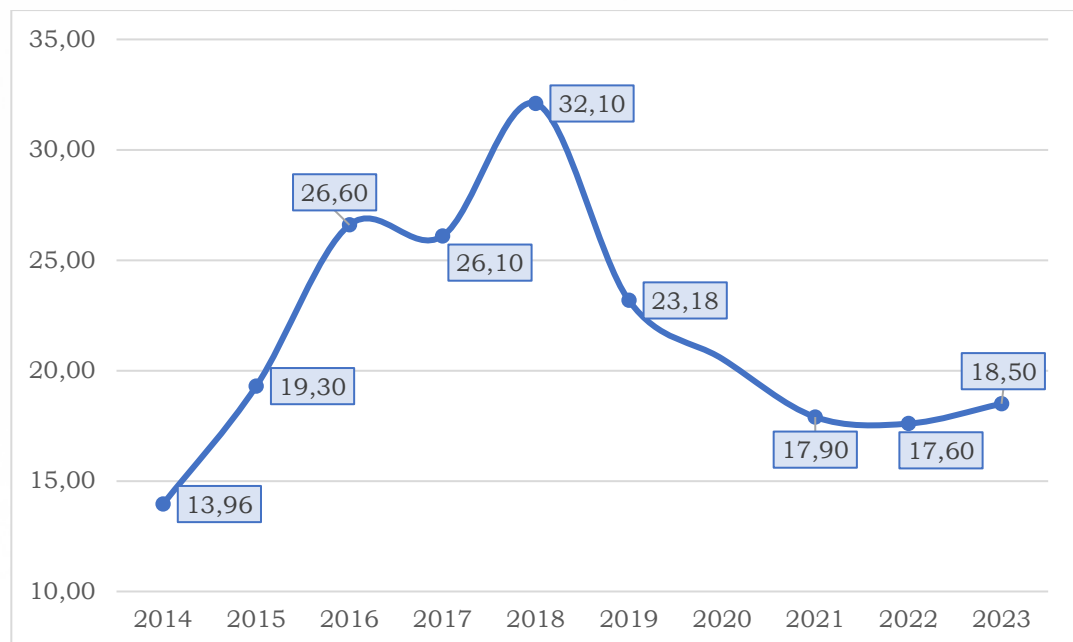


Gambar 2.31.
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Prevalensi stunting di Kabupaten Cilacap mencerminkan masalah gizi kronis yang dialami oleh anak-anak di bawah lima tahun, seringkali terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, ketidakseimbangan pola makan, serta akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi. Perkembangan prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Cilacap berdasarkan data SSGI dan SKI cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Cilacap sebesar 13,96%, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 18,50%.

Peningkatan prevalensi balita stunting disebabkan karena program stunting yang belum terfokus dan belum maksimalnya peran serta lintas program dan lintas sektoral. Penurunan ini disebabkan pula kondisi gizi saat remaja dan ibu hamil KEK di Kabupaten Cilacap cukup tinggi. Dampaknya melahirkan anak stunting pada generasi berikutnya. Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan pada umumnya, yang disebabkan kurangnya asupan gizi pada masa janin/bayi (dalam kandungan) dan saat anak sudah lahir, tetapi anak baru nampak stunting pada usia 2 tahun. Hal ini berdampak adanya gagal tumbuh kembang kognitif berkurang, beresiko sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Berdasarkan indikator Tinggi Badan/Panjang Badan dibandingkan Umur (TB/U, PB/U), dimana TB anak < -3 SD (sangat pendek), dan -3 SD sampai < -2 SD (pendek).



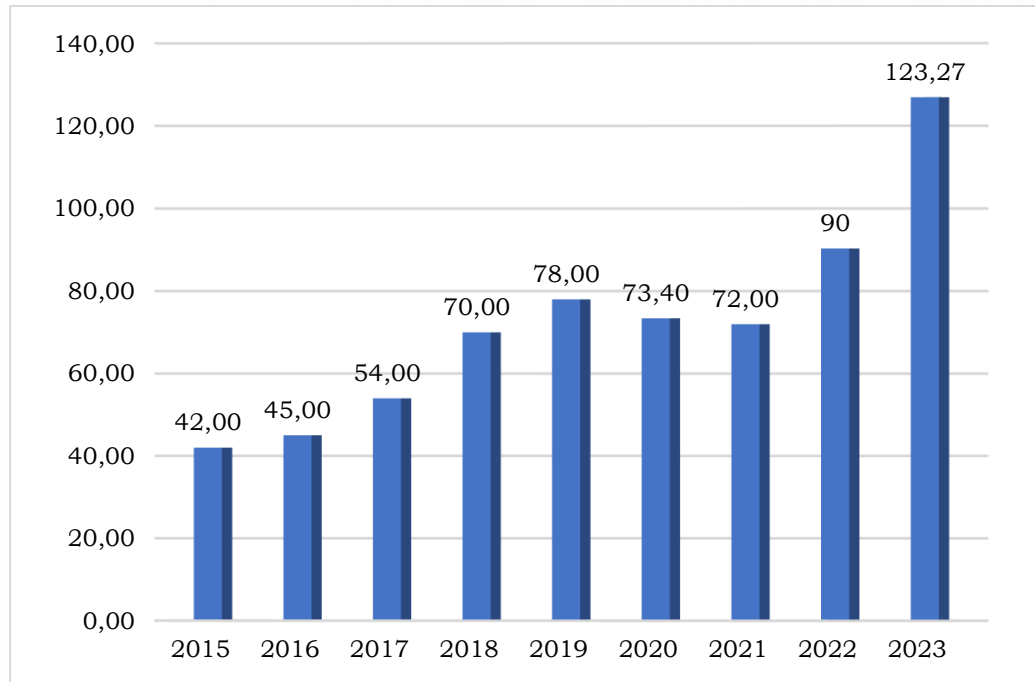
Gambar 2.32.
**Prevalensi Stunting pada balita Kabupaten Cilacap
Tahun 2014-2023**

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis merupakan persentase kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan.

Pada tahun 2015 cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) sebesar 42,0% dan mengalami penurunan menjadi 34,5% di tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 cakupan ini mengalami peningkatan sampai 123,27% dari target sasaran

yang ditetapkan. Selengkapnya terkait perkembangan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut.



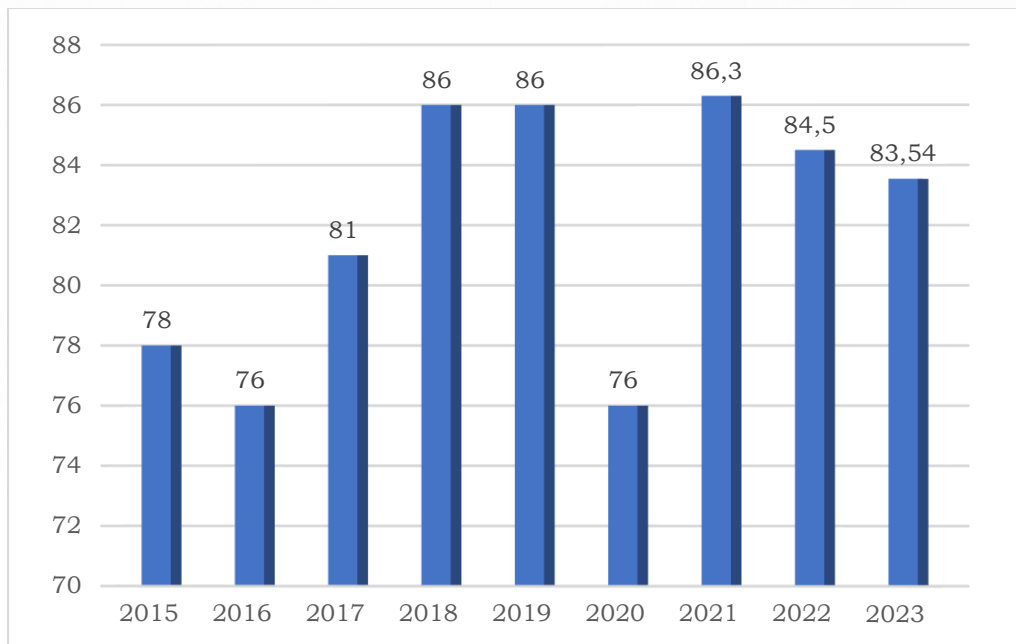
Gambar 2.33.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2023

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) merupakan persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 sebesar 78%, mengalami fluktuatif sampai tahun 2023 menjadi 83,54%. Selengkapnya terkait perkembangan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Cilacap pada tahun 2015-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



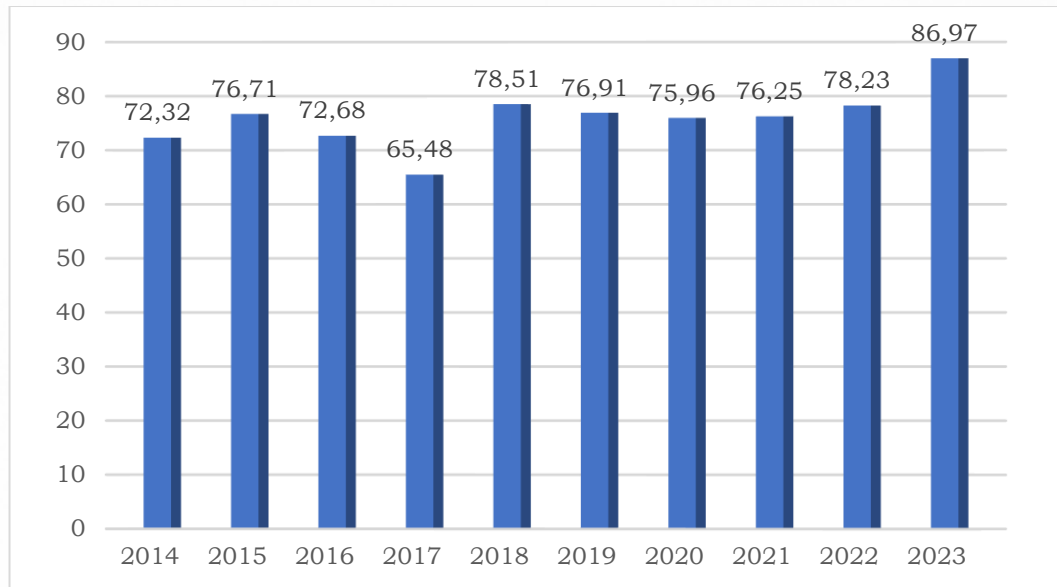
Gambar 2.34.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2023

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Setiap warga Kabupaten Cilacap memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Hal tersebut diwujudkan melalui cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting yaitu Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan; Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas; Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; dan Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 72,34% menjadi 86,97% di tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.35.

**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023**

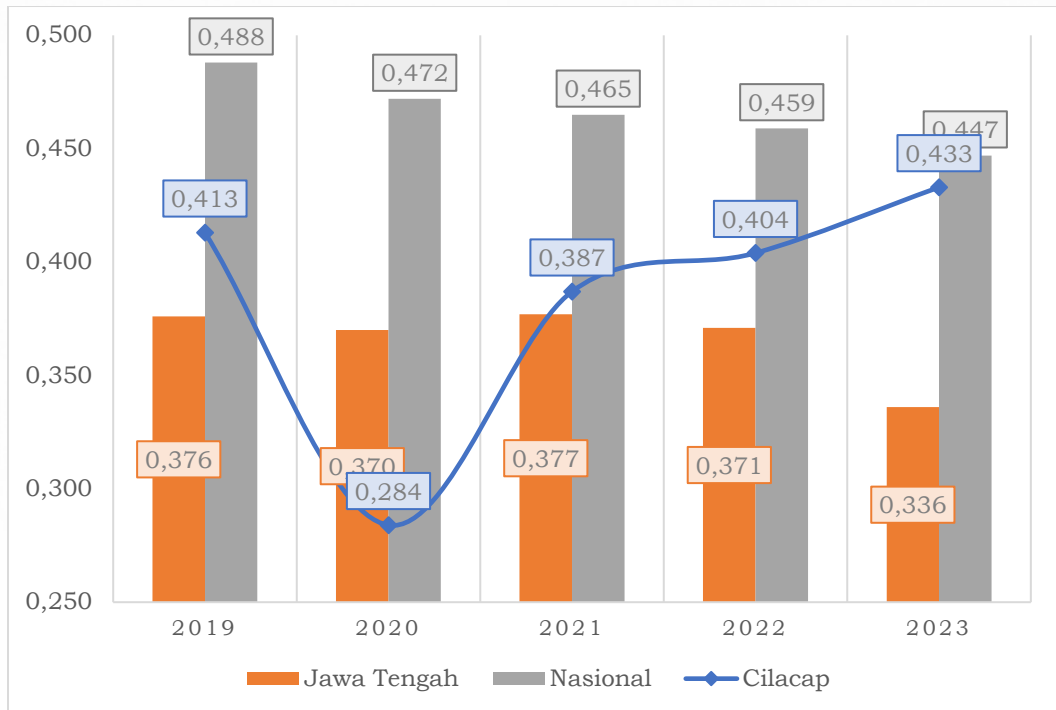
Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Kesejahteraan dan Kesetaraan Gender

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. IBangga Kabupaten Cilacap tahun 2021 sebesar 56,11, meningkat menjadi 56,62 di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 61,00. Angka di tahun 2023 menunjukkan bahwa IBangga masuk dalam kategori yang cukup baik (berkembang).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

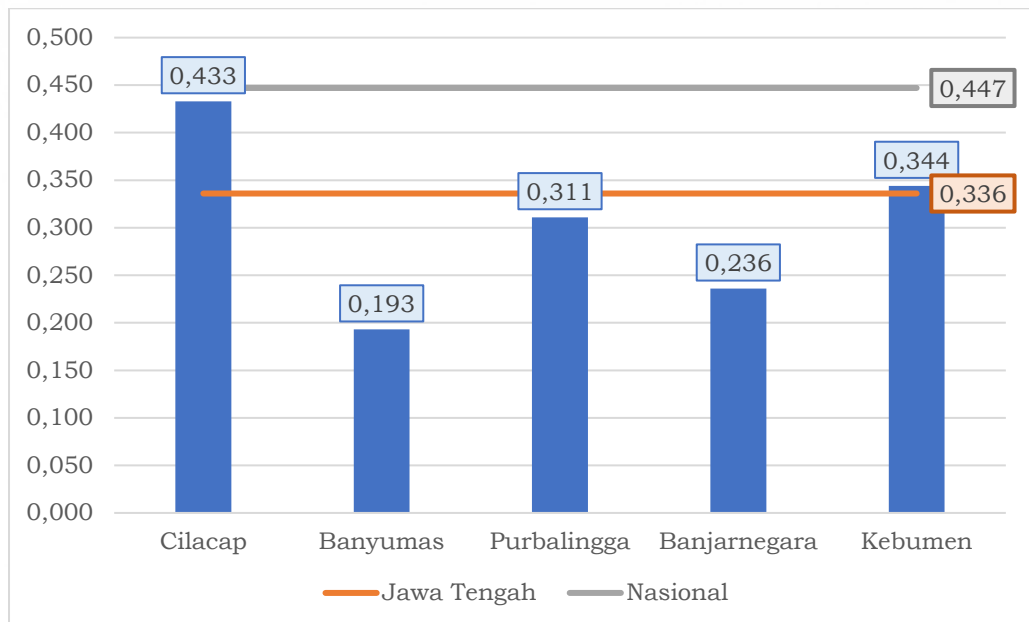
Perkembangan IKG Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023, tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 IKG Kabupaten Cilacap sebesar 0,413 namun meningkat menjadi 0,433 di tahun 2023. Capaian IKG Kabupaten Cilacap masih di bawah nasional dan di atas Jawa Tengah. Penurunan ketimpangan gender harus terus ditekan. Angka tersebut menunjukkan kesetaraan antara pria dan perempuan semakin meningkat di Kabupaten Cilacap. Artinya, ketimpangan gender semakin mengecil. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.36.
Perkembangan IKG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

IKG Kabupaten Cilacap disandingkan dengan Kabupaten tetangga berada di posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Cilacap lebih tinggi daripada di Kabupaten lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

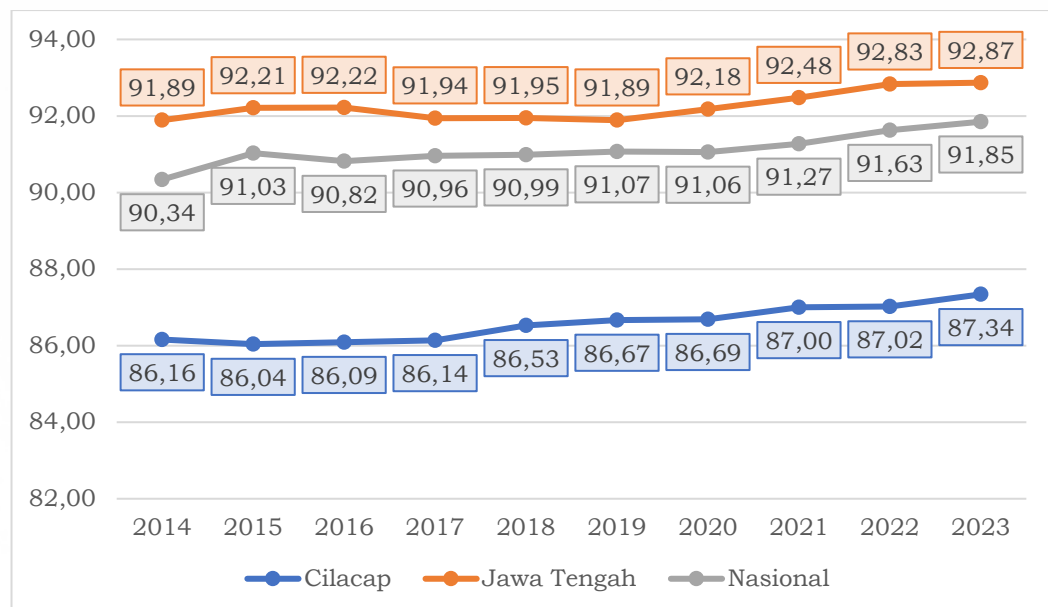


Gambar 2.37.
Perkembangan IKG Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan indikator IPM yang dipilah

laki-laki dan perempuan, hal ini penting untuk mengetahui ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk menggambarkan ketimpangan gender diketahui dari skor nilai IPG dengan nilai 100. Nilai IPG semakin dekat dengan nilai 100 maka ketimpangan gender semakin rendah dan semakin rendah nilai maka ketimpangan gender semakin tinggi, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan sumbangan ekonomi rumah tangga (ribu rupiah) dari laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2014-2023 mengalami tren positif. Angka IPG Kabupaten Cilacap dari tahun 2014 sebesar 86,16, meningkat menjadi 87,34 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata IPG Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPG Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Capaian IPG Kabupaten Cilacap sesuai dengan tujuan ke-5 SDG's yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.



Gambar 2.38.
Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19. Pada tahun 2014 PDRB ADHB dengan migas sebesar 92.025.901,06 juta rupiah menjadi 132.425.323,93 juta rupiah di tahun 2023. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tanpa migas Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB ADHB tanpa migas sebesar 44.419.642,04 juta rupiah menjadi 85.078.735,21 juta rupiah di tahun 2023.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan migas Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19. Pada tahun 2014 PDRB ADHK dengan migas sebesar 83.391.500,18 juta rupiah menjadi 101.839.740,58 juta rupiah di tahun 2023. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tanpa migas Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB ADHK tanpa migas sebesar 36.693.888,99 juta rupiah menjadi 54.182.307,44 rupiah di tahun 2023. Selengkapannya terkait PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

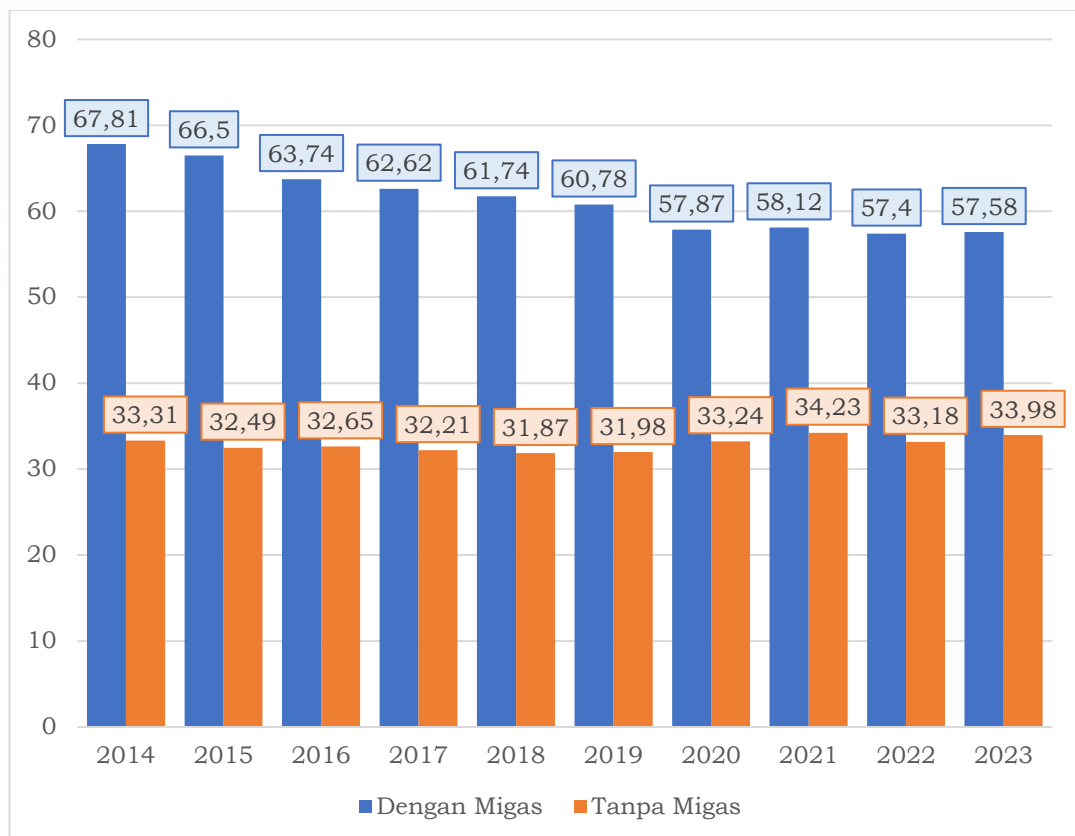
Tabel 2.4.
PDRB Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha ADHB & ADHK
Tahun 2014-2023

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)		PDRB ADHK (Juta Rupiah)	
	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas
2014	44.419.642,04	92.025.901,06	36.693.888,99	83.391.500,18
2015	49.064.608,88	98.876.586,98	38.729.569,62	88.357.606,68
2016	53.316.051,80	99.033.565,66	40.699.392,43	92.858.649,84
2017	57.306.466,79	103.921.776,03	42.868.159,81	95.254.586,70
2018	61.604.061,56	109.699.658,75	45.073.045,02	98.100.568,17
2019	65.800.554,10	114.117.079,76	47.492.685,18	100.327.298,90
2020	65.973.102,97	104.542.659,55	46.849.019,44	90.011.584,10
2021	69.826.768,71	109.653.598,17	48.435.235,13	91.944.587,54
2022	77.148.500,48	121.021.797,78	51.231.896,33	96.677.843,01
2023	85.078.735,21	132.425.323,93	54.182.307,44	101.839.740,58

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014 kontribusi sektor industri pengolahan tanpa migas sebesar 33,31%, sedangkan pada tahun 2023 hanya sebesar 33,98%. PDRB dengan migas pada tahun 2014 sebesar 67,81%, kemudian mengalami fluktuatif menjadi 57,58% di tahun 2023. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Selengkapnya terkait perkembangan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Cilacap tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.39.
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2014-2023

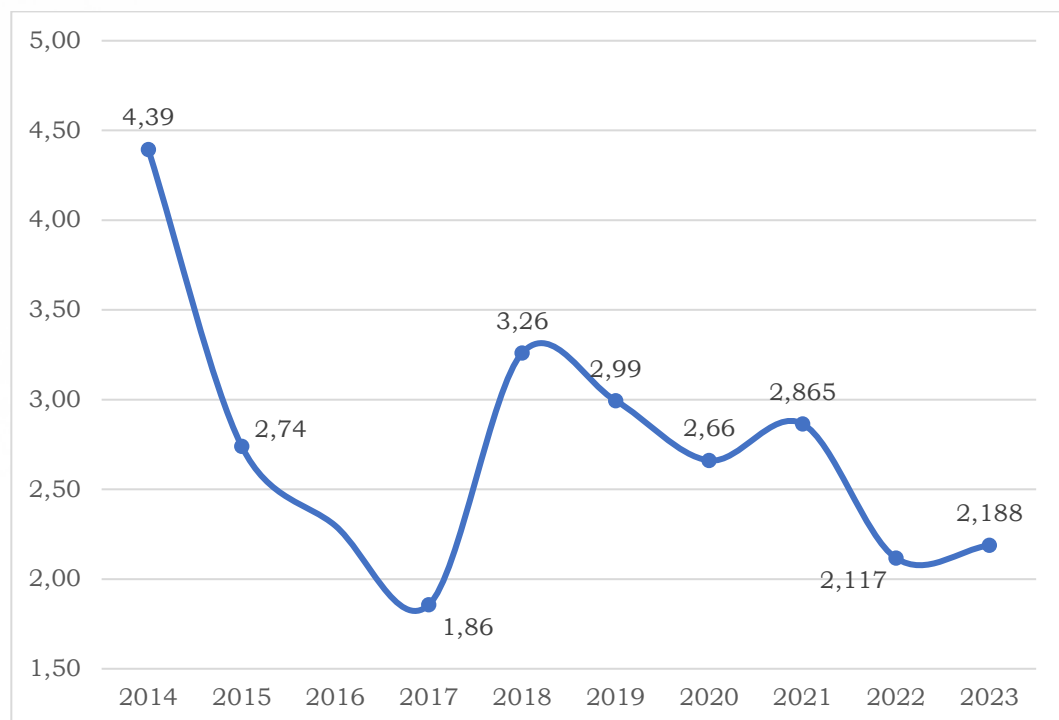
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Investasi Ekonomi

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha

dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Cilacap 4,39%, kemudian mengalami fluktuatif sampai di tahun 2023 menjadi 2,188%. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.40.

Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Cilacap terus meningkat dalam kurun waktu tiga taun terakhir. Pada tahun 2021 rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 0,30%, kemudian meningkat menjadi

0,41% di tahun 2022. Peningkatan cukup tinggi terjadi di tahun 2023 yaitu 1,70%. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Kabupaten Cilacap.

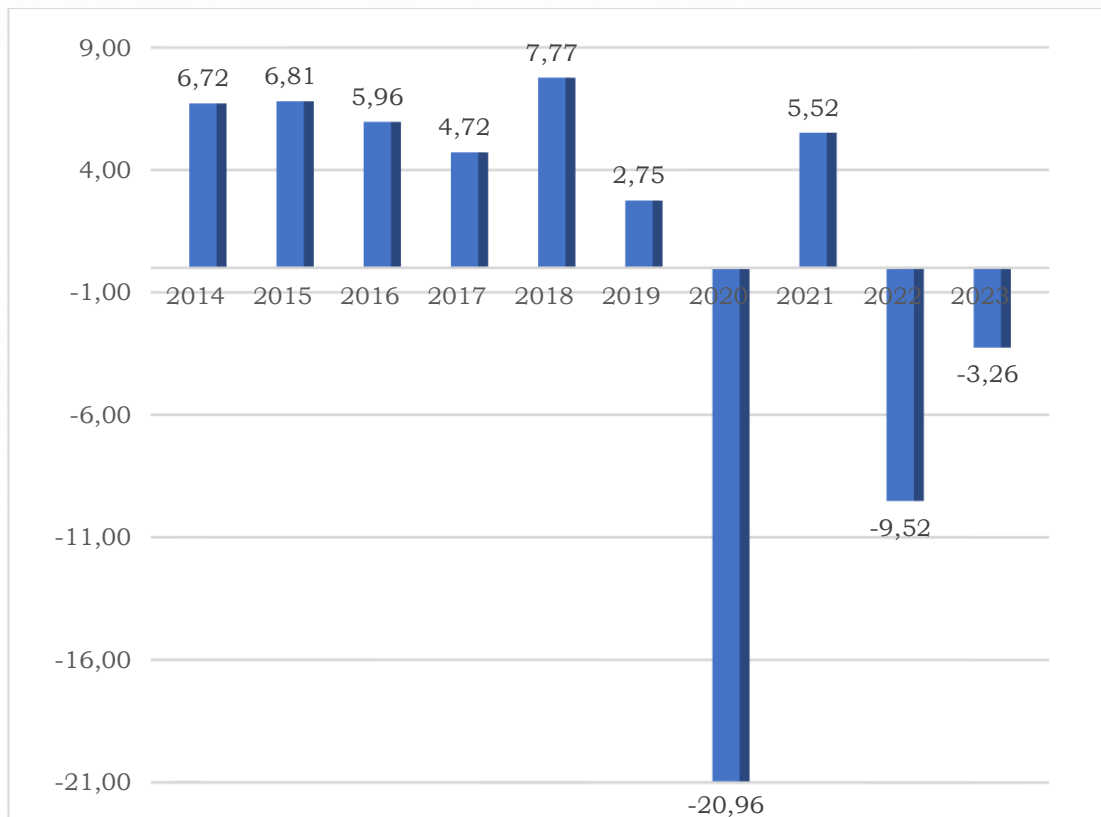
Tabel 2.5.
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Volume Koperasi (Juta Rupiah)	Rasio Volume Koperasi/PDRB (%)
2021	109.653.598.170.000	329.459.699.764	0,30
2022	121.021.797.780.000	492.414.043.073	0,41
2023	132.425.323.930.000	224.888.099.264	0,17

Sumber : DPKUKM Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2023 cenderung menunjukkan fluktuatif. *Return On Asset (ROA)* BUMD di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 sebesar 6,72% kemudian mengalami penurunan menjadi -3,26% di tahun 2023. Nilai RoA terendah ada di tahun 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19. Semakin tinggi tingkat ROA BUMD, maka dapat diketahui tingkat produktivitas juga semakin tinggi. Selengkapanya terkait perkembangan *Return On Asset (ROA)* BUMD di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.41.

Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : Bagian perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah. Terdapat 13 Komoditas Barang Pokok, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.

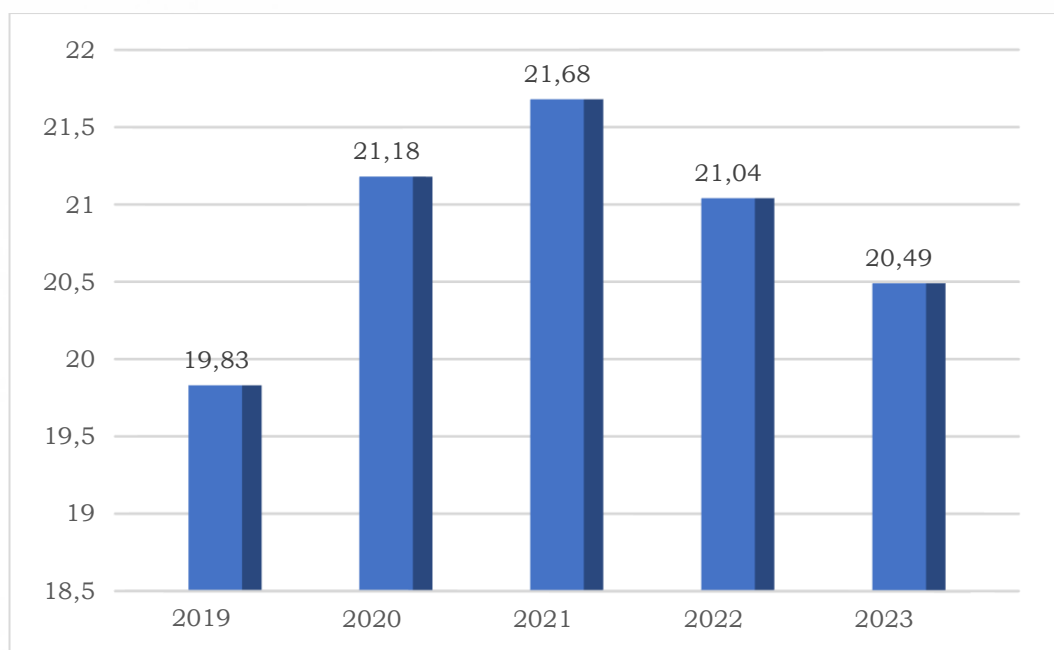
Disparitas Harga di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beras Medium	- 7,9	- 5,8	- 9,5	- 5,6	- 2,4
2	Gula Pasir	1,2	0,3	2,9	1,2	2,0
3	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	1,7	- 4,2	1,8	1,1	- 2,9
4	Daging Sapi Paha Belakang	- 0,3	- 2,3	8,7	0,4	- 3,0
5	Daging Ayam Ras	- 4,5	- 3,8	- 1,1	2,4	- 4,0
6	Telur Ayam Ras	- 0,3	0,8	- 1,6	1,7	- 2,3
7	Tepung Terigu	na	na	na	na	na
8	Kedelai Impor	- 6,8	0,2	0,4	- 0,3	4,7
9	Cabe Merah Keriting	- 4,1	2,5	- 10,2	- 3,3	1,4
10	Cabe Rawit Merah	- 10,9	- 3,9	- 17,7	- 5,6	- 4,0
11	Bawang Merah	- 5,5	- 9,4	- 7,7	- 5,9	- 3,4
12	Bawang Putih Kating	- 5,6	- 3,0	- 4,0	- 4,1	0,5
13	Ikan Kembung	na	na	na	na	na

Sumber : DPKUKM Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Cilacap sebesar 19,83%, mengalami fluktuatif sampai tahun 2023 menjadi 20,49%. Selengkapnya terkait perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.42.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Rasio Pajak Kabupaten Cilacap terhadap PDRB dalam kurun waktu 2016-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rasio

pajak terhadap PDRB sebesar 0,14%, kemudian meningkat menjadi 0,22% di tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

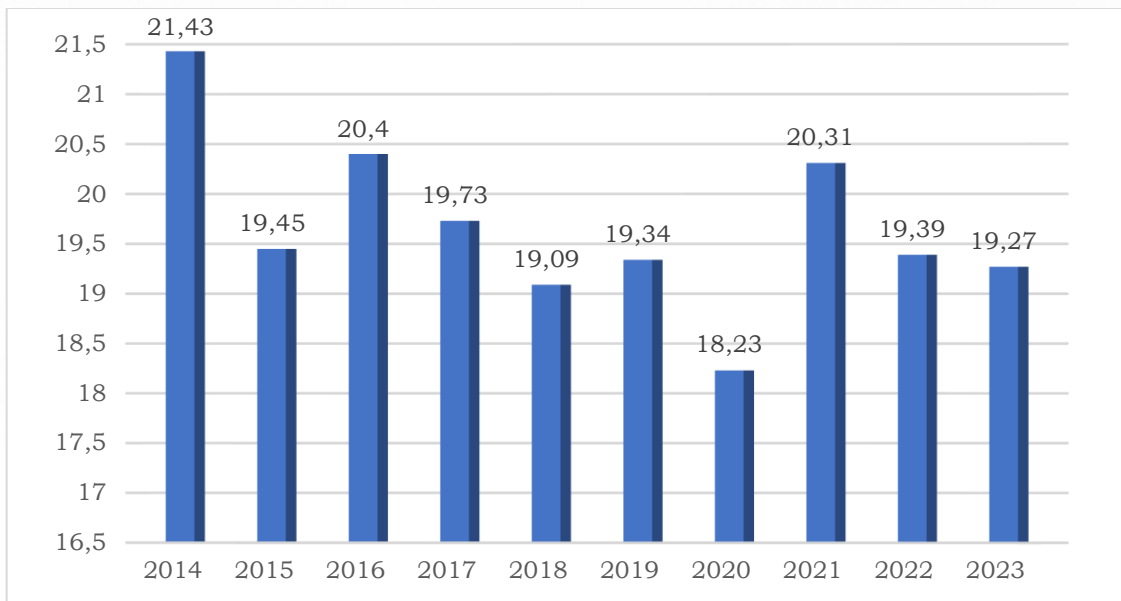
Tabel 2.7.
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap
Tahun 2016-2023

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Pajak Daerah (Juta Rupiah)	Rasio Pajak/PDRB (%)
2016	99.033.565.660.000	137.808.910.786	0,14
2017	103.921.776.030.000	156.393.830.406	0,15
2018	109.699.658.750.000	185.943.092.741	0,17
2019	114.117.079.760.000	209.475.848.896	0,18
2020	104.542.659.550.000	203.188.563.271	0,19
2021	109.653.598.170.000	221.377.109.179	0,20
2022	121.021.797.780.000	280.277.331.102	0,23
2023	132.425.323.930.000	296.270.228.744	0,22

Sumber : BAPENDA Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% bawah) di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2014 distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank dunia sebesar 21,34%, mengalami fluktuatif selama 10 tahun terakhir hingga mencapai 19,27% di tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.43.

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% bawah) di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB, menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Total dana pihak ketiga terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 10 tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 1,01%, kemudian mengalami fluktuatif sampai tahun 2023 kembali menjadi 1,01%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.

Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 (%)

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Dana Pihak Ketiga (Juta Rupiah)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
2014	92.025.901.060.000	928.037.702.270,00	1,01
2015	98.876.586.980.000	974.442.338.140,00	0,99
2016	99.033.565.660.000	938.099.174.264,00	0,95
2017	103.921.776.030.000	1.117.836.604.149,00	1,08
2018	109.699.658.750.000	1.382.396.901.576,00	1,26
2019	114.117.079.760.000	1.747.347.747.391,00	1,53
2020	104.542.659.550.000	1.706.356.231.088,00	1,63
2021	109.653.598.170.000	1.591.309.538.870,00	1,45
2022	121.021.797.780.000	1.565.382.063.127,00	1,29
2023	132.425.323.930.000	1.340.052.371.686,00	1,01

Sumber : BPD, BPR BKK Kabupaten Cilacap Tahun 2024

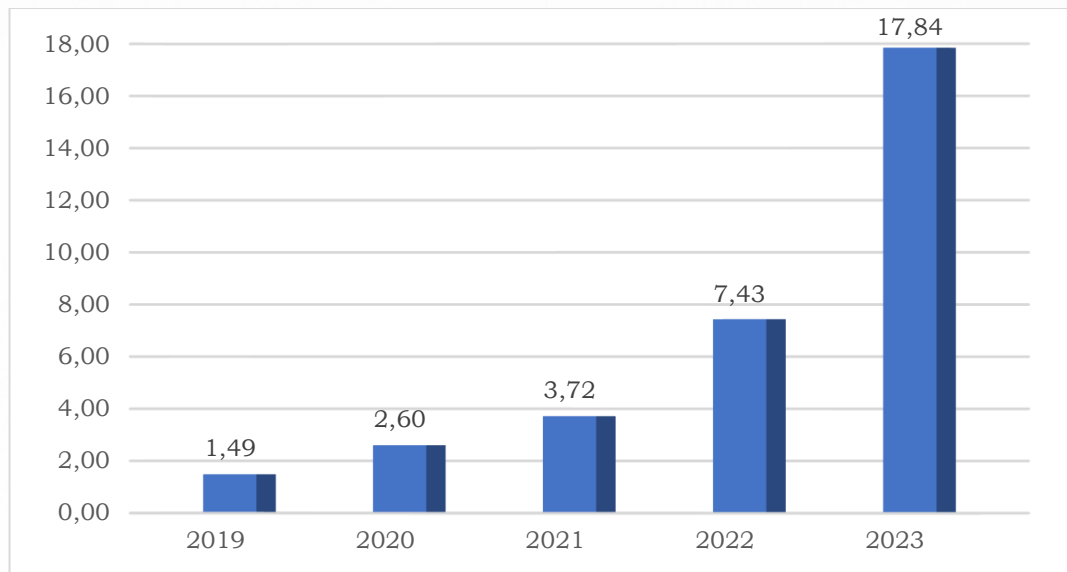
Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Total kredit terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 10 tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 0,45%, kemudian mengalami fluktuatif sampai tahun 2023 menjadi 0,58%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Cilacap
Tahun 2014-2023 (%)

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Total Kredit (Juta Rupiah)	Total Kredit/PDRB (%)
2014	92.025.901.060.000	415.779.093.757,00	0,45
2015	98.876.586.980.000	466.041.658.898,00	0,47
2016	99.033.565.660.000	525.909.629.607,00	0,53
2017	103.921.776.030.000	638.271.602.019,00	0,61
2018	109.699.658.750.000	688.008.129.399,00	0,63
2019	114.117.079.760.000	756.550.647.922,00	0,66
2020	104.542.659.550.000	753.917.894.310,00	0,72
2021	109.653.598.170.000	777.545.663.344,00	0,71
2022	121.021.797.780.000	634.317.150.000,00	0,52
2023	132.425.323.930.000	770.903.035.668,00	0,58

Sumber : BPD, BPR BKK Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Persentase desa mandiri di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 1,49% yang terdiri dari 4 desa mandiri, kemudian terus meningkat menjadi 17,84% di tahun 2023 dengan jumlah desa mandiri 48 desa. Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya. Selengkapnya terkait perkembangan persentase desa mandiri di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.44.

Persentase Desa Mandiri Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

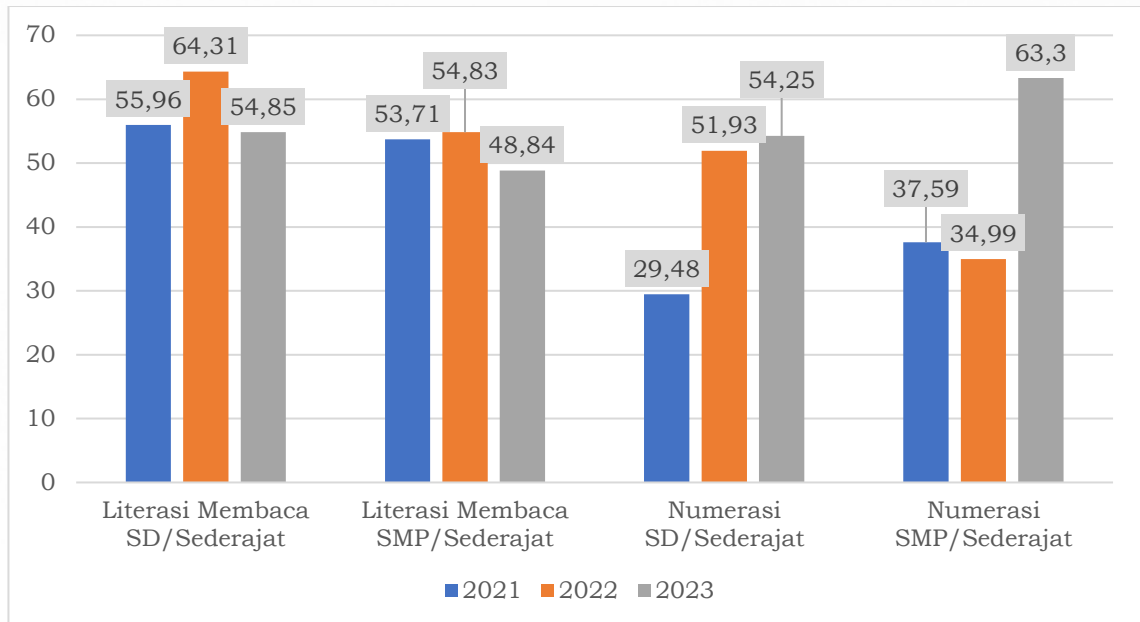
Sumber : Dispermades Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan kluster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Pada tahun 2022 kapabilitas inovasi di Kabupaten Cilacap sebesar 2%, sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 1,97%.

2.3.2. Daya Saing SDM

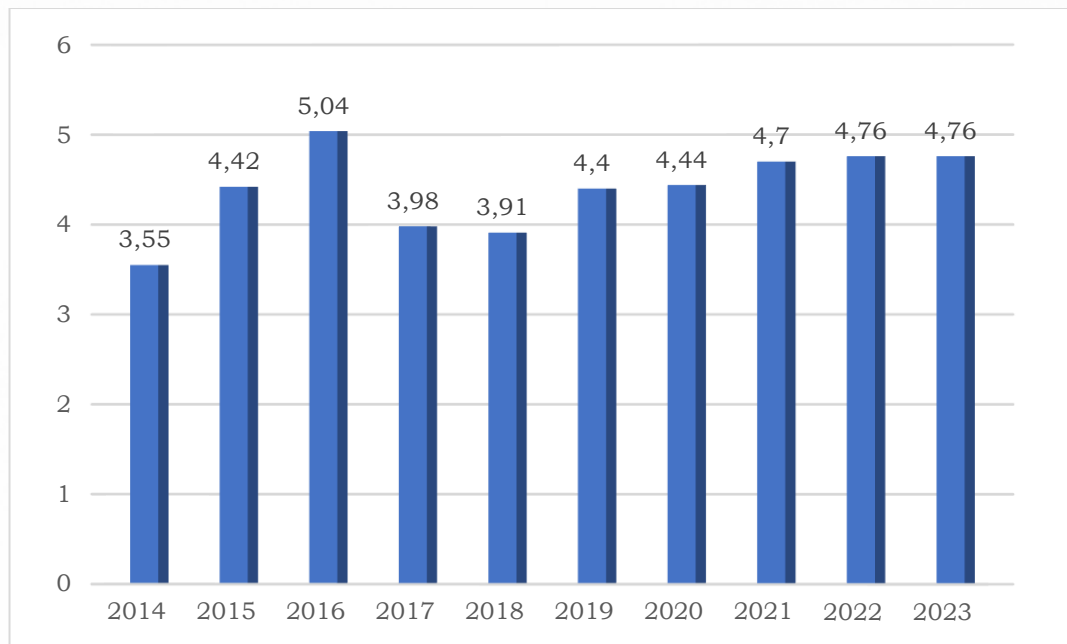
Sumber daya manusia yang berdaya saing dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang diukur salah satunya dengan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional Literasi Membaca. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.



Gambar 2.45.
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

Sumber : Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2014 sebanyak 3,55% penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, kemudian meningkat menjadi 4,76% di tahun 2023. Walaupun hanya menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan namun ini merupakan hal yang positif karena tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Selengkapnya terkait perkembangan proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

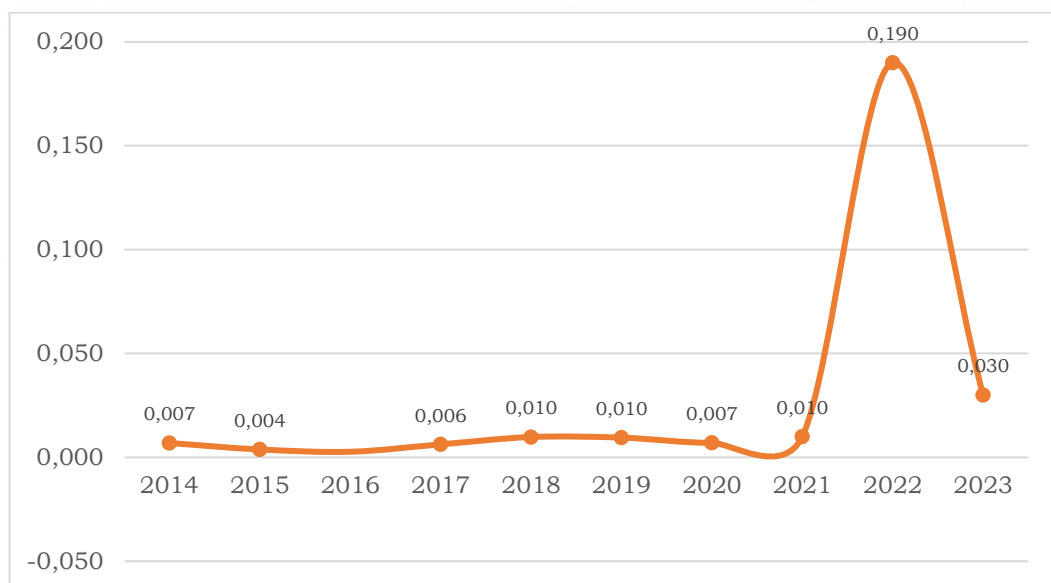


Gambar 2.46.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Pemanfaatan taman baca ini dapat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kegiatan untuk menunjang budaya literasi. Tingkat pemanfaatan perpustakaan baik secara *online* maupun *offline* masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2014 tingkat pemanfaatan perpustakaan hanya sebesar 0,007%, kemudian meningkat menjadi 0,030% di tahun 2023. Tingkat pemanfaatan perpustakaan tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 0,190%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.47.

Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

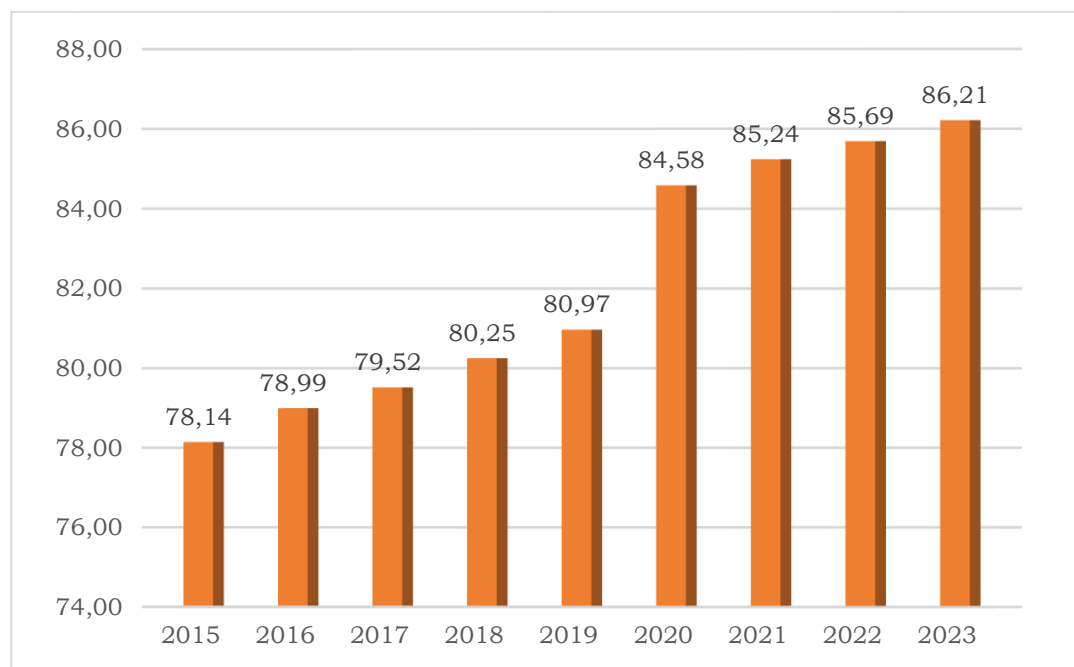
Sumber : Dinas Arpus Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun merupakan cakupan penduduk usia 5-6 th yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 sebesar 62,58%, namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 menjadi 47,09% di tahun 2019 dan 52,58% di tahun 2020 namun di tahun 2023, angka partisipasi sekolah 5-6 tahun kembali meningkat menjadi 61,81%.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Fasilitas Perumahan dan Permukiman

Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Cilacap dari sektor perumahan. Rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2023 terus meningkat. Pada tahun 2014 rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Cilacap sebesar 78,14% terus meningkat menjadi 86,21% pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

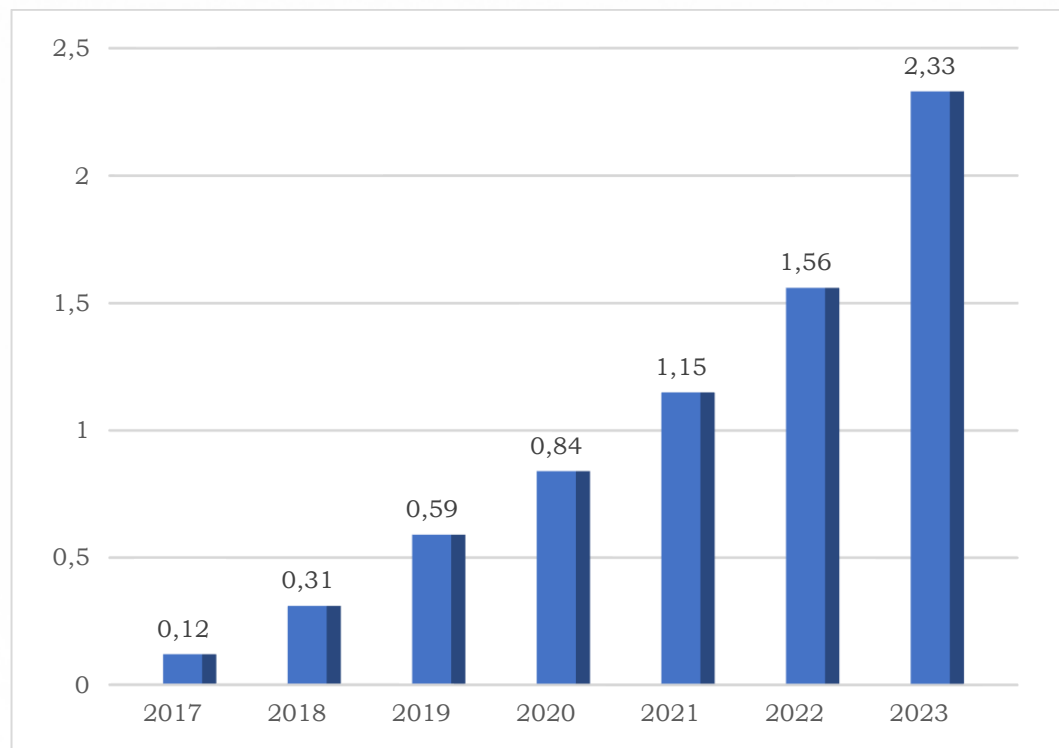


Gambar 2.48.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2023 (%)

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap, Tahun 2024

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan

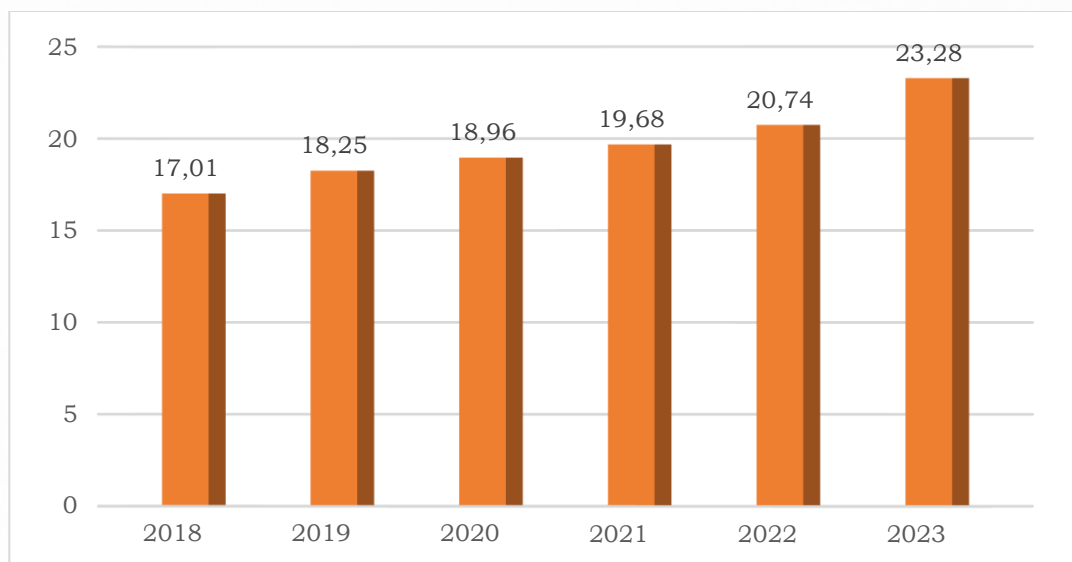
leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumah tangga di Kabupaten Cilacap dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2017 sebesar 0,12%, terus mengalami peningkatan menjadi 2,33% di tahun 2023. Selengkapnya terkait perkembangan rumah tangga akses sanitasi aman di Kabupaten Cilacap tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.49.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2023

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaian yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaian; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Sampai dengan tahun 2023 akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaian tahun sebesar 23,28%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Cilacap memiliki akses air minum sebagian besar non perpipaian.

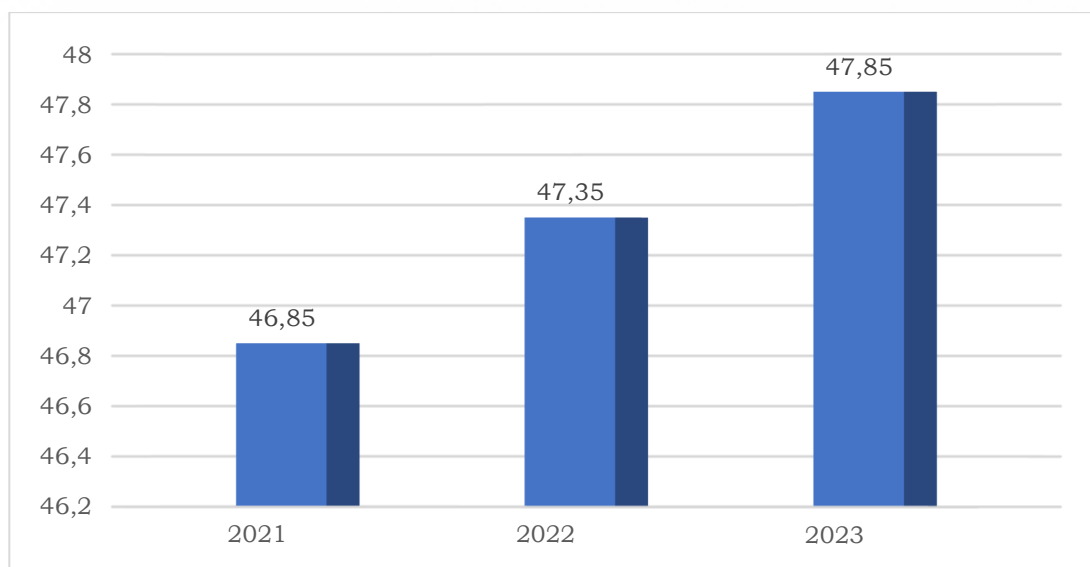


Gambar 2.50.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Indikator ini mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2021-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Cilacap mencapai angka 46,85, kemudian terus mengalami kenaikan sampai 47,85 di tahun 2023. Selengkapnya terkait Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Cilacap tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



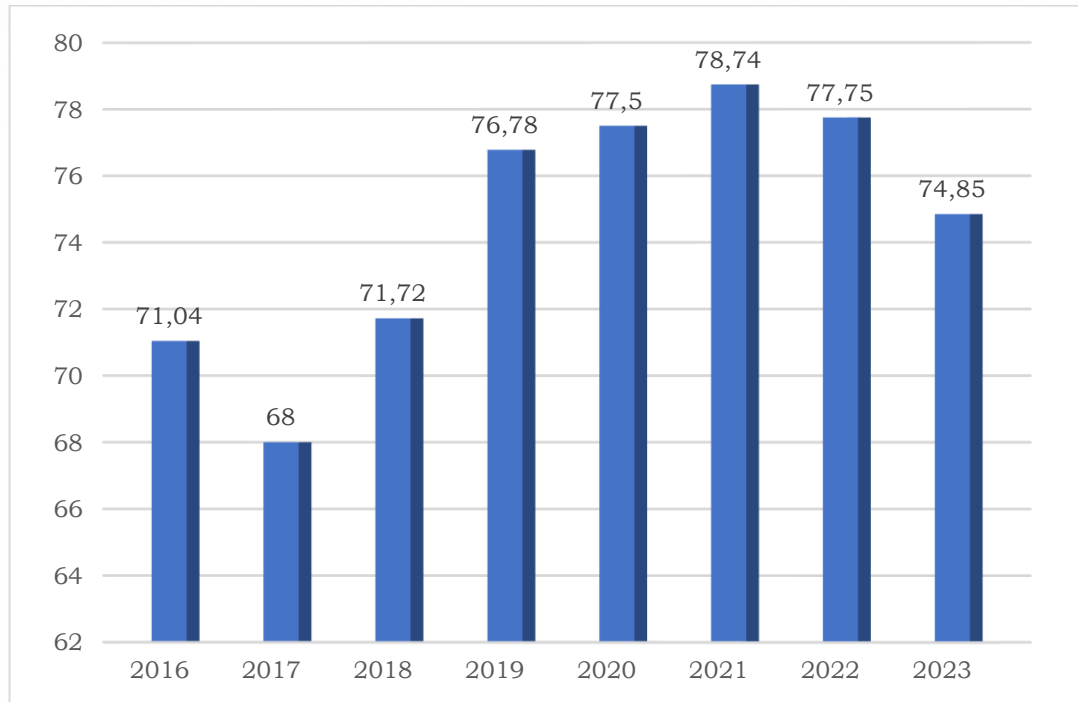
Gambar 2.51.

Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Fasilitas Transportasi

Jalan dengan kondisi mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 sebesar 71,04%. Kondisi tersebut terus membaik sampai tahun 2023 menjadi 74,85%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

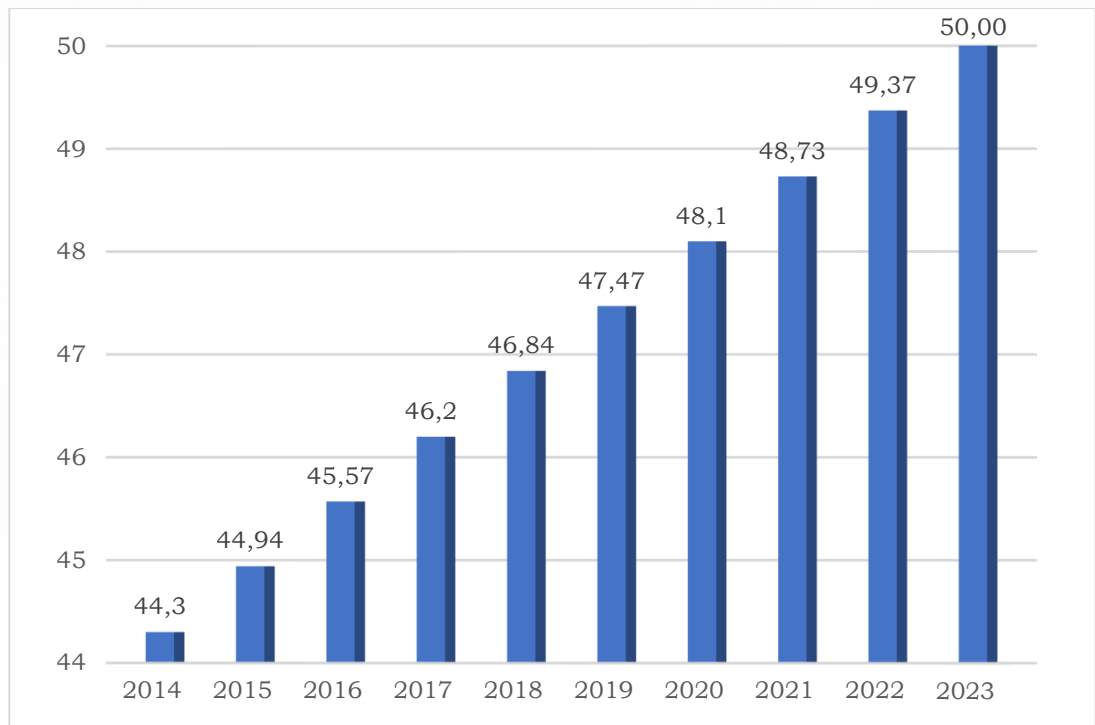


Gambar 2.52.

Persentase Jalan Mantap Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2023 (%)

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Pada tahun 2013 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Cilacap sebesar 44,3% dan pada tahun 2023 sebesar 50,00%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.53.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023 (%)

Sumber : Dishub Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Secara keseluruhan, kondisi jalan yang baik dan kelengkapan jalan yang memadai merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan menurunkan angka kecelakaan. Jumlah laka di Kabupaten Cilacap tahun 2023 sebanyak 1.207 kasus.

Tabel 2.10.

Data Laka Kabupaten Cilacap Tahun 2023

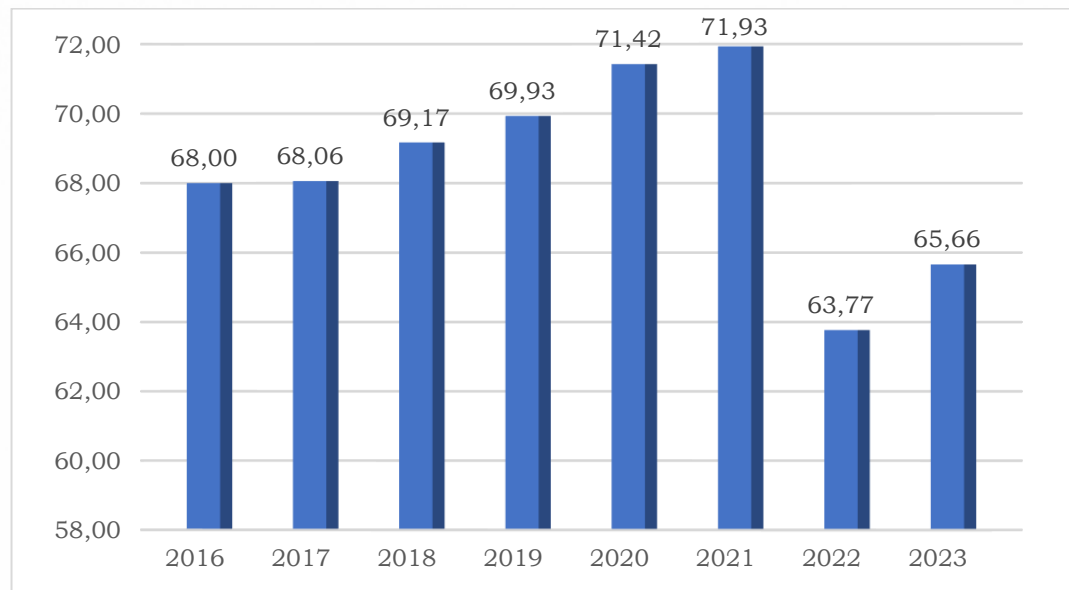
No	Bulan	Kejadian Bulan ini	Korban		
			MD	LB	LR
1	Januari	101	20	0	129
2	Februari	75	8	0	88
3	Maret	116	11	0	139
4	April	97	17	0	117
5	Mei	119	24	0	133
6	Juni	103	18	0	129
7	Juli	80	10	0	96
8	Agustus	130	10	0	159
9	September	86	28	0	86
10	Oktober	122	17	0	187
11	November	88	12	0	94
12	Desember	90	20	0	110
Jumlah		1.207	195	0	1.467

Sumber : Polres Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Kualitas Lingkungan Hidup

Gambaran kualitas lingkungan hidup dapat ditunjukkan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan/hutan. Pengukuran Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup baru dilakukan Tahun 2016 dimana dari hasil pengukuran mengalami peningkatan dari 68,00 persen menjadi 71,93 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 63,77, kemudian dapat kembali meningkat ditahun 2023 menjadi 65,66. Penurunan angka yang cukup signifikan dikarenakan terdapat perubahan cara perhitungan atas indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.54.

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2023

Sumber : DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2024

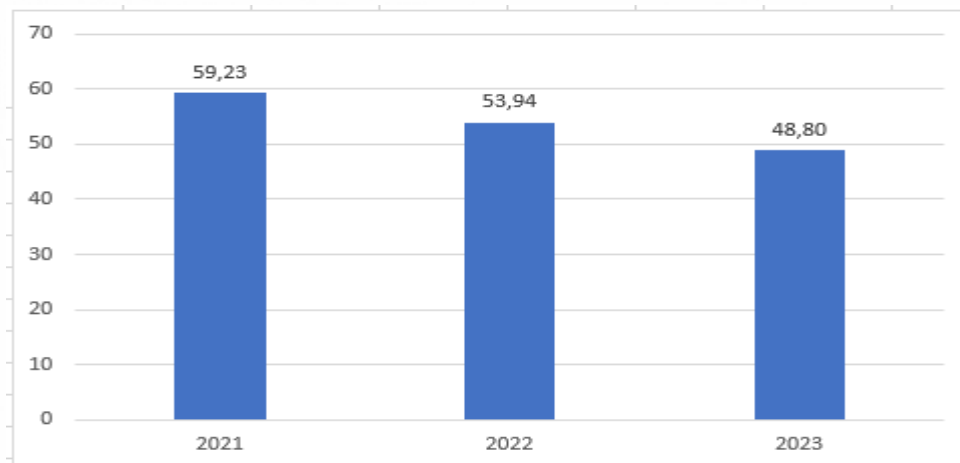
Berdasarkan Surat Sekditjen PPKL Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 terkait konversi capaian IKLH tahun 2023, maka hasil pengukuran IKLH Kabupaten Cilacap tahun 2023 menjadi IKLH sebesar 74,76; IKA sebesar 68,97; IKU sebesar 87,18; IKL sebesar 61,74.

Persampahan telah menjadi permasalahan penting di wilayah kabupaten Cilacap, khususnya pada kawasan permukiman perkotaan. Volume sampah yang semakin meningkat, tempat pemrosesan sampah yang semakin sempit dan sulitnya mencari tempat pemrosesan sampah baru merupakan permasalahan utama yang mendesak untuk segera dijadikan alternatif solusinya. Indikator kinerja terkait pengelolaan sampah meliputi : persentase pengurangan sampah, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA.

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Cilacap mendasari data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang diukur mulai tahun 2021 sebesar 59,23%, menurun tahun 2022 53,94% kemudian menurun lagi pada tahun 2023 sebesar 48,8%. Hal tersebut dikarenakan timbulan sampah terolah saat ini didominasi dari penggunaan alat pengolah sampah menjadi *Refuse*

Derived Fuel (RDF) di TPST Jeruklegi. Sarana dan prasarana pengolahan RDF yang menggunakan teknologi tinggi/produk impor seiring berjalannya waktu mengalami penurunan fungsi, sehingga berpengaruh terhadap kapasitas pengolahan sampah.

Selengkapnya terkait timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Cilacap tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.55.

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

Sumber : DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2023 diperoleh berdasarkan perhitungan neraca pengelolaan sampah sebagai berikut :

Tabel 2.11.

Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2023

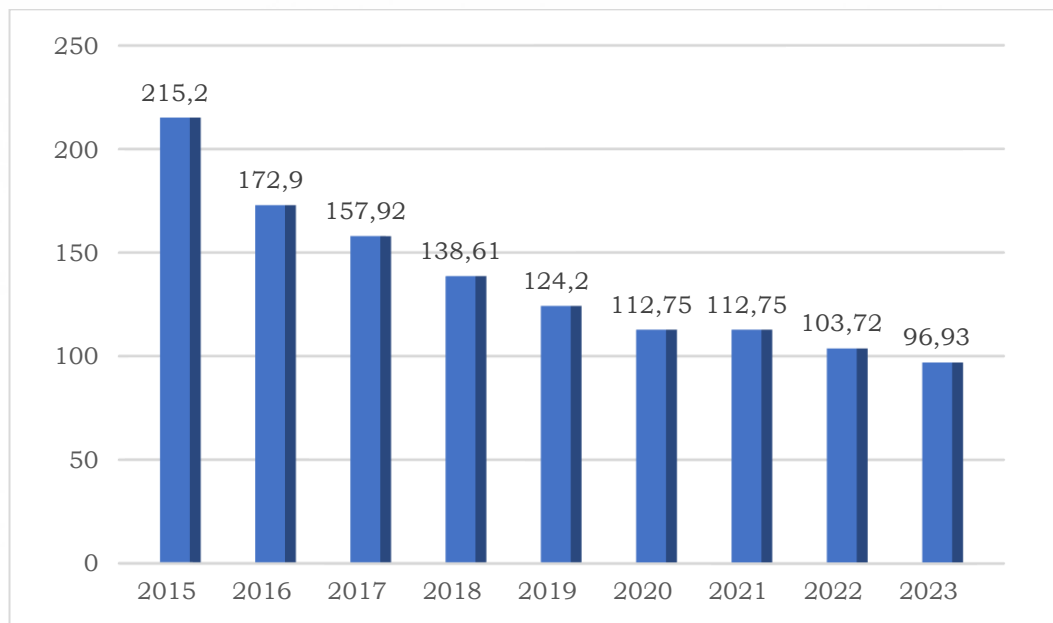
No	Keterangan	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	348.406,57
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	47.237,73
	Persentase pengurangan sampah	13,56
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	4.581,51
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	3.965,33
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	38.690,90
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	238.616,91
	Persentase penanganan sampah	68,49
a	Pengolahan	131.327,00
b	Pemrosesan akhir	107.289,91
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	274.188,15
	Persentase sampah terkelola	78,7
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	74.218,42
	Persentase sampah tidak terkelola	21,3

Sumber : DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Cilacap pada Tahun 2023 sebesar 48,8 %. Sedangkan sampah terkelola sebesar 78,7 dan sampah tidak terkelola sebesar 21,3%.

IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat ancaman bencana Kabupaten Cilacap berdasarkan IRBI tahun 2023 menunjukkan tingkat ancaman sedang dengan skor terakhir sebesar 96,93 dengan status sedang. Indeks risiko bencana di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.56.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2023

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain.

Gas karbon itu terakumulasi di lapisan atmosfer karena tak terserap tumbuhan atau kawasan hutan di darat dan padang lamun serta rumput laut di perairan yang luasannya menciut. Sementara paparan panas matahari, terutama radiasi inframerah, tak bisa terpantul keluar atmosfer karena tertahan lapisan gas rumah kaca (GRK) yang menebal di lapisan udara atas. Itu menyebabkan suhu Bumi terus naik.

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.57.

Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara>

Berdasarkan data yang telah dilaporkan melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) untuk Kabupaten Cilacap tahun 2021 tidak melaporkan pada aplikasi AKSARA, kemudian tahun 2022 total potensi penurunan emisi seluruh sektor di Kabupaten Cilacap adalah sebesar 221.975,79 Ton CO₂eq kemudian meningkat tahun 2023 sebesar 226.939,45 Ton CO₂eq. Inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) dilihat dari Sektor Energi, Sektor Proses Industry Dan Penggunaan Produk (Industrial Process Dan Product Usage/IPPU), Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan dan Sektor Limbah. Kabupaten Cilacap melaporkan perhitungan emisi GRK pada setiap sektor tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui web <https://signsmart.menlhk.go.id>. Hasil perhitungan dalam web tersebut menunjukkan besarnya total emisi GRK yang dihasilkan Kabupaten Cilacap dari kelima sektor di atas. Hasil ini menjadi salah satu landasan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menentukan kebijakan dan rencana aksi daerah dalam upayanya

menjaga kualitas udara, utamanya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Berikut adalah grafik dan tabel inventarisasi emisi GRK Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022. Data GRK sampai tahun 2021. Data 2022 kosong karena tidak ada kegiatan. Dan data tahun 2023 kosong karena dilaporkan untuk tahun 2024.

Tabel 2.12.
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Cilacap
Tahun 2021-2022 (GgCO₂)

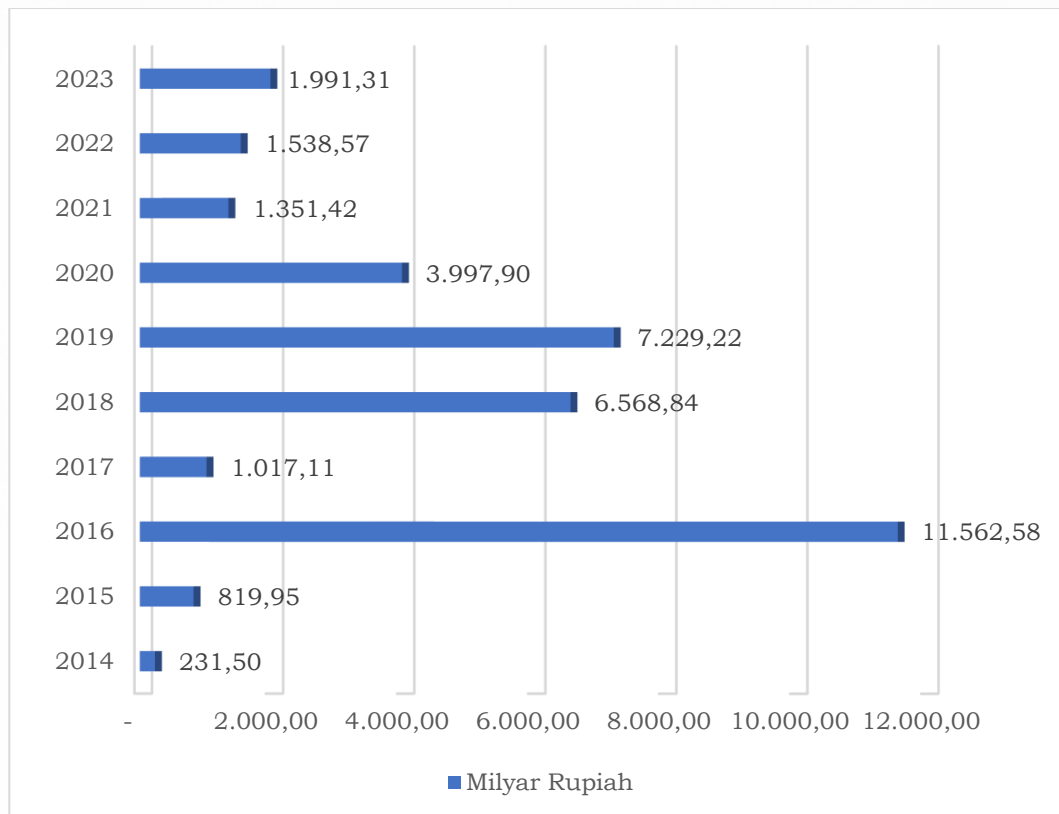
Tahun	Energi	IPPU	Pertanian dan Peternakan	Lahan	Limbah	Total
2014	6.814,14	30,11	724,39	-	76,71	7.645,35
2015	10.877,64	22,15	784,44	-382,61	74,65	11.376,27
2016	21.060,98	1.448,99	802,08	-29,63	162,62	23.445,04
2017	31.342,85	1.557,64	862,48	173,26	201,89	34.138,12
2018	37.119,25	1.558,92	833,04	-799,06	234,32	38.946,47
2019	26.988,22	1.391,90	693,88	-799,06	255,05	28.529,99
2020	32.448,98	1.538,50	802,71	-799,06	276,52	34.267,65

Sumber: <https://signsmart.menlhk.go.id>, 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyumbang emisi terbesar di Kabupaten Cilacap sejak tahun 2018 sampai 2022 adalah dari sektor energi dan IPPU. Untuk itu perlu dilakukan langkah untuk dapat mengendalikannya. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan limbah meskipun nilainya relative kecil, namun harus diupayakan agar emisi yang ditimbulkan tidak meningkat.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Realisasi investasi menunjukkan beberapa hal penting tentang kondisi ekonomi dan potensi pertumbuhan suatu daerah. Realisasi investasi Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2014 realisasi investasi sebesar 231,50 milyar rupiah, kemudian meningkat sangat signifikan di tahun 2016 menjadi 11.562,58 milyar rupiah. Kemudian mengalami fluktuatif sampai di tahun 2023 sebesar 1.991,31 milyar rupiah. Perkembangan realisasi investasi Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.58.
Realisasi Investasi Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Realisasi investasi yang tinggi menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan potensi pertumbuhan di Kabupaten Cilacap. Stabilitas ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondusivitas wilayah. Kondusifitas wilayah dilihat dari konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatarbelakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup didaerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya terhadap konflik SARA ada berbagai macam, di antaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk kedalam tahap pencegahan.

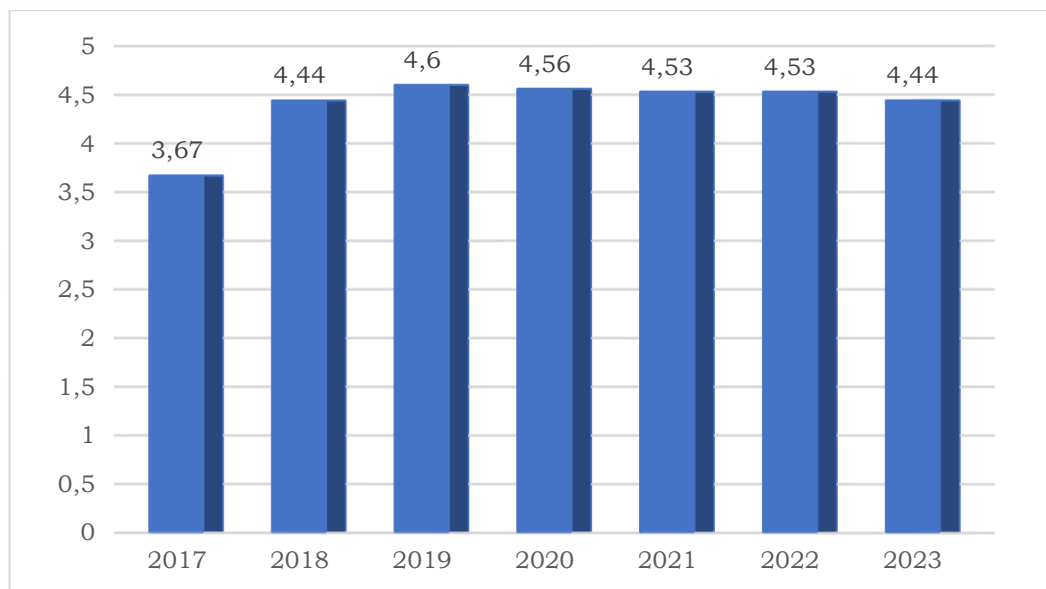
Daerah dengan jumlah konflik SARA yang tinggi cenderung menjadi kurang menarik bagi investor karena risiko yang lebih besar dan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi stabilitas dan profitabilitas investasi. Konflik sara di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2014-2023 tidak pernah ada kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa konduktivitas di Kabupaten Cilacap yang baik.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

IPP Kabupaten Cilacap pada tahun 2017-2023 cenderung fluktuatif kecuali di tahun 2023. Pada tahun 2017 capaian IPP Kabupaten Cilacap sebesar 3,67, kemudian meningkat menjadi 4,6 di tahun 2019. Namun, pada tahun 2023 menurun menjadi 4,44. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.59.

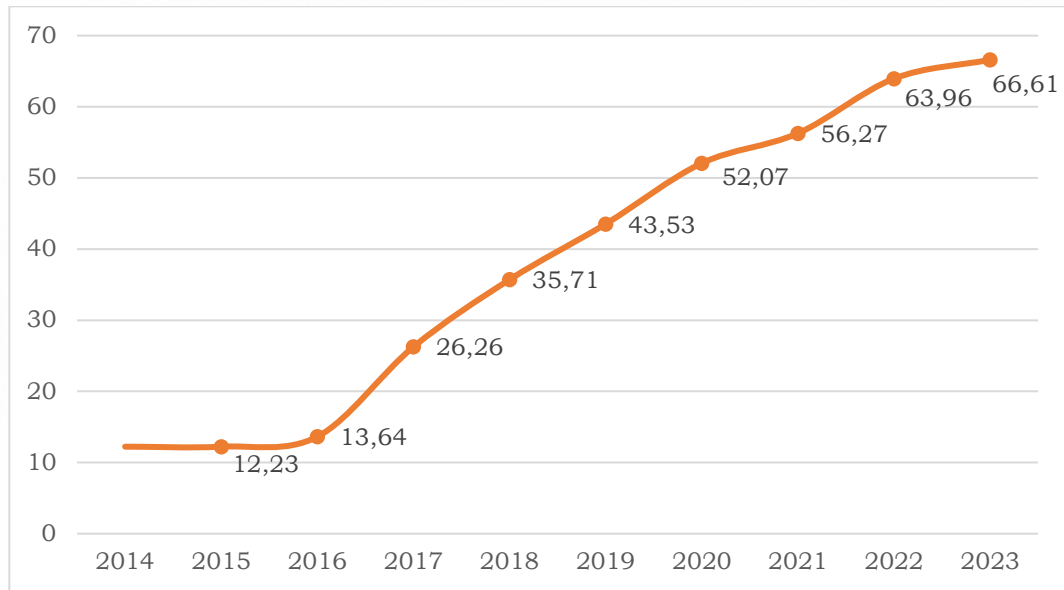
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2023

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat.

Akses internet di Kabupaten Cilacap terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga dengan

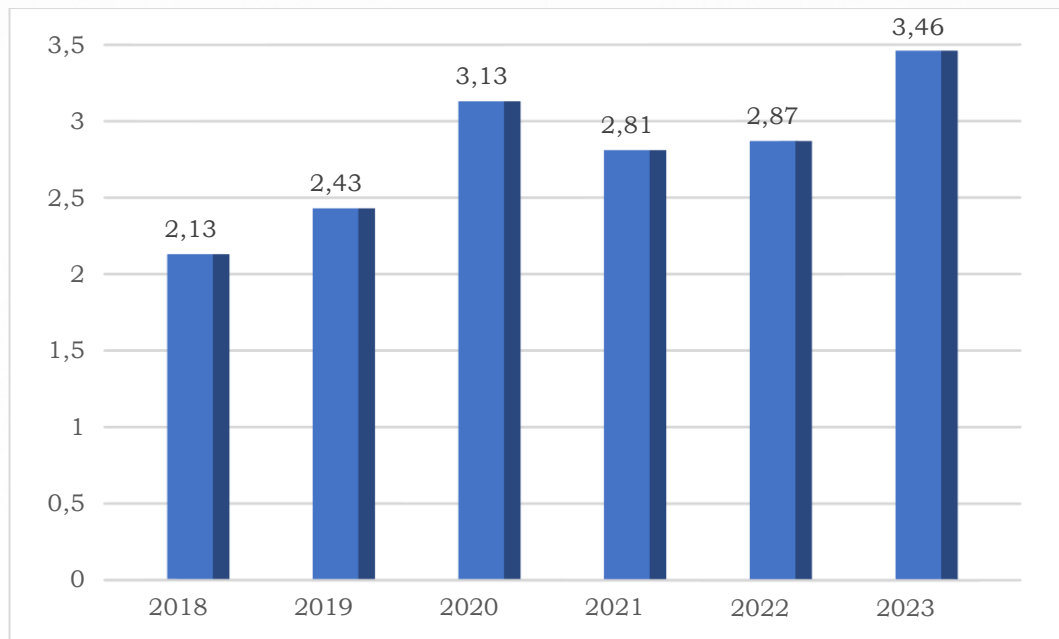
akses internet sebanyak 12,23%, terus mengalami kenaikan menjadi 66,61% di tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.60.
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Internet
di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Indeks SPBE adalah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan publik. Pada tahun 2018, nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Cilacap adalah 2,13. Nilai ini mencerminkan tingkat adopsi teknologi dan pelayanan berbasis elektronik yang masih rendah pada tahun tersebut. Nilai tersebut meningkat sampai tahun 2023 menjadi 3,46. Ini menunjukkan sedikit pemulihan setelah penurunan pada tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya gambaran indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Cilacap tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

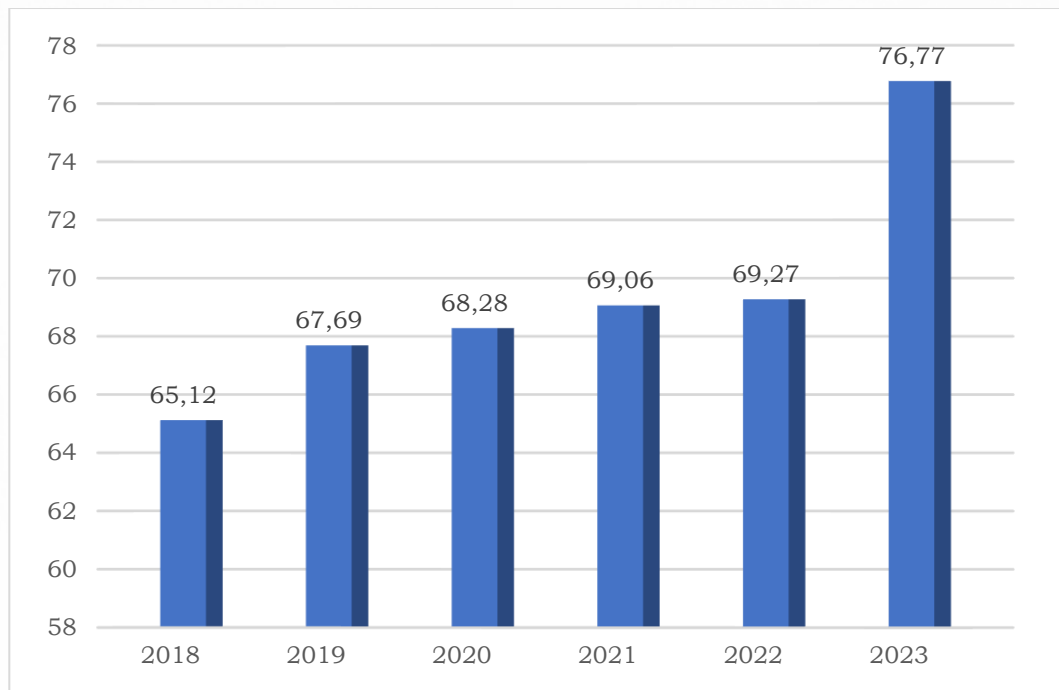
**Gambar 2.61.****Indeks SPBE Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023**

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2018-2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cilacap sebesar 65,12 kemudian meningkat menjadi 76,77. Pada tahun 2023, penilaian indeks reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan capaian indikator-indikator kinerja pada reformasi birokrasi reguler (tata kelola pemerintahan) dan capaian dari reformasi birokrasi tematik (berdampak). Nilai dari indeks reformasi birokrasi general sebesar 67,05, sedangkan indeks reformasi birokrasi tematik sebesar 9,72. Sehingga tahun 2023 indeks reformasi birokrasi sebesar 76,77.

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada di daerah, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik.



Gambar 2.62.

**Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023**

Sumber: Setda Bagian Organisasi Kabupaten Cilacap Tahun 2023

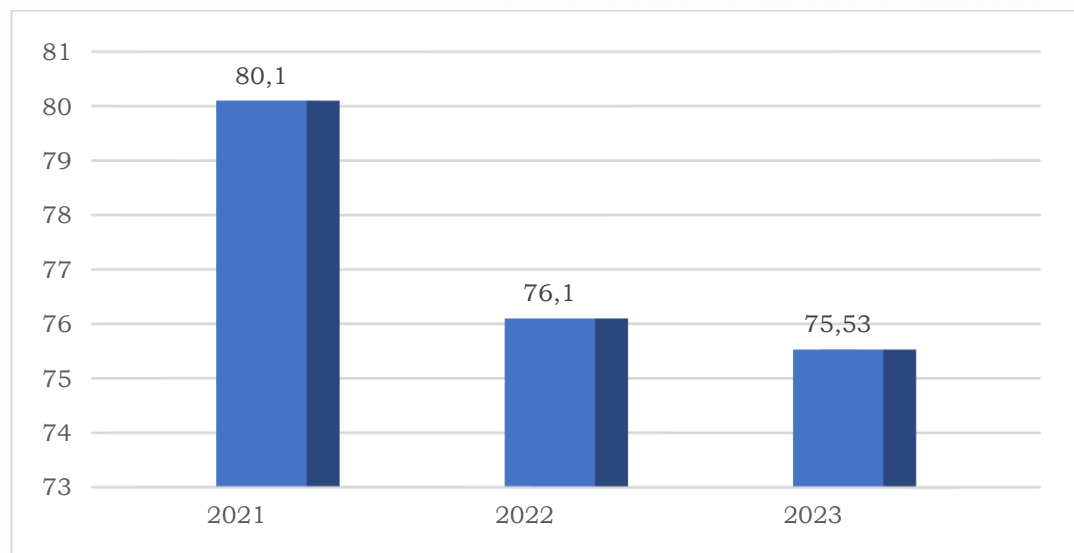
Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. Pada tahun 2023, indeks reformasi hukum Kabupaten Cilacap sebesar 45,79.

Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. IIN Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu tiga terakhir capaiannya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021 nilai IIN Kabupaten Cilacap sebesar 80,01, kemudian terus menurun sampai di tahun 2023 menjadi 75,53. Penurunan indeks integritas nasional

tersebut mengindikasikan bahwa semakin menurunnya sistem tata kelola, regulasi, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap. Nilai IIN yang tinggi menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil.



Gambar 2.63.

Indeks Integritas Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD tahun 2005-2025

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 diatur dalam Perda Nomor 23 Tahun 2008, Memiliki visi jangka panjang yaitu “*CILACAP YANG BERBUDAYA DAN SEJAHTERA*”, Visi RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 didukung oleh 9 misi.

Keberhasilan pembangunan selama 20 tahun dapat dilihat dari capaian indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 20 tahun mengalami peningkatan per tahun sebesar 0,84%, pada tahun 2005 IPM sebesar 69,5 meningkat pada tahun 2022 menjadi 70,99. Angka kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar 3,82% dengan angka tahun 2005 sebesar 22,25% menjadi 11,02% tahun 2022. Angka pengangguran juga mengalami penurunan dari tahun 2007 – 2022 sebesar 0,51% per tahun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014-2023 fluktuatif cenderung meningkat. Pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkonstraksi melambat bahkan tahun 2021 mengalami kontraksi negative. Namun tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,13%. Ketimpangan pendapatan dari tahun 2005 sampai 2022 mengalami peningkatan, artinya jarak antara pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi semakin melebar. Sedangkan pendapatan perkapita mengalami peningkatan dari 2005 – 2022 dengan peningkatan per tahun sebesar 11,77%.

RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 memiliki visi “Terciptanya Pemerintahan Yang Tangguh, Terpercaya dan Mandiri Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Pada RPJMD ini terdapat 6 misi yang hasil evaluasi indikator mengalami peningkatan dari kondisi awal RPJMD dengan kondisi akhir RPJMD. RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 memiliki visi “Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera Secara Merata”, dilaksanakan melalui 6 misi, RPJMD ini terdapat 76 indikator tujuan dan sasaran, Berdasarkan hasil evaluasi indikator dengan status capaian sangat tinggi sebanyak 64 indikator, status capaian tinggi 6 indikator, status capaian rendah 1 indikator, dan status capaian sangat rendah 6 indikator. RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 memiliki visi “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata “Bangga Mbangun Desa” dilaksanakan melalui 5 misi. Periode RPJMD tahun 2017-2022, memiliki indikator sebanyak 49 indikator dengan status capaian sangat tinggi sebanyak 39 indikator, status capaian tinggi sebanyak 4 indikator, status capaian sedang sebanyak 1 indikator, dan 5 indikator dengan status capaian sangat rendah. Pada tahun 2022 tidak Menyusun dokumen RPJMD dikarenakan dilaksanakannya PILKADA Serentak tahun 2024. Pemerintah Pusat menginstruksikan daerah Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD), RPD memiliki kurun waktu 2023 – 2026.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan hasil evaluasi berikut rekomendasi tindak lanjut yang diusulkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan jangka panjang ke depan:

1. Peningkatan daya saing manusia dititikberatkan pada peningkatan indeks pembangunan manusia pada komponen pendidikan dengan meningkatkan anak usia sekolah untuk bersekolah, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada usia produktif dan lansia. Penurunan kemiskinan dititikberatkan pada penduduk yang benar-benar miskin dengan memberikan jaminan perlindungan sosial sehingga mengurangi beban biaya hidup penduduk miskin.
2. Peningkatan daya saing ekonomi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas usaha mikro dan industri kecil serta menengah, pemerataan pembangunan antara wilayah harus menjadi prioritas pembangunan. Pengembangan investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, dengan pelayanan perijinan yang semakin mudah. Berdasarkan PDRB Kabupaten Cilacap dapat dilihat bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar ke 2 setelah industri pengolahan. Hal ini mengandung arti bahwa Kabupaten Cilacap harus mempertahankan produktivitas pertanian dalam arti luas. Pembangunan infrastruktur ke depan harus mampu membuka akses dan mendukung pembangunan ekonomi. Potensi jalan lingkar selatan,

TOL selatan dan bandara menjadi modal dasar dalam pembangunan ekonomi ke depan.

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dititik beratkan pada peningkatan pengelolaan sampah, penanganan pencemaran udara dan air. Perubahan iklim menjadi isu yang cukup mendapat perhatian saat ini dan ke depan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tujuan pembangunan 20 tahun yang akan datang.
4. Peningkatan reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik yang semakin prima.
5. Peningkatan pelibatan pada masyarakat rentan masih menjadi prioritas pada pembangunan 20 tahun ke depan.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Analisis proyeksi penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan kelompok umur akan memberikan gambaran tentang bagaimana struktur demografis penduduk di wilayah tersebut akan berkembang selama beberapa tahun mendatang. Perubahan yang signifikan dalam distribusi kelompok usia penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2020 – 2045, terdapat peningkatan jumlah penduduk dari sebanyak 1,946,193 jiwa pada tahun 2020 meningkat menjadi sebanyak 2,290,947 pada tahun 2045 atau bertambah sebanyak 344,754 jiwa selama 20 tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut termasuk pertumbuhan yang rendah. Pertumbuhan penduduk pada kelompok usia tertentu bertambah dan pada kelompok usia lainnya mengalami penurunan. Hal ini akan memiliki dampak pada berbagai aspek, seperti kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan di masa depan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2045

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	148.305	158040	152288	146065	140368	136129
5-9	142.893	137953	158538	152788	146563	140859
10-14	148.514	146843	138526	159207	153441	147196
15-19	149.143	149726	146782	138473	159156	153401
20-24	152.565	149013	149264	146352	138086	158697
25-29	157.733	158248	149298	149558	146664	138393
30-34	154.835	155070	158816	149858	150123	147227
35-39	153.060	155395	155700	159494	150518	150790
40-44	142.772	147381	155723	156061	159893	150912
45-49	136.075	136690	146523	154871	155252	159095
50-54	130.252	133580	134834	144644	152976	153417
55-59	115.818	119579	129849	131264	140974	149209
60-64	97.156	103710	113694	123777	125381	134842

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
65-69	74.341	79078	95266	104925	114660	116457
70-74	52.481	58099	68448	83156	92230	101306
75+	51.886	57987	78542	101004	127846	153017
Jumlah	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

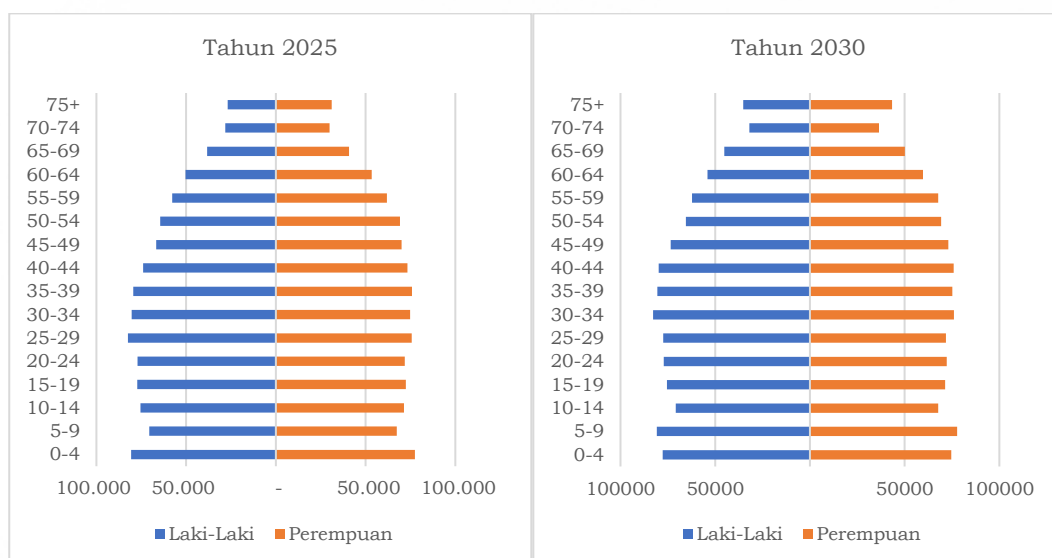
Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dari tahun 2020 – 2045 dapat dikemukakan perbandingan antara penduduk perempuan dengan laki-laki (sex ratio) diketahui sex ratio penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2020 sebesar 101,83 atau 102 dengan kata lain dinyatakan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 102 penduduk laki-laki. Pada tahun 2045 diperkirakan akan bergeser, setiap 100 perempuan terdapat sebanyak 99 orang laki-laki, perincian selengkapnya dikemukakan sebagai berikut :

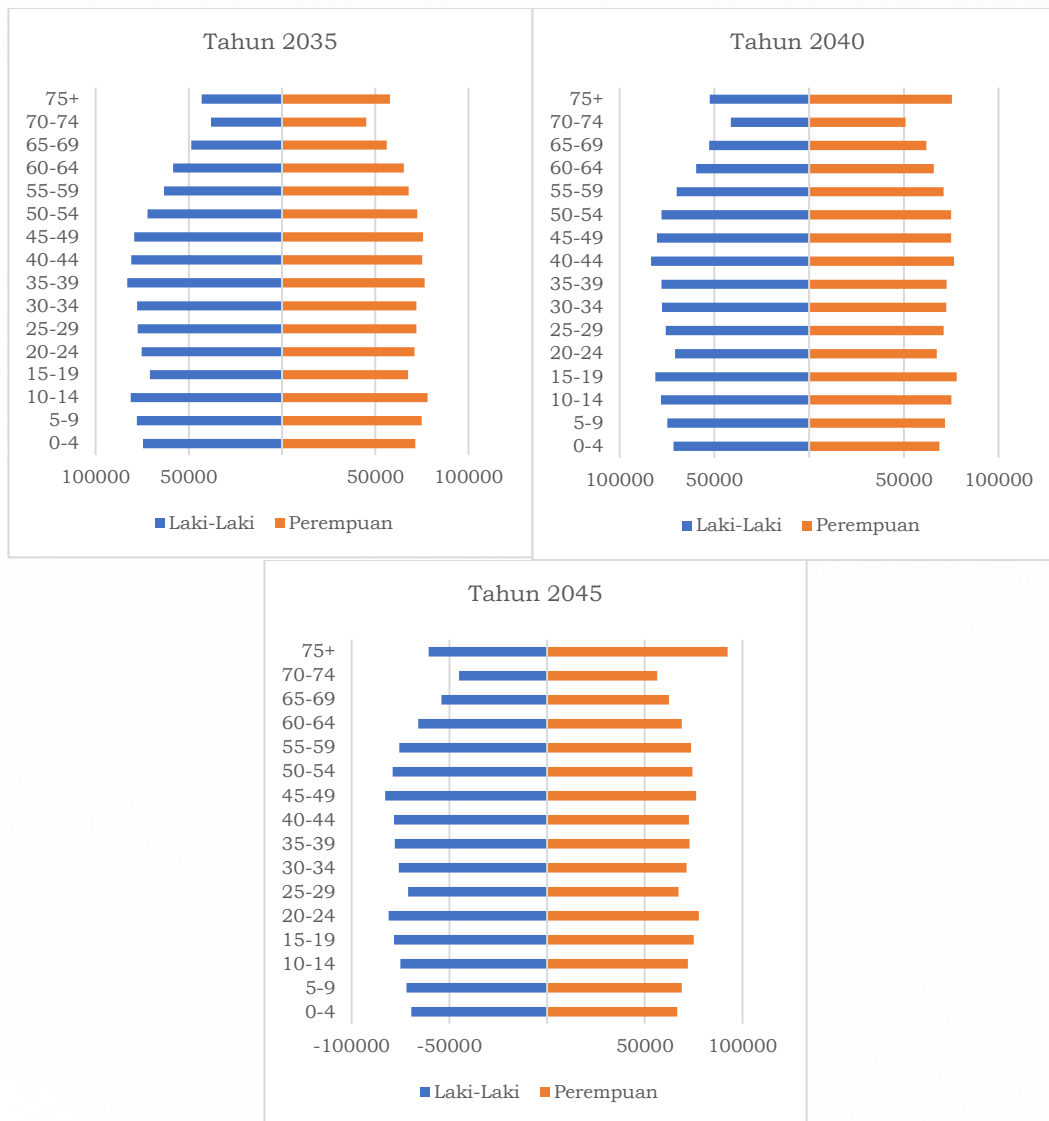
Tabel 2.14.
Proyeksi Jumlah, Sex ratio dan Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2045

Parameter	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (jiwa)	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947
Laki-laki	1.011.586	1.029.948	1.070.154	1.102.055	1.125.825	1.142.277
Perempuan	996.243	1.016.444	1.061.937	1.099.442	1.128.306	1.148.670
Sex Ratio (%)	102,00	101,33	100,77	100,24	99,78	99,44

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2023

Struktur usia penduduk dapat di gambarkan dalam piramida penduduk sebagai berikut.





Gambar 2.64.
Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045
Berdasarkan Proyeksi BPS

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

2. Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Cilacap tahun 2023-2045

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Data TFR Kabupaten Cilacap dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2045 menunjukkan tren menurun yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi perubahan dalam pola reproduksi penduduk di daerah tersebut. Pada tahun 2023, TFR di Kabupaten Cilacap mencapai 2,18. Hal ini menandakan bahwa rata-rata seorang wanita akan memiliki sekitar 2,18 anak selama hidupnya. Namun, dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu hingga tahun 2025, terjadi penurunan signifikan dalam TFR menjadi 2,12, ini menunjukkan bahwa ada penurunan dalam kelahiran anak per perempuan dalam waktu singkat. Pada tahun 2040 TFR diperkirakan akan terus turun menjadi 1,95 dan pada tahun 2045, diperkirakan akan mencapai 1,89. Hal ini menandakan bahwa rata-rata jumlah anak per

perempuan semakin mendekati angka 2,00, yang sering dianggap sebagai tingkat kesuburan yang stabil yang mempertahankan ukuran populasi.

Analisis ini menunjukkan pergeseran penting dalam pola reproduksi di Kabupaten Cilacap menuju kelahiran anak yang lebih rendah per perempuan. Hal ini bisa memiliki dampak besar pada struktur dan pertumbuhan populasi di masa depan, termasuk implikasi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Studi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perubahan ini dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kebijakan dan perencanaan masa depan di Kabupaten Cilacap.

Infant Mortality Rate (IMR) adalah indikator yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per seribu kelahiran hidup dalam suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2023, IMR adalah 13,17 per seribu kelahiran hidup, dan diperkirakan akan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 6,26 pada tahun 2045, Penurunan ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan perawatan ibu dan bayi di wilayah tersebut.

Data ini memberikan gambaran proyeksi IMR di masa depan hingga tahun 2045, Kabupaten Cilacap diharapkan dapat terus mengurangi angka kematian bayi. Hal ini bisa disebabkan oleh perbaikan infrastruktur kesehatan, akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan, serta program-program kesehatan masyarakat yang berhasil. Penurunan IMR dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi Kabupaten Cilacap, Penurunan IMR dapat berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan.

Tabel 2.15.
Proyeksi TFR dan IMR Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2045

Indikator	2023	2025	2030	2035	2040	2045
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,18	2,12	2,05	2,00	1,95	1,89
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	13,17	10,57	9,15	7,53	6,68	6,26

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2023 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

3. Proyeksi Bonus Demografi

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia > 65 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan perhitungan proyeksi perkembangan penduduk berdasarkan kelompok usia produktif Kabupaten Cilacap telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif

lebih dari 60% dari jumlah penduduk atau dengan kata lain dikemukakan setiap 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban 40 orang penduduk tidak produktif. Perincian tentang besarnya angka ketergantungan penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2025 – 2045 sebagai berikut :

Tabel 2.16.
Proyeksi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Cilacap
Tahun 2023 - 2045

Parameter	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947
Penduduk Usia Belum Produktif (0 -14 tahun)	439.712	442.836	449.352	458.060	440.372	424.184
Penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun)	1.389.409	1.408.392	1.440.483	1.454.352	1.479.023	1.495.983
Penduduk Usia Tidak Produktif (> 65 tahun)	178.708	195.164	242.256	289.085	334.736	370.780
Angka Ketergantungan (%)	43,52	45,30	48,01	51,37	52,41	53,14

Sumber data : Proyeksi BPS, Perhitungan Tim Penyusun, 2023.

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2045 dikaitkan dengan kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) maka diketahui angka ketergantungan di Kabupaten Cilacap dari tahun 2023 sebesar 43,52% dan cenderung meningkat menjadi sebesar 53,14% pada tahun 2045. Dengan kata lain dikemukakan bahwa Kabupaten Cilacap telah mengalami bonus demografi dari tahun 2023 diketahui setiap 100 orang usia produktif menanggung beban sebanyak 44 penduduk tidak produktif. Hal ini akan meningkat sampai dengan tahun 2045 yaitu sebanyak 100 penduduk usia produktif akan menanggung penduduk tidak produktif sebesar 52 orang. Maka bonus demografi yang dialami sampai dengan tahun 2045 harus dapat dimanfaatkan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja usia muda agar dapat bersaing di pasar kerja bidang industri, perdagangan dan jasa-jasa lainnya.

Bonus demografi hanya terjadi pada periode tahun 2023 – 2045, ke depan jumlah penduduk tidak produktif semakin meningkat, terutama kelompok lanjut usia, maka memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Cilacap dengan baik. Hal ini berdasarkan tantangan sebagai berikut:

- a. Masalah pengangguran : bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda. Jika kelompok usia muda berpendidikan rendah, kurang keterampilan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran kelompok usia muda yang

dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas. Salah satu katup pengaman masalah pengangguran adalah dengan fasilitasi dan peningkatan usaha sektor informal, perdagangan skala kecil, pedagang kaki lima dan buruh tidak terampil.

- b. Meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik : pertumbuhan jumlah penduduk usia muda akan menjadikan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesehatan, transportasi dan perumahan dan pemukiman serta sarana rekreasi/ olahraga.
- c. Tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan kapasitas tenaga kerja usia muda kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- d. Kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, hal ini terjadi apabila lulusan sekolah dan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lowongan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
- e. Tantangan kesehatan : pertumbuhan penduduk kelompok usia muda menempatkan pada kebutuhan tentang sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Sedangkan keuntungan dan kemanfaatan dengan meningkatnya penduduk usia muda, antara lain sebagai berikut :

- a. Dividen demografi : jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja yang baik.
- b. Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil.
- c. Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
- d. Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi sosial lainnya.
- e. Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
- f. Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi.

Meningkatnya jumlah lansia memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Cilacap dengan baik. Tantangan dalam kebijakan dalam mewujudkan lansia tetap sehat dan mandiri, menghadapi tantangan:

- a. Masalah pengangguran : kelompok lanjut usia tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan serta kurangnya keterampilan.
- b. Terdapat kelompok lansia yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, akses bantuan sosial dan dana pensiun mandiri (DPLK).
- c. Lansia yang sakit karena usia tua dan kurang memadai mendapatkan pelayanan kesehatan, PHBS dan jaminan sosial belum merata.

Sedangkan peluang dan potensi dalam penanganan lansia dalam mewujudkan lansia sehat dan mandiri, sebagai berikut:

- a. Sebagian besar lansia di Kabupaten Cilacap pada umumnya tetap hidup bersama keluarga inti (*nucleus family*) dan juga keluarga besar (*ektended family*) dalam persaudaraan dan saling mendukung dalam pengasuhan lanjut usia.
- b. Potensi penduduk lansia dapat dioptimalkan dalam kegiatan usaha produktif, sosial keagamaan dan pelatihan keterampilan dari tingkat desa/kelurahan, Potensi lanjut usia baik pendidikan dan pengalaman kerjanya dapat menjadi penggerak dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- c. Terdapat lansia yang tetap produktif melakukan pekerjaan dan usaha, bekerja profesional dalam usaha-usaha produktif (guru, seniman, usaha pertanian, usaha mikro dan kecil serta perdagangan) dapat menjadi penggerak (fasilitator) dalam pemberdayaan lanjut usia.

2.6.2. Proyeksi Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan rumah/hunian, sedangkan lahan yang tersedia terbatas. Meningkatnya kebutuhan rumah ini perlu diatur sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di wilayah tersebut seperti rumah liar, permukiman kumuh maupun lainnya. Proyeksi kebutuhan rumah dan luas kavling yang dibutuhkan untuk penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2025-2045 menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.17.**Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2245**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947
Jumlah KK	669.276	682.131	710.697	733.832	751.377	763.649
Standar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Proyeksi Kebutuhan Rumah	669.276	682.131	710.697	733.832	751.377	763.649
Kebutuhan luas kavling minimum per keluarga (m ²)	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga (m ²)	48.187.896	49.113.408	51.170.184	52.835.928	54.099.144	54.982.728

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan perhitungan kebutuhan rumah dari tahun 2025-2045 yang menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2045, dimana sampai dengan tahun 2045 total backlog kebutuhan rumah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045 mencapai 763.649 rumah. Untuk kebutuhan luas kavling yang dibutuhkan dengan dasar perhitungan bahwa setiap keluarga membutuhkan luas kavling minimal sebesar 72 m², maka dapat diperkirakan kebutuhannya di tahun 2045 sebesar 54.982.728 m². Dalam perkembangannya nanti pembangunan perumahan dan pemukiman dengan pembangunan perumahan secara bertingkat terutama di pemukiman perkotaan sebagai upaya mengurangi alih fungsi lahan pertanian.

2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Sistem penyediaan jaringan air minum secara umum dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem non perpipaan dan sistem perpipaan. Pelayanan air minum dengan sistem non perpipaan adalah sistem pemenuhan kebutuhan air yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari air tanah dengan pembuatan sumur gali maupun sumur pompa tangan. Sedangkan sistem perpipaan yaitu penyediaan air minum yang dikelola oleh PDAM dengan pelayanannya melalui distribusi perpipaan. Selain itu kebutuhan air minum juga terlayani oleh Pamsimas dan masih ada yang menggunakan sumur.

Penggunaan rata-rata air minum untuk rumah tangga perkotaan sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), baik bagi anak-anak, perempuan dan lanjut usia sesuai Kebijakan Kabupaten/Kota Sehat. Di Indonesia setiap orang sebesar 144 liter/ per orang/ per hari, maka berdasarkan panduan tersebut maka dapat dikemukakan proyeksi kebutuhan air minum

berdasarkan jumlah penduduk dibandingkan dengan kebutuhan air minum adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Cilacap
Tahun 2025 – 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947
Penggunaan rata-rata air minum (liter/org/hari)	144	144	144	144	144	144
Kebutuhan Air Bersih (liter)	289.127.376	294.680.448	307.021.104	317.015.568	324.594.864	329.896.368

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2023,

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air bersih maka diketahui pada tahun 2025 sebesar 294.680.448 liter dan meningkat menjadi sebesar 329.896.368 liter pada tahun 2045. Berdasarkan arahan kebijakan pembangunan berkelanjutan diperlukan program menghemat air bersih, mengolah air (mendaur ulang air yang telah digunakan), dengan penerapan teknologi tepat guna (TTG), memanen air hujan dan sehingga pemanfaatan air bersih semakin efisien. Selain itu, agar pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga semakin merata diperlukan kebijakan mendukung pengelolaan air bersih, untuk kepentingan rumah tangga dengan menghemat air, mengembalikan air hujan ke tanah dengan biopori, sumur resapan, pembangunan embung dan waduk-waduk kecil.

3. Proyeksi Kebutuhan Listrik Untuk Rumah Tangga

Pemanfaatan listrik bagi rumah tangga di Kabupaten Cilacap semakin penting dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan produktivitas masyarakat serta aktivitas sosial lainnya. Dengan layanan listrik, penggunaan peralatan listrik dan telekomunikasi/internet maka kegiatan rumah tangga, kegiatan sosial budaya serta usaha ekonomi dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi rumah tangga, dengan makin meningkatnya rintisan usaha mikro dan kecil, sektor informal di perdesaan, kegiatan belajar anak sekolah menjadi lebih mudah dan waktu belajar yang lebih lama adanya penerangan listrik.

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN (2020) sebanyak 543.582 rumah tangga dengan daya listrik 378.081.800 VA dan banyaknya konsumsi listrik sebesar 316.275.635 kwh pada tahun 2020. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN (2022) adalah sebanyak 565.848 rumah tangga dengan daya listrik 429.787.350

VA dan banyaknya konsumsi listrik sebesar 55.813.907 kwh pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan tentang kebutuhan listrik ditentukan dalam perhitungan ini berdasarkan konsumsi listrik per individu. Adapun hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Cilacap tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Tabel 2.19.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Cilacap
Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947
Jumlah Rumah	501.069	682.131	710.697	733.832	751.377	763.649
Kebutuhan Listrik Per Individu (Kwh/hari)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Kwh/tahun)	249.739.365	254.535.939	265.195.419	273.828.331	280.375.094	284.954.371

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2023.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka diketahui proyeksi rata-rata kebutuhan listrik di Kabupaten Cilacap tahun 2025 sebesar 254.535.939 kwh dan pada tahun 2045 diperkirakan menjadi 284.954.371 kwh. Peningkatan konsumsi listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya penggunaan peralatan listrik di Kabupaten Cilacap.

Namun perlu mendapatkan perhatian adalah perkembangan peralatan listrik dan elektronika yang semakin hemat energi (seperti lampu LED, TV LED, laptop semakin meningkat). Demikian pula pemanfaatan power supply yang memasok listrik rumah tangga dan kendaraan dan peralatan peralatan hemat energi maka penggunaan energi listrik di rumah tangga menjadi semakin hemat. Pembangunan kelistrikan dan semakin meluasnya pemanfaatan energi terbarukan rumah tangga dengan tenaga surya, tenaga angin, mini mikrohidro yang dimanfaatkan masyarakat semakin mudah dengan pemanfaatan teknologi tepat guna serta sumber energi dari limbah peternakan dan gas metana dari sampah di tempat pemrosesan sampah.

4. Sarana Pengumpulan Sampah

Pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih

stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah menjadi hal krusial agar semua dapat terproses dengan baik, diantaranya seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya. Pengumpulan sampah yang efektif memiliki banyak manfaat, antara lain : Mencegah penumpukan sampah di lingkungan, Mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan Memperbaiki kualitas lingkungan.

Tabel 2.20.
Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah di Kabupaten Cilacap Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2023

Sarana Pengumpulan Sampah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Truk Sampah/ <i>Garbage truck</i>	26	26	27	25	25
2. Truk Kontainer/ <i>Container truck</i>	13	13	13	14	13
3. Kontainer/ <i>Container</i>	54	58	66	68	73
4. Gerobak Sampah/ <i>Garbage Cart</i>	434	302	338	345	370
5. Tempat Penampungan Sementara Sampah/ <i>Temporary Shelters Garbage</i>	73	75	75	64	49
6. Tempat Pemrosesan Akhir/ <i>final processing area</i>	4	4	4	4	3

Sumber : DLH Kabupaten Cilacap, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan dari Kementerian LH dan Kehutanan diketahui volume sampah yang dihasilkan per orang sebesar 0,68 kg/orang/hari maka dengan meningkatnya jumlah penduduk produksi sampah per orang/per hari maka dapat dihitung banyaknya sampah yang dihasilkan setiap hari sebagai berikut :

Tabel 2.21.
Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947
Proyeksi Timbulan Sampah (kg/Orang/hari)	1.405.480	1.432.474	1.492.464	1.541.048	1.577.892	1.603.663
Proyeksi jumlah kebutuhan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	1	12	12	13	13	13

Sumber : Perhitungan Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan data jumlah sampah yang dihasilkan rumah tangga tahun 2025 sebesar 1.391.546,56 kg/hari atau sebanyak 1.391,54 ton

dan meningkat pada tahun 2045 menjadi 1.557,84 ton/hari yang memerlukan manajemen pengelolaan semakin baik. Hasil proyeksi tersebut menjadi dasar menyusun program pengelolaan sampah terutama proses pengangkutan, pengelolaan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dengan metode 3R dan Bank Sampah, baik melalui TPS dan daur ulang sampah terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan perekonomian daerah. Sedangkan di wilayah perdesaan masyarakat mengelola sampah secara swadaya. Pada tahun 2030 berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak diperbolehkan ada Tempat pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, maka sampah harus dikelola dari sumbernya, baik rumah tangga, pasar, tempat umum dan kegiatan usaha lainnya.

5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), dll. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Cilacap disediakan oleh pemerintah dan swasta. Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Cilacap antara lain rumah sakit, Posyandu, Apotik, Dokter Praktek dan Bidan Praktek. Standar pelayanan fasilitas kesehatan menurut SNI 03-1733-2004. Fasilitas kesehatan merupakan salah satu kebutuhan sarana yang paling penting guna mendukung para penduduk untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tidak mengenal muda dan tua, fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan keberadaannya bahkan di lingkungan hunian sekalipun.

Tabel 2.22.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Cilacap
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947
Jumlah Kebutuhan Tempat Tidur RS	2.008	2.046	2.132	2.201	2.254	2.291
Standard	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Kebutuhan Posyandu	1.606	1.637	1.706	1.761	1.803	1.833
Standard (m ² /jiwa)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Jumlah Balai Pengobatan Warga	803	819	853	881	902	916
Standard (m ² /jiwa)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Jumlah BKIA/Klinik Bersalin	67	68	71	73	75	76
Standard (m ² /jiwa)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan	67	68	71	73	75	76
Standard (m ² /jiwa)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan	17	17	18	18	19	19
Standard (m ² /jiwa)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah Kebutuhan Tempat Praktek Dokter	402	409	426	440	451	458
Standard (m ² /jiwa)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jumlah Kebutuhan Apotek/Rumah Obat	67	68	71	73	75	76
Standard (m ² /jiwa)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2025, dengan proyeksi penduduk sebanyak 2.046.392 jiwa yaitu kebutuhan tempat tidur RS sebanyak 2.046 unit, posyandu sebanyak 1.637 unit, balai pengobatan warga sebanyak 819 unit, BKIA/klinik bersalin sebanyak 68 unit, puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan sebanyak 68 unit, puskesmas dan balai pengobatan sebanyak 17 unit, tempat praktek dokter sebanyak 409 unit, dan apotek/rumah obat sebanyak 68 unit.

Sedangkan pada tahun 2045, dengan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 2.290.947 jiwa, maka fasilitas kesehatan yang dibutuhkan yaitu kebutuhan tempat tidur RS sebanyak 2.291 unit, posyandu sebanyak 1.833 unit, balai pengobatan warga sebanyak 916 unit, BKIA/klinik bersalin sebanyak 76 unit, puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan sebanyak 76 unit, puskesmas dan balai pengobatan sebanyak 19 unit, tempat praktek dokter sebanyak 458 unit, dan apotek/rumah obat sebanyak 76 unit.

Proyeksi fasilitas kesehatan ini penting bagi perencanaan jangka panjang untuk memastikan sistem kesehatan dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan penduduk di Kabupaten Cilacap.

6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Dalam pembangunan bidang pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul.

Selengkapnya terkait proyeksi kebutuhan rombongan belajar di Kabupaten Cilacap tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Cilacap
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	2.007.829	2.046.392	2.132.091	2.201.497	2.254.131	2.290.947
Proyeksi Penduduk usia 5-6 Tahun	45.760	55.488	64.640	60.393	57.610	55.655
Proyeksi Penduduk usia 7-12 Tahun	129.831	169.617	177.614	189.417	179.900	172.744
Proyeksi Penduduk usia 13-15 Tahun	63.796	89.585	83.301	91.185	94.578	89.793
Proyeksi Penduduk usia 16-18 Tahun	66.066	89.993	88.498	81.825	96.661	91.840
a. TK	552	556	566	576	570	559
b. SD/MI	1.233	1.237	1.247	1.257	1.253	1.248
c. SMP/MTs	272	274	279	284	289	285
d. SMA/MA/SMK	214	215	222	228	233	227

Sumber : Perhitungan Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 yaitu sebanyak 556 TK, SD/MI sebanyak 1.237, SMP/MTs sebanyak 274, dan SMA/MA/SMK sebanyak 215. Sedangkan pada tahun 2045 proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Cilacap yaitu TK sebanyak 559, SD/MI sebanyak 1.248, SMP/MTs sebanyak 285, dan SMA/MA/SMK sebanyak 227.

Proyeksi fasilitas pendidikan dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur pendidikan dapat memenuhi kebutuhan belajar di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk menjaga agar akses terhadap pendidikan tetap merata dan berkualitas. Dengan proyeksi yang akurat, pemerintah dan pihak terkait dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas yang ada, serta pengembangan program pendidikan. Ini juga membantu mengantisipasi tantangan, seperti kepadatan siswa dan kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Proyeksi fasilitas pendidikan mendukung perencanaan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan generasi mendatang.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**2.7.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, meliputi sistem pusat permukiman sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi, PKN berada di Kawasan Perkotaan Cilacap,
2. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, PKL terdiri atas Kawasan Perkotaan Kroya dan Kawasan Perkotaan Majenang,
3. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, PPK berada di setiap kecamatan, terdiri atas : PPK Sidareja; PPK Kesugihan; PPK Karangpucung; PPK Dayeuhluhur; PPK Sampang; PPK Cipari; PPK Wanareja; PPK Nusawungu; PPK Adipala; PPK Bantarsari; PPK Kawunganten; PPK Cimanggu; PPK Maos; dan PPK Patimuan,
4. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, PPL terdiri atas : PPL Binangun di Kecamatan Bantarsari; PPL Cinangsi di Kecamatan Gandrungmangu; PPL Panikel di Kecamatan Kumpulglaut; PPL Jambusari di Kecamatan Jeruklegi; PPL Sikampuh di Kecamatan Kroya; PPL Welahan Wetan di Kecamatan Adipala; PPL Jetis di Kecamatan Nusawungu; PPL Bulupayung di Kecamatan Patimuan; PPL Tambakreja di Kecamatan Kedungreja; PPL Cidadap di Kecamatan Karangpucung; PPL Pamulihan di Kecamatan Karangpucung; PPL Mandala di Kecamatan Cimanggu; PPL Kutabima di Kecamatan Cimanggu; PPL Cigintung di Kecamatan Wanareja; PPL Tarisi di Kecamatan Wanareja; PPL Karangreja di Kecamatan Cipari; dan PPL Kahuripan di Kecamatan Kahuripan.

2.7.2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana dalam dokumen RPJPN 2025-2045

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena *market strength*-nya

(kekuatan pasar). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan multi-infrastructure dan *maritime backbone* dan *global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic* dan *production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global): serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.

Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan,

Ketiga, percepatan pembangunan berbasis Pembangunan hijau dan sirkuler, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan (EBT), guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.

Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

2.7.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

WP Cibalingmas meliputi Kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas yang diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap–Purwokerto–Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas berbasis keunggulan wilayah serta sebagai pusat pelayanan regional. Sebagai kawasan yang berbatasan dengan Jawa Barat maka dilakukan pengembangan kawasan perbatasan secara sinergis dengan pusat pengembangan di kawasan perkotaan Majenang. Untuk meningkatkan pergerakan distribusi wilayah maka perlu mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor di wilayah selatan, pengembangan akses menuju bandar udara Jenderal Soedirman dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya. Beberapa industri yang dikembangkan pada kawasan ini antara lain adalah industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam. Sedangkan pengembangan potensi wisata unggulan dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan khususnya kawasan ekosistem mangrove Segara Anakan dan kawasan pariwisata Baturaden.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah yang diidentifikasi, serta berdasarkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, maka rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Cilacap semakin menurun.
2. Meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi, akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK).
3. Bonus demografi dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran jika tidak dikelola dengan baik. Jika kelompok usia muda berpendidikan rendah, kurang keterampilan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas.
4. Meningkatnya usia harapan hidup menyebabkan meningkatnya jumlah lansia. Potensi ini harus disikapi dengan memperkuat kualitas usia produktif dan lanjut usia.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Cilacap, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya indeks gini, peningkatan PDRB perkapita yang lambat, tingginya angka kemiskinan, indeks ketahanan pangan belum optimal serta masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.
2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap, hal ini karena masih adanya potensi destinasi pariwisata yang belum tersentuh, belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian serta nilai tambah pertanian yang belum optimal.
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Cilacap, hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah. Selain itu masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.

2. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Belum optimalnya pembangunan manusia, hal ini ditunjukkan dengan belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Umur harapan penduduk Kabupaten Cilacap walaupun mengalami peningkatan tetapi masih berada dibawah rata-rata Jawa Tengah. Masih ditemukannya kematian ibu, prevalensi stunting yang masih tinggi, penemuan dan pengobatan tuberkulosis yang meningkat serta jaminan kesehatan yang belum dimiliki oleh semua penduduk Kabupaten Cilacap. Terkait dengan pemerataan dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendorong pencapaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah yang maksimal. Masih ditemukannya anak usia sekolah tidak sekolah.
2. Pembangunan manusia yang berkeadilan gender belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya ketimpangan gender di beberapa bidang pembangunan.
3. Budaya dan karakter masyarakat menjadi isu di tahun 2045. Modernisasi dan digitalisasi dikawatirkan akan mengurangi nilai budaya dan karakter masyarakat. Pemajuan kebudayaan belum menjadi dasar pada pembangunan kebudayaan.

3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Cilacap menjadi permasalahan saat ini. Belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.
2. Investasi Kabupaten Cilacap didominasi investasi padat modal yang belum mampu menyerap tenaga kerja. Pelayanan perijinan dalam Mall Pelayanan Publik masih belum optimal.
3. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri, belum optimalnya pengembangan kluster industri potensi, belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah serta industri pengolahan yang belum berkembang secara optimal.
4. Pembangunan didesa yang belum optimal, masih terbatasnya desa yang masuk dalam kategori mandiri dalam konsep Desa Membangun.

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Belum optimalnya peningkatan daya saing manusia di Kabupaten Cilacap. Hal ini dilihat dari capaian indek literasi numerik yang belum optimal, selain itu masih terbatasnya jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tinggi.

3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

1. Belum optimalnya kondisi infrastruktur yang ada untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya konektivitas antar pusat pertumbuhan. Hal ini seperti masih ditemukannya jalan yang rusak dan kelengkapan jalan yang belum memadai, belum secara merata akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak dan aman. Masih ditemukannya rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Kondisi irigasi yang belum optimal dalam mendukung pertanian yang berkualitas. Kabupaten Cilacap merupakan wilayah rawan bencana, tetapi kondisi infrastruktur yang ada belum optimal dalam menghadapi potensi bencana yang ada.
2. Kualitas lingkungan hidup pada tahun 2045 masih menjadi permasalahan. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan menjadikan jumlah sampah menjadi meningkat, sementara pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu meningkatnya aktivitas perekonomian akan menjadi penyebab meningkatnya pencemaran udara, air dan berkurangnya tutupan lahan.

4. Daya Saing Iklim Investasi

Belum optimalnya investasi yang masuk ke Kabupaten Cilacap disebabkan masih terjadinya kriminalitas, tidak optimalnya promosi dan pelayanan penanaman modal yang belum optimal.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Belum optimalnya pelayanan publik, masih ada sebagian masyarakat yang menilai pelayanan yang diberikan pemerintah rumit.
2. Belum optimalnya reformasi birokrasi dikarenakan belum optimalnya kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP yang lebih baik,.

Berdasarkan uraian permasalahan pada aspek Kesejahteraan Sosial Budaya, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, dapat disimpulkan bahwa masalah utama Kabupaten Cilacap yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi dan Kualitas SDM yang belum Berdaya Saing
 - a. Belum optimalnya Kualitas SDM menghadapi tantangan *industry 4.0* dan *society 5.0*

Di dalam era *industry 4.0* dan *society 5.0* ini sumber daya manusia yang berkompeten merupakan komponen utama dalam pembangunan di suatu daerah. Peningkatan SDM merupakan strategi yang dapat kita gunakan dikarenakan kita telah mengetahui bahwa hal tersebut sangat krusial. Kualitas

SDM sudah merupakan keharusan di dalam suatu pembangunan. Setiap SDM dituntut kualitas dalam dirinya untuk mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di segala bidang.

Belum optimalnya kualitas SDM di Kabupaten Cilacap salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya mutu, pemerataan dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendorong pencapaian Harapan Lama Sekolah dan Rata rata lama sekolah yang maksimal. Selain itu, perihal kesehatan masih menjadi perhatian 20 tahun ke depan, mulai dari belum optimalnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan inklusi, masih munculnya penyakit menular dan tidak menular sebagai penyebab kematian.

- b. Belum Optimalnya Pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal

Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal merupakan salah satu langkah selanjutnya dalam keswadayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Potensi tersebut meliputi semua potensi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial.

Potensi lokal yang belum dimanfaatkan dengan optimal disebabkan oleh pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Cilacap yang masih belum maksimal. Pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing belum terwujud. Selain itu, investasi Kabupaten Cilacap didominasi investasi padat modal yang belum mampu menyerap tenaga kerja dan pelayanan perijinan dalam Mall Pelayanan Publik masih belum optimal. Ekspor produk unggulan Cilacap masih belum optimal serta kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas.

- c. Pemerataan pembangunan yang masih belum optimal

Pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, dan pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan.

Menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dibutuhkan kualitas infrastruktur yang

optimal. Masih ditemukannya jalan yang rusak dan kondisi drainase yang belum optimal. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih, sanitasi layak dan aman. Penggunaan tata ruang yang belum sesuai peruntukannya juga menjadi perhatian ke depan, terutama pada perwujudan produktivitas pertanian.

d. Belum optimalnya riset dan inovasi daerah

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain belum optimalnya peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor, kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi.

2. Belum optimalnya tingkat kesejahteraan

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap disebabkan oleh masih ditemukannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu, penanganan pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial serta rehabilitasi masih belum optimal. Sedangkan tingginya pengangguran disebabkan oleh belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja, belum optimalnya kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan dalam konsep pendidikan vokasi.

3. Belum optimalnya pelayanan publik

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Tata Kelola Pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP belum dilaksanakan dengan baik, belum optimalnya kualitas dan kapasitas fiskal keuangan, belum optimalnya kualitas kepegawaian dalam mendukung Merit Sistem dan belum optimalnya pengawasan pembangunan.

4. Belum optimalnya kualitas lingkungan

Kualitas lingkungan hidup pada tahun 2045 masih menjadi permasalahan. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan

menjadikan jumlah sampah menjadi meningkat, sementara pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu meningkatnya aktivitas perekonomian akan menjadi penyebab meningkatnya pencemaran, udara, air dan berkurangnya tutupan lahan.

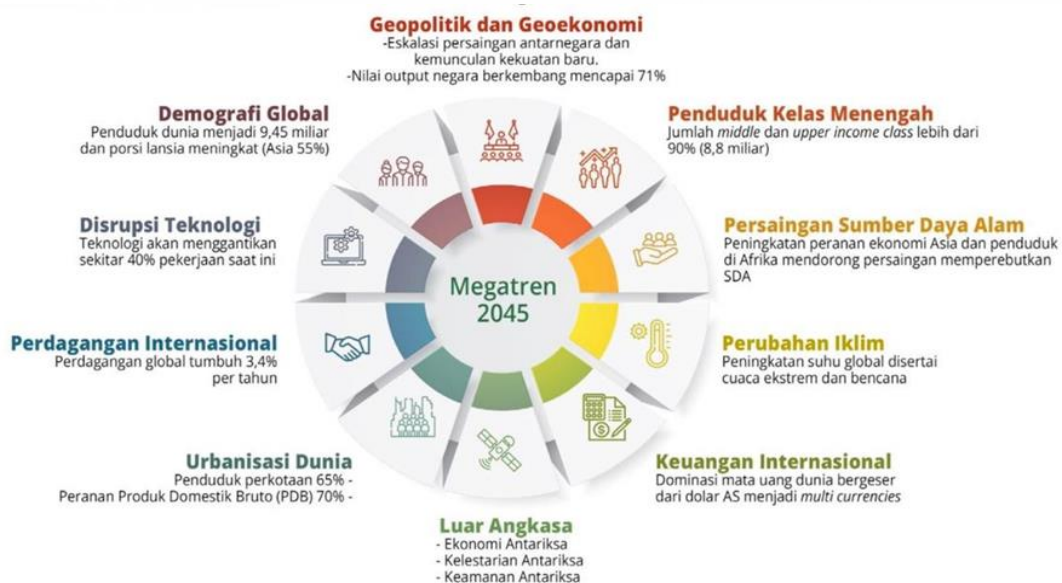
Kondusivitas di Kabupaten Cilacap masih perlu mendapatkan perhatian lebih, hal ini dikarenakan angka kriminalitas yang masih tinggi, salah satunya disebabkan oleh penegakan perda dan perkara yang belum optimal. Selain itu terkait penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan di Kabupaten Cilacap.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (isu global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam RPJPN tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan isu global (global megatrend), sebagai berikut :



Gambar 3.1. Megatrend Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar dikemukakan ringkas berikut ini.

Tabel 3.1**Isu Strategis Internasional**

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55,%); dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait dengan pangan, energi dan air bersih.
2	Geopolitik dan Geoekonomi	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru dari negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3	Disrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan dengan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK).
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada di perkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.
5	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama perdagangan intra-Asia terutama Tiongkok, India dan Negara-negara ASEAN.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Kelas Menengah	Meningkatnya jumlah kelas menengah pada tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta Negara-negara ASEAN
8	Persaingan Sumberdaya Alam	Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, energi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan.
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan RPJPN tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka Panjang nasional yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

Tabel 3.2**Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	Tingkat produktivitas nasional di tengah persaingan global masih relatif rendah kurun waktu 2010-2022 relatif tertinggal dalam persaingan global.
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) dan sumberdaya manusia peneliti belum memadai.
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata alam, budaya dan wisata buatan manusia dan ekonomi kreatif.
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas dan rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah. Tantangan jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pemahaman manfaat jaminan sosial masih kurang.
9. Kemiskinan	Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen tahun 2045, tantangan yang dihadapi adalah akses dan kualitas layanan yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam penanganan kemiskinan.
10. Kesenjangan Antara Jawa dan Luar Jawa	Terdapat kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa. Demikian pula konektivitas domestik dan global, tantangan utama terutama konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	Tantangan pembangunan energi dan lingkungan hidup dan utamanya akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan rendahnya efisiensi energi.
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	Kelembagaan instansi publik bercirikan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	Perkembangan teknologi digital yang dinamis, infrastruktur dan literasi digital belum optimal dan transformasi digital di pemerintahan masih belum optimal.
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	Sistem hukum belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Terkait dengan ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di kawasan perbatasan antar negara.

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- b. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- c. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana
- d. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- e. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat
- f. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Selanjutnya dirumuskan isu strategis Kabupaten Cilacap dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Cilacap

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS KAB. CILACAP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 2. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 3. Perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup 3. Inovasi
<ol style="list-style-type: none"> 4. Kemiskinan 5. Kesehatan 6. Pendidikan 7. Pangan dan gizi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kemiskinan 5. Pengangguran Terbuka 6. Kualitas SDM
<ol style="list-style-type: none"> 8. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tata kelola pemerintahan yang dinamis 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Tata Kelola Pemerintahan

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS KAB. CILACAP
9. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh	7. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	8. Pertumbuhan Ekonomi
10. Gender	5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi	8. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	9. Kualitas SDM
11. Kesenjangan Kota dan Permukiman 12. Infrastruktur 13. Sumberdaya kelautan 14. Energi 15. Air bersih dan sanitasi 16. Ekosistem daratan	6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	9. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	10. Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup 11. Bencana dan Kondusivitas 12. Pemerataan Pembangunan
17. Kemitraan global	7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	10. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	13. Tata Kelola Pemerintahan

3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Cilacap

Penjelasan masing-masing isu strategis daerah Kabupaten Cilacap diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM

Kualitas pembangunan manusia terlihat dari IPM Kabupaten Cilacap walaupun meningkat dari 67,25 pada tahun 2014 menjadi 71,83 pada tahun 2023 tetapi di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan IPM nasional sebesar 74,39 pada tahun 2023.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan, sehingga perlu dipastikan dari sisi kualitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Kualitas SDM yang tinggi dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan yang relevan dapat membuat suatu daerah menjadi lebih produktif dan inovatif.

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pendorong utama kemajuan teknologi dan inovasi. SDM yang kreatif dan berpengetahuan dapat menciptakan solusi baru, teknologi canggih, dan memajukan berbagai sektor. Dibidang ekonomi, kualitas SDM yang baik berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan output, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia yang terdidik memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan dengan migas di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu sepuluh tahun (2014-2023), pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas sebesar 5,34 persen, sementara tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -1,36 persen. Selanjutnya tahun 2023 meningkat kembali menjadi 5,76 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak, dimana kontribusi industri minyak terhadap PDRB secara total mempunyai andil yang cukup besar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -10,28 persen. Sedangkan tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami peningkatan menjadi 5,34 persen.

Struktur perekonomian Cilacap selama lima tahun terakhir (2018-2022) didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; serta jasa pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19. Pada tahun 2014 PDRB ADHB dengan



migas sebesar 92.025.901,06 juta rupiah menjadi 132.425.323,93 juta rupiah di tahun 2023. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tanpa migas Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB ADHB tanpa migas sebesar 44.419.642,04 juta rupiah menjadi 85.078.735,21 juta rupiah di tahun 2023.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan migas Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19. Pada tahun 2014 PDRB ADHK dengan migas sebesar 83.391.500,18 juta rupiah menjadi 101.839.740,58 juta rupiah di tahun 2023. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tanpa migas Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB ADHK tanpa migas sebesar 36.693.888,99 juta rupiah menjadi 54.182.307,44 rupiah di tahun 2023.

Pengembangan potensi ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan karena memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan dan kesejahteraan suatu wilayah. Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pengembangan potensi ekonomi daerah tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerataan infrastruktur wilayah perlu ditingkatkan mengingat akan berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pemerataan infrastruktur membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang maju dan yang kurang berkembang. Hal ini akan membantu memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dan sosial didistribusikan secara merata. Infrastruktur yang merata meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, memudahkan perpindahan orang dan barang. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di daerah

yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerataan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah kurang berkembang dengan membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam bidang sosial, infrastruktur yang merata memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun demikian pembangunan infrastruktur harus terencana dengan baik, sehingga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

3. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap. Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode tahun 2014-2023 mengalami fluktuatif dan tren meningkat, pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cilacap sebesar 5,65% terus menurun sampai tahun 2019 sebesar 7,31%. Namun, meningkat menjadi sebesar 9,1% pada tahun 2020 dan 9,97% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak pekerja yang diberhentikan. Selain itu banyaknya usaha (terutama UMKM) yang terdampak bahkan gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 9,62% dan kembali menurun menjadi 8,74% di tahun 2023.

Ke depan penanganan pengangguran menjadi isu penting, memerlukan upaya penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja. Pengangguran terjadi karena masih belum adanya *link and match* antara pendidikan dengan permintaan pasar. Selain itu penduduk usia produktif yang tidak memiliki keterampilan, menjadi pekerja migran Indonesia. Pengurangan pengangguran perlu dilakukan dengan melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kemiskinan

Besarnya Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 sebesar 14,21% menurun menjadi 11,46% pada tahun 2020, dan pada tahun 2023 turun kembali menjadi 10,99%. Jika dibandingkan dengan Persentase

Penduduk Miskin di Provinsi Jawa tengah dan Nasional, capaian Kemiskinan Kabupaten Cilacap relatif lebih tinggi.

Pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan campur tangan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait. Pengurangan kemiskinan sangat penting mengingat kemiskinan sangat terkait dengan kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi. Pengurangan kemiskinan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat, air bersih, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dapat membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan mendorong peningkatan literasi. Pengurangan kemiskinan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi individu dan komunitas yang terkena dampak. Hal ini dapat mencakup peluang pekerjaan yang lebih baik, kewirausahaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Kemiskinan juga terkait dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, masyarakat dapat mencapai tingkat keamanan yang lebih baik karena individu cenderung lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi daripada kegiatan ilegal.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Isu tata kelola pemerintahan di kabupaten Cilacap salah satunya terkait demokrasi substansial. Demokrasi substansial adalah ketika pemerintahan melaksanakan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Substansi demokrasi tak hanya berkenaan dengan aspek politik, juga terkait ekonomi dan sosial budaya. Asumsinya, jika keadaan ekonomi dan sosial suatu negara baik, otomatis akan diikuti pula kemajuan politik. Substansi demokrasi yang kita sebut tujuan akhir demokrasi (kesejahteraan), minimal dapat diukur dari kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan suatu daerah.

Selain demokrasi substansial, reformasi birokrasi juga menjadi hal penting dalam isu strategis di Kabupaten Cilacap. Reformasi birokrasi merupakan serangkaian langkah dan perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah

menciptakan sistem yang lebih responsif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pencapaian Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 baru mencapai kategori BB, sehingga ke-depan perlu ditingkatkan.

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

6. Inovasi

Riset dan inovasi menjadi permasalahan dan tantangan dalam 20 tahun ke depan. Era digitalisasi adalah masa di mana semua akan berbasis teknologi dan inovasi. Isu yang muncul hari ini adalah riset yang dilakukan belum mampu mendongkrak inovasi didaerah dan belum mampu mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

7. Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Cilacap masih rendah, terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 baru mencapai 65,66. Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada kesehatan manusia. Lingkungan hidup yang sehat mendukung keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang sehat mendukung pertanian yang berkelanjutan dan produksi pangan yang mencukupi. Ekosistem yang alami berperan dalam melindungi dari bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan badai. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

8. Pemerataan Pembangunan

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas yaitu 2.249,28 Km² (namun tidak termasuk Pulau Nusakambangan seluas 115,00 Km²) atau sekitar 6,48% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan luas Propinsi Jawa Tengah seluas 32.544,1 km² yang berarti rata-rata luas kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah adalah 929,83 km², ini berarti luas Kabupaten Cilacap lebih dari 2 (dua) kali lipat luas rata-rata kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 152 Km, dari tepi Kecamatan Dayeuhluhur sampai tepi Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan berjarak terjauh 35 Km dari tepi Kecamatan Cilacap kota sampai tepi Kecamatan Sampang. Luasnya geografi Kabupaten Cilacap ini berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat serta memunculkan isu kurangnya pemerataan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur.

9. Bencana Dan Kondusivitas

Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan potensi rawan bencana. Sarana dan prasarana belum memadai dalam rangka melakukan evakuasi maupun rehab rekon. SDM juga belum memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sarpras yang dimiliki. Kabupaten Cilacap memiliki kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan data dari BNPB, Kabupaten Cilacap memiliki indeks kerawanan tertinggi di Jawa Tengah, sedangkan berdasarkan di tingkat nasional Kabupaten Cilacap masuk urutan 439 se-Indonesia dengan skor terakhir di tahun 2023 sebesar 96,93 (kelas risiko sedang).

Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya menarik investor sebagai bagian dari upaya menumbuhkan perekonomian daerah. Salah satunya dengan menawarkan kondusivitas wilayah kepada calon investor. Kondusivitas sangat penting untuk tetap terjaga agar masyarakat tetap produktif menjalankan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya kondusivitas wilayah di Kabupaten Cilacap dapat dilihat dari jumlah kejadian konflik SARA.

3.2.5. Keselarasan Isu Strategis RPJPD dengan KLHS RPJPD

Tabel 3.4
Keselarasn Isu Strategis RPJPD dengan KLHS RPJPD

No	Permasalahan Terkait Capaian Indikator & Kondisi Lingkungan	Isu Strategis KLHS	Isu Utama KLHS	Isu Strategis RPJPD
1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 2) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 3) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 4) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 5) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 6) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 	Belum optimalnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap ancaman terkait perubahan iklim dan bencana alam	Belum optimalnya pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup Bencana dan Kondusivitas
2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 2) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru 3) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 4) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 	Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 2) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 	Belum optimalnya kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam	Belum optimalnya pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 2) Rasio elektrifikasi 3) Konsumsi listrik per kapita 4) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga 5) Rasio penggunaan gas rumah tangga. 6) Bauran energi terbarukan. 7) Intensitas energi primer. 	Belum Optimalnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
5	<ol style="list-style-type: none"> 1) Panjang pembangunan jalan tol. 2) Jumlah dermaga penyeberangan. 3) Jumlah pelabuhan strategis. 4) Jumlah pelabuhan strategis. 	Belum Optimalnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Pertumbuhan ekonomi terkait dengan aksesibilitas (jalan dan transportasi)

No	Permasalahan Terkait Capaian Indikator & Kondisi Lingkungan	Isu Strategis KLHS	Isu Utama KLHS	Isu Strategis RPJPD
6	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 2) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 	Belum Optimalnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Pertumbuhan ekonomi terkait dengan aksesibilitas
7	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 2) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 3) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 	Belum Optimalnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Pertumbuhan ekonomi terkait dengan aksesibilitas (jalan dan transportasi)
8	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 3) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 4) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Pelayanan Air minum (SPAM) dan sumber daya air	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
9	<ol style="list-style-type: none"> 1) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 2) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 3) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 4) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 5) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 6) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan 7) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah 8) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya 	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Pelayanan Air minum (SPAM) dan sumber daya air	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Permasalahan Terkait Capaian Indikator & Kondisi Lingkungan	Isu Strategis KLHS	Isu Utama KLHS	Isu Strategis RPJPD
	9) Jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1% 10) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya 11) Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi. 12) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya			
10	1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 3) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 4) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Belum optimalnya pengelolaan air limbah, persampahan, limbah B3 dan B3	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
11	1) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 2) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Belum optimalnya pengelolaan air limbah, persampahan, limbah B3 dan B3	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
12	1) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Belum optimalnya pengelolaan air limbah, persampahan, limbah B3 dan B3	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar	Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
13	1) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. 2) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. 3) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 4) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 5) Rata-rata jarak Lembaga keuangan	Belum optimalnya pengembangan perekonomian	Belum optimalnya perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan ekonomi
14	1) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 2) Jumlah wisatawan mancanegara. 3) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Belum optimalnya daya saing pariwisata	Belum optimalnya perekonomian daerah yang	Pertumbuhan ekonomi



No	Permasalahan Terkait Capaian Indikator & Kondisi Lingkungan	Isu Strategis KLHS	Isu Utama KLHS	Isu Strategis RPJPD
	4) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		berbasis potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	
15	1) Persentase tenaga kerja formal. 2) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 3) Upah rata-rata per jam pekerja. 4) Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 5) Tingkat setengah pengangguran. 6) Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Belum optimalnya Pembinaan ketenagakerjaan daerah	Belum optimalnya perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	Tingkat Pengangguran Terbuka
16	1) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 2) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 3) Prevalensi tekanan darah tinggi. 4) Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 5) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 6) Unmet need pelayanan kesehatan. 7) Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 8) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 9) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 10) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan, Keluarga Berencana, serta ketahanan pangan dan gizi	Belum Optimalnya pengembangansumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri	Kualitas SDM
17	1) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan, Keluarga Berencana, serta ketahanan pangan dan gizi	Belum Optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri	Kualitas SDM
18	1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Belum optimalnya pelayanan pendidikan	Belum Optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang	Kualitas SDM

No	Permasalahan Terkait Capaian Indikator & Kondisi Lingkungan	Isu Strategis KLHS	Isu Utama KLHS	Isu Strategis RPJPD
	5) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri	
19	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 2) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 3) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 4) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. 5) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 	Belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Belum Optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri	Kualitas SDM
20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 2) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. 3) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 4) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. 5) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 6) Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas 7) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 8) Koefisien Gini 	<p>Belum optimalnya pengentasan kemiskinan</p> <p>Belum Optimalnya perlindungan Sosial</p>	Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum	Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka
21	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 2) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. 3) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 4) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 	Belum optimalnya kondusivitas dan keamanan serta perlindungan hukum masyarakat	Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum	<p>Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Bencana dan Kondusivitas</p>

No	Permasalahan Terkait Capaian Indikator & Kondisi Lingkungan	Isu Strategis KLHS	Isu Utama KLHS	Isu Strategis RPJPD
	<ul style="list-style-type: none"> 5) Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 6) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 			
22	<ul style="list-style-type: none"> 1) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 2) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 3) Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. 4) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 5) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. 6) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 7) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 8) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 9) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). 10) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Tata Kelola Pemerintahan Inovasi
23	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. 2) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband 3) Proporsi individu yang menggunakan internet. 4) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. 5) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). 	Belum optimalnya pelayanan teknologi informasi	Belum optimalnya tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Tata Kelola Pemerintahan Inovasi

BAB IV

VISI MISI

4.1. VISI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis di daerah. Visi merupakan rumusan yang dapat menggambarkan cita cita yang akan dicapai dan dapat terukur.

Visi Kabupaten Cilacap tahun 2025–2045 selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Jawa Tengah 2045. Visi Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas 2045 : **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Negara **Berdaulat** adalah negara yang memiliki ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Negara **Maju** dalam dokumen RPJPN diartikan sebagai negara yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil. Sedangkan negara **Berkelanjutan** adalah Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 adalah **Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan Dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan**. Jawa Tengah **Penumpu Pangan dan Industri Nasional** adalah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional. Jawa Tengah **Maju** adalah berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi kontribusi pihak lain, kerja sama dengan daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis). Jawa Tengah **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. Jawa Tengah **Berbudaya** adalah masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor. Jawa Tengah **Berkelanjutan** adalah menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Visi Kabupaten Cilacap disusun berdasarkan masalah pokok Kabupaten Cilacap yang telah dirumuskan. Berikut ini permasalahan pokok yang mendasari tersusunnya Visi Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.1
Visi Kabupaten Cilacap 2025-2045

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Pertumbuhan ekonomi, Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Lingkungan Hidup yang belum BERDAYA SAING	Daya Saing	CILACAP PENDUKUNG PANGAN JAWA TENGAH YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN
2	Pemanfaatan Teknologi, inovasi dalam pelaksanaan pembangunan yang belum optimal menyebabkan Kabupaten Cilacap Belum MAJU	Maju	
3	Masih belum optimalnya tingkat kesejahteraan apabila dilihat masih tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	Sejahtera	
4	Belum optimalnya kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan kondusivitas wilayah sehingga KEBERLANJUTAN belum optimal	Berkelanjutan	
5	Potensi Unggulan Kabupaten Cilacap adalah Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan. Industri pengolahan lebih pada industri besar dengan padat modal, sementara industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan belum optimal dikembangkan dalam rangka mendorong perekonomian daerah.	Cilacap Pendukung Pangan Jawa Tengah	

Rumusan Visi Kabupaten Cilacap berdasarkan masalah utama dan telaah Visi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
CILACAP 2045:

“CILACAP PENDUKUNG PANGAN JAWA TENGAH YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

Penjelasan Visi Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

Cilacap Pendukung Pangan Jawa Tengah

Kabupaten Cilacap memiliki potensi pertanian dalam arti luas yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan Jawa Tengah di 2045. Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi industri pengolahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Industri pengolahan ini diarahkan pada pengembangan modernisasi dan hilirasasi pertanian dan perikanan. Kondisi ini sejalan dengan Visi Provinsi Jawa Tengah sebagai penopang pangan Nasional.



Berdaya Saing

Berdaya saing adalah Kabupaten yang memiliki SDM yang berkarakter dan mampu mengembangkan potensi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki kualitas pendidikan baik *hard skill* maupun *soft skill*, kualitas kesehatan yang baik, SDM yang setara (tidak timpang laki laki dan perempuan) serta SDM yang selalu memegang teguh nilai kegotongroyongan, dan budaya Indonesia. SDM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kemandirian pangan serta SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri di Kabupaten Cilacap, sehingga mampu mengurangi pengangguran.

Maju

Maju adalah Kabupaten yang modern dengan pemanfaatan teknologi, penguatan inovasi sehingga mampu mencapai pembangunan yang dicita-citakan.

Sejahtera

Sejahtera adalah Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta berkurangnya ketimpangan pendapatan.

Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah Menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan Cilacap dengan Nasional berikut ini keterkaitan antara Visi Nasional dengan Visi Cilacap dalam RPJPD 2025-2045:

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Cilacap dengan RPJPN 2045

INDONESIA EMAS 2045	CILACAP 2045
NKRI yang BERDAULAT, MAJU dan BERKELANJUTAN	CILACAP PENDUKUNG PANGAN JAWA TENGAH YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN
Berdaulat: Yaitu negara yang memiliki ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman	Berdaulat bukan kewenangan kabupaten



INDONESIA EMAS 2045	CILACAP 2045
Maju adalah negara yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil	Berdaya Saing : Kabupaten yang memiliki SDM yang berkarakter dan mampu mengembangkan potensi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki kualitas pendidikan baik <i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i> , kualitas kesehatan yang baik, SDM yang setara (tidak timpang laki laki dan perempuan) serta SDM yang selalu memegang teguh nilai kegotongroyongan, dan budaya Indonesia. SDM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kemandirian pangan serta SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri di Kabupaten Cilacap, sehingga mampu mengurangi pengangguran.
	Maju: Kabupaten yang modern dengan pemanfaatan teknologi, penguatan inovasi sehingga mampu mencapai pembangunan yang dicita-citakan.
	Sejahtera : Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta berkurangnya ketimpangan pendapatan.
Berkelanjutan: lestari, dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan	Keberlanjutan: Menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan Cilacap dengan Provinsi Jawa Tengah berikut ini keterkaitan antara Visi Provinsi Jawa Tengah dengan Visi Cilacap dalam RPJPD 2025-2045:

Tabel 4.3
Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Cilacap dengan RPJP
Provinsi Jawa Tengah 2045

JAWA TENGAH 2045	CILACAP 2045
JAWA TENGAH SEBAGAI PENUMPUNGAN PANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL YANG MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN	CILACAP PENDUKUNG PANGAN JAWA TENGAH YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN
Penumpu Pangan dan Industri Nasional : Jawa Tengah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional	Pendukung Pangan Jawa Tengah: Kabupaten Cilacap memiliki potensi pertanian dalam arti luas yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan



JAWA TENGAH 2045	CILACAP 2045
	Jawa Tengah di 2045. Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi industri pengolahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Industri pengolahan ini diarahkan pada pengembangan modernisasi dan hilirasasi pertanian dan perikanan. Kondisi ini sejalan dengan Visi Provinsi Jawa Tengah sebagai penopang pangan Nasional.
Berbudaya: Masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor	Berdaya Saing : Kabupaten yang memiliki SDM yang berkarakter dan mampu mengembangkan potensi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki kualitas pendidikan baik <i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i> , kualitas kesehatan yang baik, SDM yang setara (tidak timpang laki laki dan perempuan) serta SDM yang selalu memegang teguh nilai kegotongroyongan, dan budaya Indonesia. SDM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kemandirian pangan serta SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri di Kabupaten Cilacap, sehingga mampu mengurangi pengangguran.
Maju adalah Berdaya saing berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi serta inovatif	Maju: Kabupaten yang modern dengan pemanfaatan teknologi, penguatan inovasi sehingga mampu mencapai pembangunan yang dicita-citakan.
Sejahtera: Suatu kondisi yang menunjukkan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan.	Sejahtera : Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta berkurangnya ketimpangan pendapatan.
Berkelanjutan: Menjaga kesejahteraan sumber daya alam, ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, dan lingkungan hidup serta ketahanan terhadap risiko bencana	Keberlanjutan: Menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

Pencapaian Kabupaten Cilacap yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, sebagai berikut :

1. **Sasaran pertama**, terwujudnya perekonomian yang berkualitas dan merata, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita.



2. **Sasaran kedua**, terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen. Kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap.
3. **Sasaran ketiga**, terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan dinamis sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung implementasi pencapaian pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dan dinamis diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.
4. **Sasaran keempat**, kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Kualitas hidup berkarakter dan berdaya saing dicerminkan dari terjaminnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang merata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dari indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat sampai dengan tahun 2045.
5. **Sasaran kelima**, Kualitas lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan mendukung sasaran pembangunan berkelanjutan nasional sekaligus visi yang ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Tabel 4.4
Sasaran Visi Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045

Jawa Tengah		Kabupaten Cilacap							
Sasaran Visi	Indikator Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target			
						2025 - 2029	2030-2034	2035 - 2039	2040-2045
Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB Per kapita	Perekonomian yang berkualitas dan merata	Pertumbuhan ekonomi	%	5,77	5,84	6,05	6,27	6,99
	2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia		PDRB Perkapita	Juta Rupiah/ tahun	71,37	82,88	109,77	165,68	349,74
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	3. Kontribusi PDRB Sektor Industri	Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat	Tingkat Kemiskinan	%	10,14	8,15	6,32	2,59	0,48
	1. Tingkat Kemiskinan								
	2. Rasio Gini								
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi	Birokrasi yang akuntabel dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,51	79,01	80,92	82,88	85,00
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,91	74,44	76,35	78,19	80,31
Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK	Kualitas lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan	Penurunan emisi GRK	TonCO ₂ eq	323.855,88	4.308.697,31	10.053.627,05	18.671.021,67	28.724.648,72

4.2. MISI DAERAH

Perumusan Misi Kabupaten Cilacap tahun 2025-2045 berdasarkan permasalahan dan Visi 2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5
Rumusan Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045**

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Usulan Misi
1	Pertumbuhan ekonomi, Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Lingkungan Hidup yang belum BERDAYA SAING	CILACAP PENDUKUNG PANGAN JAWA TENGAH YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	Pertumbuhan ekonomi dan Kualitas SDM yang belum Berdaya Saing	1. Ekonomi Berkualitas, Merata
2	Masih belum optimalnya Tingkat Kesejahteraan apabila dilihat masih tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan		Belum optimalnya tingkat kesejahteraan	2. SDM Berdaya Saing
3	Pemanfaatan Teknologi, inovasi dalam pelaksanaan pembangunan yang belum optimal menyebabkan Kabupaten Cilacap Belum MAJU		Belum optimalnya pelayanan publik	3. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
4	Belum optimalnya kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan kondusivitas wilayah sehingga KEBERLANJUTAN belum optimal		Belum optimalnya kualitas lingkungan	4. Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel
				5. Lingkungan Kondusif dan Berkelanjutan

Berikut ini Misi dan pengertian Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cilacap 2025-2045:

1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata

Misi ini memiliki pengertian bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan pengembangan potensi produk unggulan dan lapangan usaha potensi dalam PDRB, penguatan infrastruktur yang mempercepat pembangunan ekonomi, membuka aksesibilitas pada daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi dengan memperhatikan pengembangan daerah dan Provinsi perbatasan. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan perencanaan pengembangan kawasan dalam dokumen RTRW. Pembangunan ekonomi ini harus bisa mendorong peran serta seluruh stakeholder (inklusi/kelompok rentan) dan seluruh wilayah.

Desa juga memiliki peran dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata. Pengembangan riset, dan inovasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi yang berkualitas.

2. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing

Misi ini memiliki pengertian bahwa Sumberdaya Manusia merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan. SDM yang memiliki karakter, SDM yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai budaya dan kegotoroyongan menjadi tujuan pembangunan. Dalam misi ini SDM yang berdaya saing juga SDM yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan literasi yang baik, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Lansia sebagai bonus demografi memiliki jumlah yang tinggi pada perjalanan 20 tahun ke depan. Mendorong kualitas Lansia yang produktif dan sehat adalah tujuan dari daya saing SDM. Pemahaman riset dan inovasi juga harus dimiliki oleh SDM yang berdaya saing.

3. Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Misi ini memiliki pengertian bahwa peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat meliputi perlindungan perempuan dan anak, jaminan sosial dan perlindungan sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan kebutuhan dasar (rumah layak huni, penanganan kumuh) pada penduduk miskin, jaminan keterampilan, kompetensi tenaga dan perlindungan tenaga kerja. Kewilayahan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Dinamis

Misi ini memiliki pengertian bahwa tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan dinamis meliputi implementasi demokrasi substansi, perwujudan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas perencanaan, pemantapan Merit Sistem dan peningkatan pengawasan pembangunan.

5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan

Misi ini memiliki pengertian perwujudan kualitas lingkungan meliputi lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari pengaruh perubahan iklim meliputi kualitas udara, air dan tutupan lahan. Pengelolaan sampah juga menjadi fokus pada misi ini. Peningkatan jumlah penduduk dan proses produksi dalam pembangunan ekonomi memberikan dampak pada peningkatan produksi sampah. Peningkatan akses pada sanitasi, air bersih juga

menjadi fokus pada misi ini. Kualitas lingkungan sosial yang nyaman tanpa kriminalitas adalah fokus pada misi ini. Kabupaten Cilacap akan menjadi kabupaten yang tangguh bencana (*resiliensi*) dengan fokus pada penguatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana.

Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Cilacap :

Tabel 4.6
Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dengan Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045

No.	MISI NASIONAL	MISI JAWA TENGAH	MISI KABUPATEN CILACAP
1	Transformasi Sosial 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Perlindungan Sosial	Transformasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Berdaya Saing • Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
2	Transformasi Ekonomi 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 2. Penerapan Ekonomi Hijau 3. Transformasi Digital 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Ekonomi Berkualitas dan Merata
3	Transformasi Tata Kelola Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Tata Kelola yang Akuntabel
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia 1. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 2. Stabilitas Ekonomi Makro 3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 1. Beragama maslahat dan Berbudayaan Maju 2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif 3. Lingkungan Hidup Berkualitas 4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan



No.	MISI NASIONAL	MISI JAWA TENGAH	MISI KABUPATEN CILACAP
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Infrastruktur Menjadi Prioritas dalam Perwujudan Semua Misi
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Lingkungan Yang Kondusif dan Berkelanjutan
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Kestinambungan Pembangunan	Ekonomi Berkualitas dan Merata

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

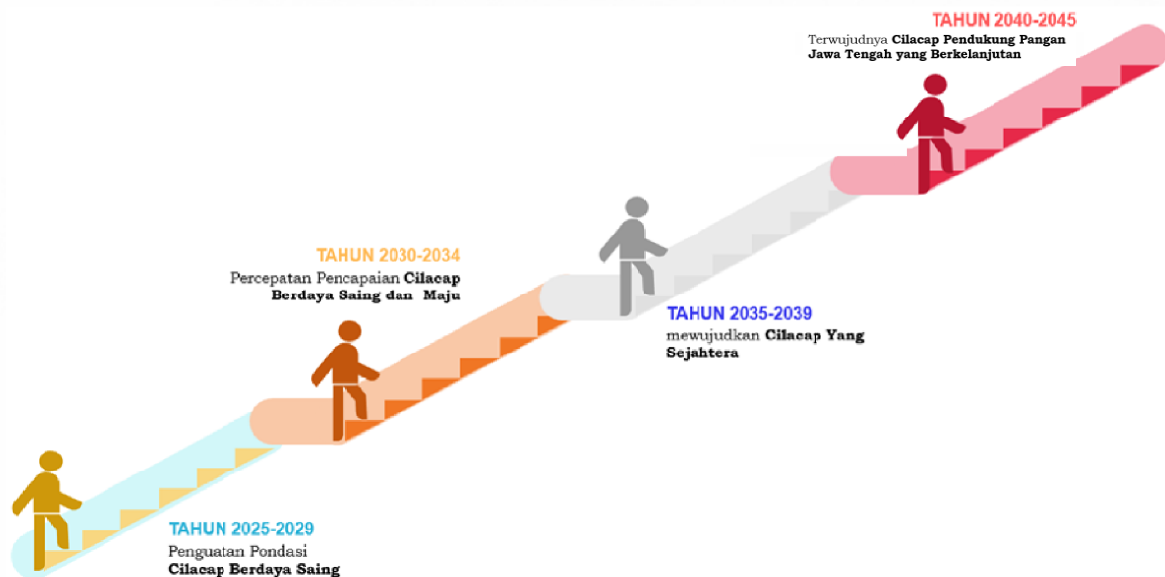
Tahap pertama tahun 2025-2029 tujuan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Cilacap diarahkan untuk Penguatan **Pondasi Cilacap Berdaya Saing**. Tahap ini sejalan dengan tahap pertama RPJPN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu Penguatan Pondasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Cilacap memperkuat pondasi daya saing yang diarahkan pada penguatan daya saing sumberdaya manusia, daya saing pembangunan ekonomi, dan daya saing tata kelola pemerintahan menuju kemandirian pangan.

Tahap kedua tahun 2030-2034 tujuan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Cilacap diarahkan untuk Percepatan Pencapaian **Cilacap Berdaya Saing dan Maju**. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Akselerasi Transformasi. Pada tahap ini semua program pembangunan diakselerasi dengan melalui pemanfaatan teknologi, memperkuat riset, dan pengembangan inovasi. Harapannya pada tahap ini **Cilacap Berdaya Saing dan Maju** diarahkan pada modernisasi dan hilirisasi industri yang mendorong kemandirian pangan.

Tahap ketiga tahun 2035-2039 tujuan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Cilacap diarahkan untuk mewujudkan **Cilacap Yang Sejahtera**. Tahap ini sejalan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Ekspansi Globalisasi. Ekspansi dan Globalisasi akan mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap karena terdapat peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan. Sektor unggulan di pertanian dan perikanan semakin mantap mencapai kemandirian pangan 2045.

Tahap keempat tahun 2040-2045 tujuan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Cilacap diarahkan untuk mewujudkan **Cilacap Pendukung Pangan Jawa Tengah yang Berkelanjutan** ini sejalan dengan

RPJPN Indonesia Emas. Kondisi ini akan menunjukkan bahwa Cilacap akan menjadi Kabupaten yang mendukung pangan di Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 5.1.
Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Cilacap 2025 - 2045

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

1) **Tahun 2025-2029**

Fokus arah pembangunan daerah yang berdaya saing adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan suatu daerah dalam berbagai aspek, sehingga dapat bersaing secara efektif dengan daerah lain. Ini melibatkan beberapa elemen utama:

- a. **Pengembangan Ekonomi:** Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini bisa mencakup pengembangan sektor industri, pariwisata, pertanian, dan sektor lainnya yang potensial.
- b. **Infrastruktur:** Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, air bersih, dan infrastruktur digital yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- c. **Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja agar lebih kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja regional maupun global.
- d. **Teknologi dan Inovasi:** Mengadopsi teknologi modern dan mendorong inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- e. **Lingkungan Hidup:** Memastikan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem.

- f. **Kebijakan dan Regulasi:** Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim investasi dan bisnis yang kondusif serta melindungi kepentingan masyarakat.
- g. **Kesejahteraan Sosial:** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya yang berkualitas.

Dengan fokus pada elemen-elemen tersebut, suatu daerah dapat meningkatkan daya saingnya, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tahap Pembangunan Tahun 2025-2029 yaitu **Penguatan Pondasi Cilacap Berdaya Saing**. Pada periode ini untuk **mewujudkan pembangunan ekonomi berkualitas dan merata**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan pondasi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan memperkuat pondasi pencapaian kemandirian pangan dengan mendorong hilirisasi produksi pertanian, dan perikanan. Hilirisasi produk pertanian sebagai pendorong nilai tambah pertanian dalam arti luas, sudah dimulai ditahap ini, penguatan pondasi agroindustri. Penguatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagai potensi unggulan daerah. Penguatan sarana prasarana pertanian dalam pencapaian agroindustri, penguatan ketersediaan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan. Mendorong ketaatan pada lahan pertanian berkelanjutan untuk mencapai produktivitas pertanian.
- 2) Penguatan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan ketersediaan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
- 3) Penguatan potensi unggulan pembangunan ekonomi di bidang pariwisata, mendorong kolaborasi program dalam pengembangan destinasi, sarana akomodasi dan restoran. Mendorong Kerjasama antar daerah.
- 4) Penguatan pondasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing. Mendorong penyusunan kebijakan sektor pariwisata serta pendidikan dan pelatihan yang mendukung ketrampilan kreatif. Mendorong promosi produk kreatif secara lokal maupun internasional, membangun kemitraan antara industri kreatif dengan sektor lain serta mendorong integrasi teknologi dalam produksi kreatif.

- 5) Penguatan pelaku usaha yang memiliki produk unggulan potensi ekspor, penguatan riset dan teknologi dalam mendorong kualitas produk unggulan potensi ekspor.
- 6) Penguatan kualitas kewirausahaan pada masyarakat untuk mendorong daya saing pembangunan perekonomian, penguatan pasar serta mempermudah akses permodalan.
- 7) Penguatan pemanfaatan riset dan teknologi pada rekayasa pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 8) Penguatan pondasi pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.
- 9) Penguatan kawasan peruntukan industri dan kluster industri ke arah ekonomi hijau dengan memprioritaskan pada sektor industri pengolahan.
- 10) Memperkuat jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas jalan menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan pariwisata. Memperkuat jaringan transportasi wilayah yang memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Penguatan jejaring kerjasama antar kabupaten dan nasional dalam pengembangan jaringan transportasi baik angkutan darat, sungai, maupun perkeretaapian.

Dalam rangka **mewujudkan SDM berdaya saing**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan daya saing pendidikan melalui peningkatan manajemen dan mutu pendidikan, mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mewujudkan sekolah vokasi, digitasilisasi pendidikan, mendorong sekolah kesetaraan, dan peningkatan peran lintas sektor dalam mendorong terwujudnya pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.
- 2) Penguatan daya saing kesehatan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan penyelesaian stunting dan eliminasi TBC, penurunan incident rate DBD serta perwujudan Universal Health Coverage (UHC). Penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental. Pengendalian Laju dan Pertumbuhan penduduk melalui penguatan perencanaan keluarga bahagia, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS yang memiliki risiko tinggi atas kelahiran. Penguatan riset dan inovasi dalam mendorong kualitas pelayanan kesehatan serta literasi.

- 3) Penguatan SDM yang berkarakter dan berbudaya, serta nilai-nilai kegotongroyongan.

Dalam rangka **mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan kebijakan berbasis data kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin. Penguatan kolaborasi dalam penanganan kemiskinan, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui kewirausahaan.
- 2) Penguatan kesetaraan dan ketidakadilan gender meliputi pengurangan ketimpangan gender dengan fokus pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan TPPO, pemenuhan hak anak dan pengarusutamaan gender.
- 3) Penguatan peran Potensi, dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penguatan Kolaborasi lintas sektor dan stakeholder. Penguatan kompetensi calon tenaga kerja, mendorong keterpaduan antara pendidikan dan peluang kerja, menciptakan pendidikan vokasi, penguatan investasi padat karya dan kolaborasi sinergitas dengan perangkat daerah dalam penanganan pengangguran. Penguatan kerjasama dengan kawasan industri di daerah sekitar dan Provinsi daerah perbatasan. Penguatan kualitas kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan penguatan perlindungan PMI.
- 4) Penguatan kualitas pembangunan desa dengan fokus pada pemerataan pembangunan, sinergitas anggaran desa dengan prioritas kabupaten, dan penguatan akuntabilitas pembangunan desa.

Dalam rangka **mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel dan dinamis**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja, penguatan pengelolaan asset daerah, efisiensi dan efektifitas program kegiatan.
- 2) Penguatan pencapaian Merit System melalui peningkatan kompetensi ASN, penguatan tata kelola kepegawaian dan mendorong perilaku ASN yang lebih berkinerja dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi untuk mendukung demokrasi substansial.

- 3) Penguatan kapasitas keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
- 4) Penguatan reformasi hukum.
- 5) Penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.
- 6) Penguatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan berbasis teknologi.

Dalam rangka **mewujudkan kualitas lingkungan kondusif dan berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan peran masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah dalam konsep ekonomi Sirkuler.
- 2) Penguatan digitalisasi pengendalian kualitas air, udara dan tanah dari pencemaran.
- 3) Penguatan pelaksanaan penggunaan bahan baku rendah karbon.
- 4) Penguatan sistem penanggulangan bencana melalui peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi serta pemberdayaan masyarakat.
- 5) Penguatan keamanan dan ketertiban wilayah.
- 6) Percepatan penanganan permukiman kumuh.
- 7) Percepatan perluasan jangkauan sanitasi dan air bersih aman.

2) Tahun 2030-2034

Fokus arah pembangunan daerah yang maju adalah upaya untuk menciptakan daerah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Berikut adalah beberapa elemen utama dari fokus pembangunan daerah yang maju:

- a. Pengembangan Ekonomi yang Inklusif:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup diversifikasi ekonomi, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menarik investasi domestik dan asing.
- b. Pembangunan Infrastruktur:** Meningkatkan dan memperluas infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, air bersih, infrastruktur digital dan infrastruktur lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.
- c. Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Memperbaiki sistem pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memastikan akses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat.
- d. Kesehatan yang Berkualitas:** Meningkatkan layanan kesehatan dengan membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan, serta

memastikan akses yang merata ke layanan kesehatan yang berkualitas.

- e. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
- f. Pengembangan Teknologi dan Inovasi:** Mendorong adopsi teknologi baru dan inovasi dalam berbagai sektor, baik itu di bidang industri, pertanian, pendidikan, maupun layanan publik.
- g. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung:** Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, iklim investasi yang kondusif, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
- h. Kesejahteraan Sosial:** Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan publik yang baik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perumahan yang layak, serta memperkuat perlindungan sosial.
- i. Pemberdayaan Masyarakat:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan memberikan mereka keterampilan, pengetahuan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan.

Dengan fokus pada elemen-elemen tersebut, daerah dapat mencapai kemajuan yang signifikan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tahap Pembangunan Tahun 2030-2034 yaitu **Percepatan Pencapaian Cilacap Berdaya Saing dan Maju**. Pada periode ini untuk **mewujudkan pembangunan ekonomi berkualitas dan merata**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Percepatan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan Maju menuju kemandirian pangan dengan mendorong hilirasasi produk pertanian, dan perikanan.
- 2) Percepatan pelaksanaan industrialisasi pertanian sebagai upaya mendorong nilai tambah produk unggulan menjadi prioritas pada periode ini.
- 3) Percepatan pengembangan destinasi wisata sebagai unggulan pembangunan ekonomi dan pengembangan kualitas ekonomi kreatif.
- 4) Percepatan perluasan jejaring dan pemasaran hasil-hasil pemasaran produk pertanian dan perikanan, kelautan dan UMKM.

- 5) Percepatan pengembangan potensi pelaku usaha yang berorientasi ekspor, percepatan riset dan inovasi dalam mendorong kualitas produk unggulan potensi ekspor.
- 6) Percepatan pemanfaatan riset dan teknologi pada semua sektor yang memiliki daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 7) Percepatan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, pengembangan industri pengolahan dan percepatan sirkuler ekonomi.
- 8) Percepatan pembangunan ekonomi yang mampu mencapai pembangunan ekonomi hijau. Percepatan pengurangan sampah dari proses produksi/industri dengan menggunakan sistem sirkulasi.
- 9) Percepatan pemantapan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka **mewujudkan SDM berdaya saing**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Percepatan kualitas pendidikan dengan mendorong kerja sama dalam penyelenggaraan Vokasi (LKP), digitalisasi Pendidikan, pengembangan Pendidikan karakter, serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.
- 2) Kesehatan difokuskan pada percepatan peningkatan pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan jiwa, pelayanan lansia dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan riset dan inovasi serta percepatan pengendalian penduduk dalam rangka mendorong keluarga bahagia.
- 3) Percepatan pengembangan teknologi pemajuan kebudayaan.

Dalam rangka **mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Percepatan penanganan kemiskinan melalui penguatan tingkat pendapatan, kolaborasi antar stake holder dan pengurangan beban pengeluaran.
- 2) Percepatan layanan penanganan ketimpangan gender berbasis teknologi dan mendorong percepatan kelurahan/desa ramah terhadap perempuan dan anak.
- 3) Percepatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan kolaborasi penanganan pengangguran dengan investasi.

Memperkokoh kompetensi calon tenaga kerja baik hard skill maupun soft skill serta mendorong digitalisasi bursa kerja.

- 4) Percepatan digitalisasi pembangunan Desa dan mendorong kolaborasi pembangunan desa.

Dalam rangka **mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel dan dinamis**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Percepatan tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja, penguatan pengelolaan asset daerah, efisiensi dan efektifitas program kegiatan.
- 2) Percepatan pencapaian Merit System melalui peningkatan kompetensi ASN, penguatan tata kelola kepegawaian dan mendorong perilaku ASN yang lebih berkinerja dalam rangka mencapai demokrasi substansial.
- 3) Percepatan kapasitas keuangan daerah difokuskan pada intensifikasi dan ekstentifikasi peningkatan pendapatan asli daerah.
- 4) Percepatan implementasi reformasi hukum.
- 5) Percepatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.
- 6) percepatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan berbasis teknologi.

Dalam rangka **mewujudkan kualitas lingkungan kondusif dan berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Percepatan pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah dalam konsep ekonomi sirkuler.
- 2) Percepatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dalam peningkatan lingkungan hidup.
- 3) Percepatan penggunaan bahan baku rendah karbon.
- 4) Percepatan kesiapsiagaan bencana berbasis riset dan inovasi.
- 5) Percepatan keamanan dan ketertiban wilayah berbasis teknologi.
- 6) Pengurangan backlog perumahan dan ketersediaan kawasan layak huni.
- 7) Pemantapan sanitasi dan air bersih aman.

3) Tahun 2035-2039

Fokus arah pembangunan daerah yang sejahtera adalah upaya untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut. Ini

melibatkan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah elemen-elemen utama dari fokus pembangunan daerah yang sejahtera:

a. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi:

- **Penciptaan Lapangan Kerja:** Meningkatkan peluang kerja dengan mendukung pengembangan industri, UMKM, dan sektor informal.
- **Peningkatan Pendapatan:** Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan.

b. Akses terhadap Layanan Dasar:

- **Kesehatan:** Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dengan membangun fasilitas kesehatan yang memadai dan program-program kesehatan masyarakat.
- **Pendidikan:** Memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, serta peningkatan fasilitas dan tenaga pengajar.
- **Perumahan:** Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Pemberdayaan Sosial:

- **Pengentasan Kemiskinan:** Melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.
- **Perlindungan Sosial:** Meningkatkan sistem perlindungan sosial untuk membantu kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
- **Kesejahteraan Keluarga:** Mendorong program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga.

d. Pembangunan Infrastruktur:

Memantapkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik dan infrastruktur lainnya serta infrastruktur digital melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi digital dan inklusi teknologi.

e. Keberlanjutan Lingkungan:

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang.

- **Pelestarian Lingkungan:** Melindungi dan melestarikan lingkungan hidup melalui kebijakan dan program-program yang ramah lingkungan.
- f. Partisipasi Masyarakat:**
- **Keterlibatan Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
 - **Pemberdayaan Komunitas:** Meningkatkan kapasitas komunitas lokal untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri.
- g. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung:**
- **Regulasi Pro-Kesejahteraan:** Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Dengan fokus pada elemen-elemen ini, pembangunan daerah dapat lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari kemajuan dan pertumbuhan yang dicapai.

Tahap Pembangunan Tahun 2035-2039 yaitu **Cilacap Yang Sejahtera**. Pada periode ini untuk **mewujudkan pembangunan ekonomi berkualitas dan merata**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan dalam rangka mendorong kamandirian pangan.
- 2) Pemantapan Industrialisasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4) Pemantapan sarana prasarana perdagangan yang nyaman dan aman dalam rangka pemantapan pertumbuhan ekonomi kawasan.
- 5) Pemantapan riset dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Pemantapan Green Building di Kawasan Industri.
- 7) Pemantapan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam rangka **mewujudkan SDM berdaya saing**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pemantapan pelayanan pendidikan yang berdaya saing dengan perwujudan wajib belajar 13 tahun, dan menguatnya pendidikan karakter.
- 2) Pemantapan kesehatan sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi serta keluarga bahagia.
- 3) Pemantapan pemajuan kebudayaan berbasis literasi yang mampu mendorong pencapaian kesejahteraan.

Dalam rangka **mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pemantapan tingkat pendapatan penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pemantapan pengurangan ketimpangan gender. Isu gender telah terintegrasi pada semua sektor.
- 3) Pemantapan perlindungan dan jaminan sosial dan Pemantapan penanganan pengangguran yang terintegrasi pada semua aspek unggulan daerah.
- 4) Pemantapan sinergitas Desa dan Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka **mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel dan dinamis**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pemantapan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja dan akuntabel.
- 2) Pemantapan kualitas ASN dalam rangka perwujudan demokrasi substansial.
- 3) Pemantapan kapasitas fiskal.
- 4) Pemantapan Reformasi hukum.
- 5) Pemantapan penyelenggaraan SPBE.
- 6) Pemantapan Pelayanan Publik yang berkualitas dan mudah diakses.

Dalam rangka **mewujudkan kualitas lingkungan kondusif dan berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Perwujudan pengurangan sampah sejak di rumah tangga dan menjadi alternatif pembiayaan.
- 2) Perwujudan pemantauan kualitas lingkungan berbasis teknologi.
- 3) Percepatan menuju zero emission.
- 4) Pemantapan masyarakat tangguh bencana.

- 5) Pemantapan kondusivitas wilayah.
- 6) Pemantapan ketersediaan lingkungan hunian yang nyaman dan terjangkau.

4) Tahun 2040-2045

Fokus arah pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah upaya untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan generasi saat ini dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berikut adalah elemen-elemen utama dari fokus pembangunan daerah yang berkelanjutan:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam:

- **Penggunaan Sumber Daya Alam yang Bijak:** Memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab untuk memastikan kelestariannya.
- **Konservasi dan Rehabilitasi:** Melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak atau terdegradasi.

b. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan:

- **Diversifikasi Ekonomi:** Mengembangkan berbagai sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan.
- **Dukungan untuk UMKM:** Memberikan dukungan dan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang.

c. Infrastruktur Ramah Lingkungan:

Membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, penggunaan energi bersih dalam rangka mendukung keberlanjutan.

d. Pengembangan Energi Terbarukan:

- **Energi Bersih:** Meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.
- **Efisiensi Energi:** Mendorong efisiensi energi dalam industri, transportasi, dan rumah tangga.

e. Kesejahteraan Sosial:

- **Keadilan Sosial:** Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- **Perlindungan Sosial:** Memperkuat sistem perlindungan sosial untuk membantu kelompok rentan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

f. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:

- **Pendidikan Berkelanjutan:** Mengintegrasikan pendidikan berkelanjutan dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan.
- **Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan.

g. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung:

- **Kebijakan Pro-Keberlanjutan:** Menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program-program pembangunan.

h. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim:

- **Mitigasi Emisi:** Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai program dan kebijakan.
- **Adaptasi Iklim:** Meningkatkan kapasitas daerah untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan air laut.

Dengan fokus pada elemen-elemen ini, daerah dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, serta memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Tahap Pembangunan Tahun 2040-2045 yaitu **Cilacap Pendukung Pangan Jawa Tengah yang Berkelanjutan**. Pada periode ini untuk **mewujudkan pembangunan ekonomi berkualitas dan merata**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Perwujudan Kabupaten Cilacap yang memiliki kemandirian pangan yang berkelanjutan.
- 2) Perwujudan pembangunan pariwisata yang berbasis pada pengelolaan lingkungan dan ekonomi kreatif berkelanjutan.
- 3) Perwujudan pemerataan pembangunan ekonomi di setiap wilayah terwujud.
- 4) Perwujudan Green Building pada semua pembangunan industri.
- 5) Perwujudan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Dalam rangka **mewujudkan SDM berdaya saing**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Perwujudan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada pemantapan kualitas pendidikan.
- 2) Perwujudan usia harapan hidup yang meningkat dan produktif.
- 3) Perwujudan pemajuan kebudayaan untuk pembangunan.

Dalam rangka **mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Perwujudan Kesejahteraan masyarakat.
- 2) Perwujudan kesetaraan gender.
- 3) Perwujudan pengangguran yang berkurang.
- 4) Perwujudan Desa Mandiri.

Dalam rangka **mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel dan dinamis**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Perwujudan *Good and Clean Governance*.
- 2) Perwujudan *Smart Governance*.

Dalam rangka **mewujudkan kualitas lingkungan kondusif dan berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Perwujudan kualitas lingkungan.
- 2) Perwujudan kabupaten tangguh bencana.
- 3) Perwujudan kondusivitas wilayah.
- 4) Perwujudan terpenuhinya sanitasi dan air bersih aman dan rumah layak huni.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045

Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
CILACAP PENDUKUNG PANGAN JAWA TENGAH YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	EKONOMI BERKUALITAS DAN MERATA	1) Penguatan pondasi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan memperkuat pondasi pencapaian kemandirian pangan dengan mendorong hilirasasi produk pertanian, dan perikanan. 2) Penguatan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan ketersediaan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan. 3) Penguatan potensi unggulan pembangunan ekonomi di bidang pariwisata, mendorong kolaborasi program dalam pengembangan destinasi, sarana akomodasi dan restoran. Mendorong Kerjasama antar daerah. 4) Penguatan pondasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing. Mendorong penyusunan kebijakan sektor pariwisata serta pendidikan dan pelatihan yang mendukung ketrampilan kreatif. Mendorong promosi produk kreatif secara lokal maupun internasional, membangun kemitraan antara industri kreatif dengan sektor lain serta mendorong integrasi teknologi dalam produksi kreatif. 5) Penguatan pelaku usaha yang memiliki produk unggulan potensi ekspor, penguatan riset dan teknologi dalam mendorong kualitas produk unggulan potensi ekspor.	1) Percepatan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan Maju menuju kemandirian pangan dengan mendorong hilirasasi produk pertanian, dan perikanan. 2) Percepatan pelaksanaan industrialisasi pertanian sebagai upaya mendorong nilai tambah produk unggulan menjadi prioritas pada periode ini. 3) Percepatan pengembangan destinasi wisata sebagai unggulan pembangunan ekonomi dan pengembangan kualitas ekonomi kreatif 4) Percepatan perluasan jejaring dan pemasaran hasil-hasil pemasaran produk pertanian dan perikanan, kelautan dan UMKM. 5) Percepatan pengembangan potensi pelaku usaha yang berorientasi ekspor, percepatan riset dan inovasi dalam mendorong kualitas produk unggulan potensi ekspor. 6) Percepatan pemanfaatan riset dan teknologi pada semua sektor yang memiliki daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 7) Percepatan kawasan peruntukan industri yang	1) Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan dalam rangka mendorong kemandirian pangan. 2) Pemantapan Industrialisasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi 4) Pemantapan sarana prasarana perdagangan yang nyaman dan aman dalam rangka pemantapan pertumbuhan ekonomi kawasan. 5) Pemantapan riset dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6) Pemantapan Green Building di Kawasan Industri. 7) Pemantapan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi.	1) Perwujudan Kabupaten Cilacap yang memiliki kemandirian pangan yang berkelanjutan. 2) Perwujudan pembangunan pariwisata yang berbasis pada pengelolaan lingkungan dan ekonomi kreatif berkelanjutan. 3) Perwujudan pemerataan pembangunan ekonomi di setiap wilayah terwujud. 4) Perwujudan Green Building pada semua pembangunan industri. 5) Perwujudan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>6) Penguatan kualitas kewirausahaan pada masyarakat untuk mendorong daya saing pembangunan perekonomian, penguatan pasar serta mempermudah akses permodalan.</p> <p>7) Penguatan pemanfaatan riset dan teknologi pada rekayasa pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>8) Penguatan pondasi pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.</p> <p>9) Penguatan kawasan peruntukan industri dan kluster industri ke arah ekonomi hijau dengan memprioritaskan pada sektor industri pengolahan</p> <p>10) Memperkuat jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas jalan menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan pariwisata. Memperkuat jaringan transportasi wilayah yang memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Penguatan jejaring kerjasama antar kabupaten dan nasional dalam pengembangan jaringan transportasi baik angkutan darat, sungai, maupun perkeretaapian.</p>	<p>ramah lingkungan, pengembangan industri pengolahan dan percepatan sirkuler ekonomi</p> <p>8) Percepatan pembangunan ekonomi yang mampu mencapai pembangunan ekonomi hijau. Percepatan pengurangan sampah dari proses produksi/industri dengan menggunakan sistem sirkulasi.</p> <p>9) Percepatan pemantapan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.</p>		
	SDM BERDAYA SAING	<p>1) Penguatan daya saing pendidikan melalui peningkatan manajemen dan mutu pendidikan, mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mewujudkan sekolah vokasi, digitalisasi pendidikan, mendorong sekolah kesetaraan, dan peningkatan</p>	<p>1) Percepatan kualitas pendidikan dengan mendorong kerja sama dalam penyelenggaraan Vokasi (LKP), digitalisasi Pendidikan, pengembangan Pendidikan</p>	<p>1) Pemantapan pelayanan pendidikan yang berdaya saing dengan perwujudan wajib belajar 13 tahun, dan menguatnya pendidikan karakter.</p>	<p>1) Perwujudan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada pemantapan kualitas pendidikan.</p> <p>2) Perwujudan usia harapan hidup yang</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>peran lintas sektor dalam mendorong terwujudnya pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.</p> <p>2) Penguatan daya saing kesehatan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan penyelesaian stunting dan eliminasi TBC, penurunan incident rate DBD serta perwujudan Universal Health Coverage (UHC). Penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental. Pengendalian Laju dan Pertumbuhan penduduk melalui penguatan perencanaan keluarga bahagia, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS yang memiliki risiko tinggi atas kelahiran. Penguatan riset dan inovasi dalam mendorong kualitas pelayanan kesehatan serta literasi.</p> <p>3) Penguatan SDM yang berkarakter dan berbudaya, serta nilai-nilai kegotongroyongan.</p>	<p>karakter, serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.</p> <p>2) Kesehatan difokuskan pada percepatan peningkatan pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan jiwa, pelayanan lansia dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan riset dan inovasi serta percepatan pengendalian penduduk dalam rangka mendorong keluarga bahagia.</p> <p>3) Percepatan pengembangan teknologi pemajuan kebudayaan.</p>	<p>2) Pemantapan kesehatan sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi serta keluarga bahagia</p> <p>3) Pemantapan pemajuan kebudayaan berbasis literasi yang mampu mendorong pencapaian kesejahteraan</p>	<p>meningkat dan produktif.</p> <p>3) Perwujudan pemajuan kebudayaan untuk pembangunan</p>
	PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<p>1) Penguatan kebijakan berbasis data kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin. Penguatan kolaborasi dalam penanganan kemiskinan, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui kewirausahaan.</p> <p>2) Penguatan kesetaraan dan ketidakadilan gender meliputi pengurangan ketimpangan gender dengan fokus pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan TPPO, pemenuhan</p>	<p>1) Percepatan penanganan kemiskinan melalui penguatan tingkat pendapatan, kolaborasi antar stake holder dan pengurangan beban pengeluaran.</p> <p>2) Percepatan layanan penanganan ketimpangan gender berbasis teknologi dan mendorong percepatan kelurahan/desa ramah terhadap perempuan dan anak.</p>	<p>1) Pemantapan tingkat pendapatan penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2) Pemantapan pengurangan ketimpangan gender. Isu gender telah terintegrasi pada semua sektor.</p> <p>3) Pemantapan perlindungan dan jaminan sosial dan Pemantapan penanganan pengangguran yang terintegrasi pada semua aspek unggulan daerah</p>	<p>1) Perwujudan Kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2) Perwujudan kesetaraan gender.</p> <p>3) Perwujudan pengangguran yang berkurang.</p> <p>4) Perwujudan Desa Mandiri.</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>hak anak dan pengarusutamaan gender.</p> <p>3) Penguatan peran Potensi, dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penguatan Kolaborasi lintas sektor dan stakeholder. Penguatan kompetensi calon tenaga kerja, mendorong keterpaduan antara pendidikan dan peluang kerja, menciptakan pendidikan vokasi, penguatan investasi padat karya dan kolaborasi sinergitas dengan perangkat daerah dalam penanganan pengangguran. Penguatan kerjasama dengan kawasan industri di daerah sekitar dan Provinsi daerah perbatasan. Penguatan kualitas kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan penguatan perlindungan PMI.</p> <p>4) Penguatan kualitas pembangunan desa dengan fokus pada pemerataan pembangunan, sinergitas anggaran desa dengan prioritas kabupaten, dan penguatan akuntabilitas pembangunan desa.</p>	<p>3) Percepatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan kolaborasi penanganan pengangguran dengan investasi. Memperkokoh kompetensi calon tenaga kerja baik hard skill maupun soft skill serta mendorong digitalisasi bursa kerja.</p> <p>4) Percepatan digitalisasi pembangunan Desa dan mendorong kolaborasi pembangunan desa</p>	<p>4) Pemantapan sinergitas Desa dan Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan</p>	
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN AKUNTABEL DAN DINAMIS	<p>1) Penguatan tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja, penguatan pengelolaan asset daerah, efisiensi dan efektifitas program kegiatan.</p> <p>2) Penguatan pencapaian Merit System melalui peningkatan kompetensi ASN, penguatan tata kelola kepegawaian dan mendorong perilaku ASN yang</p>	<p>1) Percepatan tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja, penguatan pengelolaan asset daerah, efisiensi dan efektifitas program kegiatan.</p>	<p>1) Pemantapan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja dan akuntabel</p> <p>2) Pemantapan kualitas ASN dalam rangka perwujudan demokrasi substansial</p> <p>3) Pemantapan kapasitas fiskal.</p>	<p>1) Perwujudan <i>Good and Clean Governance</i>.</p> <p>2) Perwujudan <i>Smart Governance</i></p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>lebih berkinerja dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi untuk mendukung demokrasi substansial</p> <p>3) Penguatan kapasitas keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah</p> <p>4) Penguatan reformasi hukum</p> <p>5) Penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>6) Penguatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan berbasis teknologi</p>	<p>2) Percepatan pencapaian Merit System melalui peningkatan kompetensi ASN, penguatan tata kelola kepegawaian dan mendorong perilaku ASN yang lebih berkinerja dalam rangka mencapai demokrasi substansial</p> <p>3) Percepatan kapasitas keuangan daerah difokuskan pada intensifikasi dan ekstentifikasi peningkatan pendapatan asli daerah</p> <p>4) Percepatan implementasi reformasi hukum</p> <p>5) Percepatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>6) percepatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan berbasis teknologi.</p>	<p>4) Pemantapan Reformasi hukum</p> <p>5) Pemantapan penyelenggaraan SPBE</p> <p>6) Pemantapan Pelayanan Publik yang berkualitas dan mudah diakses</p>	
	LINGKUNGAN KONDUSIF DAN BERKELANJUTAN	<p>1) Penguatan peran masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah dalam konsep ekonomi Sirkuler.</p> <p>2) Penguatan digitalisasi pengendalian kualitas air, udara dan tanah dari pencemaran.</p> <p>3) Penguatan pelaksanaan penggunaan bahan baku rendah karbon.</p> <p>4) Penguatan sistem penanggulangan bencana melalui peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi serta pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>1) Percepatan pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah dalam konsep ekonomi sirkuler.</p> <p>2) Percepatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dalam peningkatan lingkungan hidup.</p> <p>3) Percepatan penggunaan bahan baku rendah karbon.</p>	<p>1) Perwujudan pengurangan sampah sejak di rumah tangga dan menjadi alternatif pembiayaan.</p> <p>2) Perwujudan pemantauan kualitas lingkungan berbasis teknologi</p> <p>3) Percepatan menuju zero emission</p> <p>4) Pemantapan masyarakat tangguh bencana.</p> <p>5) Pemantapan kondusivitas wilayah</p>	<p>1) Perwujudan kualitas lingkungan</p> <p>2) Perwujudan kabupaten tangguh bencana</p> <p>3) Perwujudan kondusivitas wilayah</p> <p>4) Perwujudan terpenuhinya sanitasi dan air bersih aman dan rumah layak huni</p>

Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		5) Penguatan keamanan dan ketertiban wilayah 6) Percepatan penanganan permukiman kumuh. 7) Percepatan perluasan jangkauan sanitasi dan air bersih aman.	4) Percepatan kesiapsiagaan bencana berbasis riset dan inovasi 5) Percepatan keamanan dan ketertiban wilayah berbasis teknologi 6) Pengurangan backlog perumahan dan ketersediaan kawasan layak huni 7) Pemantapan sanitasi dan air bersih aman.	6) Pemantapan ketersediaan lingkungan hunian yang nyaman dan terjangkau	

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran dari kinerja daerah dalam mencapai pembangunan yang diwujudkan melalui visi dan misi RPJPD tahun 2025-2045. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 ditetapkan enam sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 1) Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sektor unggulan daerah
- AP 2) Pemantapan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
- AP 3) Keberlanjutan ketahanan pangan
- AP 4) Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Penelitian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Sasaran 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 5) Peningkatan pendidikan yang merata dan berkualitas.
- AP 6) Kesehatan untuk semua.
- AP 7) Peningkatan pemajuan kebudayaan.

Sasaran 3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kesetaraan gender, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 8) Perlindungan Sosial, dan kesejahteraan.
- AP 9) Kesetaraan dan keadilan gender.
- AP 10) Penanganan Pengangguran.
- AP 11) Meningkatnya kemandirian desa.

Sasaran 4. Meningkatkan tata Kelola yang akuntabel dan kemandirian daerah, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 12) Penguatan tata kelola pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi
- AP 13) Kualitas pelayanan publik yang mudah diakses

Sasaran 5. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kondusivitas wilayah

- AP 14) Perwujudan kualitas lingkungan hidup baik pada kualitas air, udara dan tutupan lahan.
- AP 15) Pengolahan sampah terintegrasi

AP 16) Sanitasi aman, Air minum Aman, Rumah Layak Huni

AP 17) Mendorong penanganan dan pengelolaan bencana, penguatan kesiapsiagaan bencana serta implementasi penataan ruang.

AP 18) Kondusivitas wilayah

Tabel 5.2.

Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Cilacap dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	Jawa Tengah		Kabupaten Cilacap	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan Untuk Semua • Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif • Perlindungan Sosial yang Adaptif 	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan untuk Semua • Peningkatan pendidikan yang merata dan berkualitas. • Peningkatan pemajuan kebudayaan.
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi • Penerapan Ekonomi Hijau • Transformasi Digital • Integrasi Ekonomi Domestik dan Global • Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sektor unggulan daerah • Pemantapan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi. • Keberlanjutan ketahanan pangan • Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Penelitian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif 	Meningkatnya tata Kelola yang akuntabel dan kemandirian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi • Kualitas pelayanan publik yang mudah diakses
4	Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial • Stabilitas Ekonomi Makro Daerah • Daya Saing Daerah dan 	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kondusivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Kondusivitas Wilayah



No	Jawa Tengah		Kabupaten Cilacap	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		Ketahanan Wilayah		
5	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter• Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mendorong kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Sosial, dan kesejahteraan• kesetaraan dan keadilan gender• Penanganan Pengangguran• Meningkatnya kemandirian desa
6	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	<ul style="list-style-type: none">• Lingkungan Hidup Berkualitas• Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan• Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kondusivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Perwujudan kualitas lingkungan hidup baik pada kualitas air, udara dan tutupan lahan.• pengolahan sampah terintegrasi• Sanitasi aman, Air minum Aman, Rumah Layak Huni• Mendorong penanganan dan pengelolaan bencana, penguatan kesiapsiagaan bencana serta implementasi penataan ruang.

Berdasarkan tabel penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap sudah sejalan. Sasaran pokok yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.
Perumusan Sasaran Pokok

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	AP 1) Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sektor unggulan daerah	(1). Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan sebaga penumpu pangan jawa Tengah, mendorong modernisasi pertanian dan peternakan dari hulu ke hilir, peningkatan hilirisasi pertanian dan peternakan.	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Juta Rupiah	71,37	82,88	109,77	165,68	349,74
			(2). Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sebagai pendukung pencapaian ekonomi biru, pengelolaan pasca panen perikanan dan mendorong insdustrialisasi perikanan.	2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	48,85	52,55	59,05	66,55	78,55
			(3). pengembangan kewirausahaan pada masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah.	3. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	58,12	58,92	59,65	60,52	61,53
			(4). Peningkatan kualitas industri pengolahan dengan meningkatkan pemanfaatan kawasan peruntukan perindustrian.	4. Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,8	4,02	4,28	4,52	5,52
			(5). Mendorong koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan yang mampu menjadi akses permodalan bagi UMKM.	5. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,62	0,63	0,7	0,85	1,15
			(6). peningkatan kualitas UMKM menuju UMKM naik kelas dan mendorong kualitas produk ekspor.	6. Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
			(7). mengurangi disparitas harga dan penguatan daya beli masyarakat.	7. Return on Aset (ROA) BUMD	%	3,09	4,02	5,66	7,91	11,18
			(8). mempermudah layanan perijinan dalam mendorong pertumbuhan investasi.	8. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	20,93	21,01	21,12	21,22	21,38
			(9). peningkatan kualitas BUMD dan bank milik daerah yang mampu mendorong pembangunan daerah.	9. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten /Kota per PDRB	%	1,01	1,41	1,91	2,41	3,01

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target					
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
				10. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,58	0,98	1,48	1,98	2,58		
			(10).mengembangkan sektor pariwisata melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, mendorong kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan pariwisata dan mendorong meningkatkan pendukung pariwisata (akomodasi dan restaurant) dengan bersertifikat CHSE, peningkatan promosi wisata kepada negara negara untuk mendorong kunjungan mancanegara	11. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,49	1,9	2,59	3,51	5,08		
				12. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	332	352	377	402	432		
		AP 2) Pemantapan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi.	(11).Peningkatan kualitas melalui perbaikan jalan, peningkatan jalan, dan konektivitas yang menghubungkan antar moda dan antar wilayah melalui peningkatan angkutan barang, mendorong angkutan massal dan meningkatkan keselamatan transportasi	13. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	76	80	85	90	96		
				14. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	51,316	53,797	56,962	60,127	63,924		
		AP 3) Keberlanjutan ketahanan pangan	(12).Perwujudan ketahanan pangan melalui keberagaman, keamanan pangan, mendorong ketersediaan pangan, dan keterjangkauan harga pangan	15. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	12	9,57	7,21	5,44	3,4		
				16. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,65	85,43	86,42	87,42	89,28		
		AP 4) Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Penelitian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	(13).Perwujudan inovasi daerah yang mampu mendorong peningkatan nilai ekonomi produk berbasis riset dan teknologi serta didukung dengan digitalisasi	17. Kapabilitas Inovasi	Angka	2,15	2,2	2,26	2,31	2,38		
		Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter	AP 5) Peningkatan pendidikan yang merata dan berkualitas.	(14).Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui satuan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses, sarana prasarana sesuai standar, tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata sesuai kompetensi, pembiayaan pendidikan yang	18. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
						a). Literasi Membaca SD/Sederajat	%	64,14	67,01	70,78	74,76	79,97

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			terjangkau, pendidikan kesetaraan yang berkualitas	b). Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	58,11	62,9	69,45	76,67	85,62
				c). Numerasi SD/Sederajat	%	55,12	61,32	70,06	80,04	94,78
				d). Numerasi SMP/Sederajat	%	63,3	65,87	69,23	72,76	77,21
				19. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,76	8	8,3	8,62	9,03
				20. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,41	13,61	13,82	14,18
				21. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,91	5,13	5,42	5,72	6,39
				22. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	77,68	80,4	83,8	87,2	91,19
				23. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,13	1,29	1,37	1,46	2,41
		AP 6) Kesehatan semua untuk	(15).Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat, pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, SDK yang berkualitas, terpenuhinya gizi masyarakat, mendorong pencegahan penyakit menular dan tidak menular, terwujudnya lingkungan yang sehat	24. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,94	76,15	77,68	79,25	81,02
				25. Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	11	9	7	5	2
				26. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,77	9,37	7,62	5,87	4,19
				27. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	91,81	94,13	96,51	100
				28. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	90,9	92,05	93,2	95
				29. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,02	99,02	99,03	99,03	99,04
				30. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	62,49	65,16	69,19	72,91	77,37

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		AP 7) Peningkatan pemajuan kebudayaan.	(16).Perwujudan Kabupaten Cilacap yang berbudaya melalui pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda, pembinaan kesenian dan adat istiadat, kolaborasi budaya dengan pariwisata, pendidikan budaya pada generasi muda, pelestarian tempat tempat sejarah	31. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	97,38	99,1	100	100	100
				32. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan.	%	37,48	40,65	42,55	46,15	53,53
				33. Jumlah pengunjung tempat bersejarah.	Orang	47.610	50.090	53.190	56.290	60.000
				34. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,7	20,31	21,68	23,56	27,18
Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mendorong kesetaraan gender	AP 8) Perlindungan Sosial, dan kesejahteraan	(17).Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan kemiskinan yang menyeluruh, penanganan beban pengeluaran penduduk miskin, peningkatan ketrampilan berusaha pada penduduk miskin, pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat rentan, peningkatan kepedulian masyarakat pada masyarakat rentan	35. Tingkat Kemiskinan	%	10,14	8,15	6,32	2,59	0,48
				36. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,67	20,55	21,71	22,93	23,67
				37. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	7,74	9,33	11,77	14,85	19,62
		AP 9) Kesetaraan dan keadilan gender	(18).Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui kualitas pembangunan yang responsif gender, peningkatan akses pembangunan yang responsif gender, peningkatan perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak	38. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,38	0,355	0,326	0,299	0,2
AP 10) Penanganan Pengangguran	(19).Penanganan pengangguran melalui peningkatan kompetensi calon tenaga	39. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7	7,78	6,46	5,14	3,56		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			kerja, penempatan tenaga kerja, mendorong pendidikan yang mampu menghasilkan calon tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendorong lintas sektor dalam penanganan pengangguran	40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,17	53,37	57,37	61,37	66,34
		AP 11) Meningkatnya kemandirian desa	(20).Perwujudan kemandirian desa melalui perwujudan desa mandiri, mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan mendorong pertumbuhan ekonomi	41. Persentase Desa Mandiri	%	18,59	20,07	23,05	26,77	31,23
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Dinamis	Meningkatnya tata Kelola yang akuntabel dan kemandirian daerah	AP 12) Penguatan tata kelola pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi	(21).Perwujudan tata kelola pemerintahan melalui perwujudan reformasi kepegawaian sesuai dengan Sistem Merit	42. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,51	79,01	80,92	82,88	85
				43. Indeks Reformasi Hukum	Angka	51	55	70	75	78,5
				44. Indeks Integritas Nasional	Angka	77,16	83	88	90,5	93,44
				45. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,47	3,51	3,58	3,63	3,69
		AP 13) Kualitas pelayanan publik yang mudah diakses	(22).Pelayanan publik yang mudah dijangkau	46. Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,49	4,61	4,74	4,89	5,00
				47. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	69,1	74,35	81,49	89,31	100
			(23).Peningkatan kemandirian keuangan daerah	48. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,34	0,3399	0,33997	0,33996	0,33
Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kondusivitas wilayah	AP 14) Perwujudan kualitas lingkungan hidup baik pada kualitas air, udara dan tutupan lahan.	(24).Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, pengelolaan keaneragaman hayati, mendorong tutupan lahan, terwujudnya ruang terbuka hijau, penanganan penurunan emisi GRK, peningkatan kolaborasi lintas stakeholder	49. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Angka	75,1	75,29	75,52	75,75	76,03
				50. Penurunan Emisi GRK	TonCO ₂ e q	323.855,88	4.308.697,31	10.053.627,05	18.671.021,67	28.724.648,72

Misi (1)	Sasaran Pokok (2)	Arah Pembangunan (3)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (4)	Indikator Utama Pembangunan (IUP) (5)	Satuan (6)	Baseline 2025 (7)	Target			
							2025-2029 (8)	2030-2034 (9)	2035-2039 (10)	2040-2045 (11)
		AP 15) Pengolahan sampah terintegrasi	(25).Penanganan dan pengelolaan sampah melalui peningkatan penanganan sampah terpilah ditingkat keluarga, penguatan RDF, peningkatan TPST, pengurangan penggunaan plastik, edukasi dini penanganan sampah, kolaborasi stakeholder dalam penanganan sampah, pengembangan teknologi dalam penanganan sampah	51. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	53,94	54,14	63,74	75,68	90
		AP 16) Sanitasi aman, Air minum Aman, Rumah Layak Huni	(26).Peningkatan sanitasi aman melalui penyediaan pengelolaan limbah domestik dan pengelolaan limbah terpadu, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan sanitasi aman	52. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,3	10,3	26,3	49,3	84,3
			(27).Peningkatan air minum aman melalui peningkatan akses air minum perpipaan di tingkat perkotaan, pengawasan kualitas air minum perpipaan sesuai dengan standar, peningkatan akses air bersih pada seluruh masyarakat, peningkatan daya tampung air sebagai sumber air bersih dan air minum	53. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	28,4	40	57,5	76	100
			(28).Peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah gratis pada penduduk kurang mampu, mendorong kolaborasi lintas stakeholder pada penyediaan perumahan untuk masyarakat rentang, pengembangan rumah sesuai dengan tata ruang daerah	54. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	86,21	88,00	90,00	95,00	100
		AP 17) Mendorong penanganan dan pengelolaan bencana, penguatan kesiapsiagaan bencana serta implementasi penataan ruang.	(29).Penanganan dan pengelolaan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, mendorong kelurahan/desa tangguh bencana, kecamatan tangguh bencana, penyediaan logistik, penguatan early warning system dan kolaborasi lintas stakeholader	55. IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)	Angka	99,34	93,34	85,84	78,34	70,16

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		AP 18) Kondusivitas Wilayah	(30).Peningkatan kondusivitas wilayah melalui peningkatan kesadaran bela negara dan wawasan keangsaan, mendorong kerukunan antar umat beragama, peningkatan ketentraman, ketertiban masyarakat, peningkatan keamanan wilayah	56. Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0

5.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Perencanaan dan arah pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap salah satunya adalah dengan berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten tahun 2011-2031, RPJPD Kabupaten Cilacap, RTRW Provinsi Jawa Tengah, kebijakan RPJPD, RPJMD, Kebijakan Nasional yang tertuang dalam RTRWN, RPJPN dan RPJMN. Arah pengembangan Wilayah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan memperkuat pusat kawasan pelayanan dengan berpusat pada Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang didukung dengan pengembangan pusat pelayanan pada wilayah kecamatan dan desa yang saling terintegrasi;
2. Pengembangan kawasan pendukung ketahanan pangan dengan meningkatkan fungsi kawasan agropolitan yang didukung dengan sarana dan prasarana serta peningkatan produksi serta pengembangan sistem cadangan pangan;
3. Pengembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan meningkatkan peran dan fungsi kawasan industri, kawasan peruntukan industri dan jasa pendukungnya serta pemberdayaan industri kecil menengah;
4. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui dukungan terhadap pembentukan daerah otonomi baru, peningkatan fungsi dan peran wilayah kecamatan, peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi termasuk di dalamnya terminal angkutan penumpang dan barang, serta pengembangan sarana transportasi untuk keseluruhan moda yang ada di Kabupaten Cilacap;
5. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui pengembangan jaringan energi, jaringan komunikasi, penyediaan air baku, peningkatan potensi wisata dan jasa pendukungnya, pertambangan, kawasan permukiman, kawasan lindung, perikanan, serta kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
6. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan kawasan strategis lainnya dengan mengoptimalkan produksi dan distribusi produk unggulan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya.



BAB VI

P E N U T U P

RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025–2045 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Cilacap yang akan diwujudkan dalam waktu 20 tahun mendatang. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebagai wujud dari keterpaduan dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pencapaian sasaran pokok daerah merupakan serangkaian pencapaian terhadap target dari setiap indikator sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD ini. Pencapaian indikator sasaran pokok mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi/akademisi maupun partisipasi masyarakat yang secara sinergis disatukan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang pembangunan Kabupaten Cilacap.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah Kabupaten Cilacap maupun pelaku dari kalangan non pemerintah yaitu akademisi, swasta dan masyarakat.

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan keluaran serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi seluruh stakeholders pembangunan.

Konsistensi perencanaan dan pendanaan dilaksanakan melalui prinsip:

- a. Keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Cilacap dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya.



- b. Penerapan kerangka kerja logis dalam perencanaan pembangunan
- c. Skema pendanaan dan penganggaran

2. Kerangka Pengendalian

Kerangka pengendalian pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cilacap 2025–2045 bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025–2045. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendanaan dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025–2045, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin pencapaian visi dan misi yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Cilacap;
2. Semua perangkat daerah Kabupaten Cilacap dalam menyusun dokumen perencanaan berkewajiban memedomani RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025–2045 dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Cilacap yang memuat visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam RPJMD;
4. Ruang lingkup pengendalian meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, Lembaga penelitian dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif yang baik diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif, sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan dari unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran.



Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama dan kerangka ekonomi makro daerah. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

4. Mekanisme Perubahan

Mekanisme perubahan diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dan kontinuitas kebijakan pembangunan daerah. Perubahan RPJPD Kabupaten Cilacap 2025–2045 ini dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan yang berlaku;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan nasional.
4. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun;

5. Komunikasi Publik

komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Cilacap 2025-2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik perluasan sumber pembiayaan maupun optimalisasi peran pengelolaan keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan skema pembiayaan yang mencakup:

1. Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*).



2. Penguatan dan perluasan berbagai instrument dalam kerangka kerjasama pemerintah dan dunia usaha, khususnya pada aspek regulasi, tatakelola dan kelembagaan menuju *private financial initiative* yang mencakup infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial.
3. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sector non publik dilakukan melalui:

1. Pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli dan bagi hasil.
3. Inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim.

Pelaksanaan Dokumen RPJPD ini diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Cilacap dua puluh tahun ke depan. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Cilacap tahun 2025-2045 yaitu "**CILACAP PENDUKUNG PANGAN JAWA TENGAH YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN**" akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

BUPATI CILACAP,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO